

**PENGARUH PROGRAM *LINKAGE*
TERHADAP SUSTAINABILITAS USAHA
PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH**

Disertasi

Program Doktor Ilmu Ekonomi

Konsentrasi Ekonomi & Keuangan Islam



Oleh

Wahab

NIM : 11916005

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

BERITA ACARA UJIAN TERBUKA DISERTASI

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian terbuka
disertasi yang disusun oleh :

Nama Mhs: Drs. Wahab, MM.

No. Mhs. :11916005

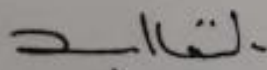
Konsentrasi :Ekonomi & Keuangan Islam

Dengan Judul:

**PENGARUH PROGRAM LINKAGE TERHADAP SUSTAINABILITAS USAHA PADA
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
Maka disertasi tersebut dinyatakan **LULUS**

Promotor,



(Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D.)

Co Promotor I,



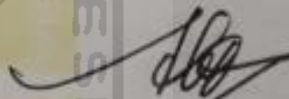
(Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.)

Co Promotor II,



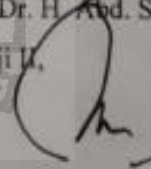
(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

Penguji I,



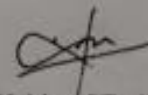
(Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.)

Penguji II,



(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

Penguji III,



(Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D.)

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor



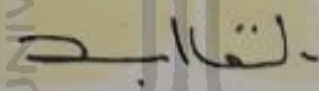
(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta,

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

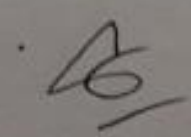
Promotor


(Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D.)


Co Promotor I


(Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.)

Co Promotor II


(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Wahab, MM
NIM : 11916005
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam
Judul Disertasi : Pengaruh Program *Linkage* Terhadap Sustainability Usaha Pada
Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah disertasi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 2 November 2020

Yang Membuat Pernyataan



Drs. H. Wahab, MM

NIM: 11916005

ABSTRAK

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik. LKMS berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan yang diberikan. Di sisi lain, terdapat pengusaha mikro yang memiliki kekurangan akses terhadap permodalan. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan program *linkage*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh program *linkage*, NPF, CAR, jumlah aset, jumlah pembiayaan, dan jumlah cabang terhadap sustainabilitas usaha LKMS di Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif diterapkan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh program *linkage* terhadap sustainabilitas usaha LKMS. Sedangkan teknik analisis korelasional dipilih untuk menganalisis data yang diperoleh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data panel. Jumlah observasi dalam penelitian ini sebesar 273, didapatkan dari BMT yang tergabung dalam Majelis Perwakilan Daerah (MPD) Jawa Tengah. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah: (1) BMT yang telah berdiri lebih dari sepuluh tahun; (2) jumlah total aktiva adalah antara 2 M hingga 300 M; (3) informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja BMT adalah berdasarkan laporan publikasi keuangan BMT selama periode 9 Tahun mulai dari 2010 hingga 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model program *linkage* yang digunakan oleh LKMS adalah *executing* dengan jumlah sebesar 64%; *channeling* sebesar 9%; dan gabungan *executing* dan *channeling* 27%. Adapun alasan LKMS menggunakan program *linkage* adalah: 37% menyatakan lebih efektif dan efisien; 36% menyatakan penggunaan program *linkage* bertujuan untuk memperluas jaringan dan menambah mitra (nasabah); dan 27% menyatakan bebas dalam mengelola dana, tidak terpengaruh oleh bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program *linkage* berpengaruh negatif terhadap sustainabilitas usaha LKMS dari sisi profitabilitas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari sisi beban operasional, terlihat program *linkage* berpengaruh positif. Hasil lainnya adalah bahwa variabel CAR, jumlah aset, dan jumlah cabang berpengaruh positif terhadap sustainabilitas usaha LKMS pada sisi profitabilitas, sedangkan variabel jumlah pembiayaan, jumlah aset, dan jumlah cabang berpengaruh negatif terhadap sustainabilitas pada sisi beban operasional. Selanjutnya, secara simultan terbukti bahwa NPF, CAR, jumlah pembiayaan, jumlah aset, dan jumlah cabang berpengaruh terhadap sustainabilitas usaha LKMS baik pada sisi profitabilitas maupun beban operasional.

Kata kunci: program *linkage*, sustainabilitas.

ABSTRACT

Shariah micro finance institution (LKMS) continues to experience considerable growth. LKMS plays a role in poverty alleviation through the financing provided. On the other hand, micro entrepreneurs have a lack of access to capital. One attempt to resolve this problem is a linkage program.

This study aims to test and analyze the impact of linkage program, NPF, CAR, number of assets, number of financing, and number of branch offices on the sustainability of LKMS business in Central Java. For reach those aims, quantitative approach is used. The quantitative approach is used to test the influence of the scope program on the sustainability of LKMS business. While the correlational analysis techniques were chosen for analyzing data.

The data used in this study is secondary data with panel data type. The number of observations in this study is 273 obtained from BMT which is included in the Central Java Regional Representative Council. The sampling criteria for the study are: (1) BMT which has established more than ten year; (2) the total number of assets is between 2 M to 300 M; (3) the information used to measure the performance of BMT is based on the report of BMT financial publications during the period of 9 years from 2010 to 2018.

The results showed that linkage program model used by LKMS is executing with a total of 64%; channeling of 9%; and combination of executing and channeling 27%. The reason LKMS uses linkage program is 37% stated more effective and efficient; 36% stated the use of linkage program aims to expand the network and add partners (customers); and 27% stated free in managing funds, not affected by the bank. The results also showed that the linkage program has a negative impact on LKMS business sustainability in terms of profitability.

While from the side of operational burden, the linkage program has a positive effect. Another result is CAR variables, number of assets, and number of branch offices have a positive effect on LKMS business sustainability on the profitability side. Meanwhile variables on loan amount, number of assets, and number of branch offices have a negative impact on sustainability on operational burden. Simultaneously, it is proven that NPF, CAR, amount of financing, number of assets, and number of branch offices affect the sustainability of LKMS business both in terms of profitability and operational burden.

Keywords: Program Linkage, Sustainability

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur dan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan penyayang, serta berkat inayah dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia (UII). Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad Saw., keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:

1. Bapak Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D., sebagai promotor dan Bapak Drs. Acmad Tohirin, MA., Ph.D. sebagai co promotor I serta Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D. sebagai copromotor II dalam penulisan disertasi ini. Berkat bimbingan, arahan dan petunjuk beliau beliau maka penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti studi pada Program Doktor UII.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. yang telah memberikan izin kepa penulis untuk mengikuti Pendidikan pada program Doktor di UII Yogyakarta
4. Ayahanda Almarhum Bapak K.H. Zaenuri dan Ibunda Almarhumah Hj. Musdalifah yang elah membersarkan, mengasuh dan mendidik serta mendoakan penulis demi kesuksesan studi dan keselamatan dunia dan akhirat
5. Istri tercinta almarhumah Dra. Hj. Nurhasni dan Ananda tersayang Dania Fitriyanti, Dhea Savana Qurratul Ain dan Dzaky Rajiv Hamidi Wahab yang

dengan penuh ketabahan dan pengertian kepada penulis selama mengikuti studi pada Program Doktor UII sehingga berbagai hambatan dan tantangan dapat teratasi.

6. Kawan-kawan pejuang BMT Jateng dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya.

Hanya kepada Allah penulis memanjatkan doa, semoga segala dukungan, bantuan dan partisipasi dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama serta masyarakat luas. Amin

Semarang, 2 November 2020

Penulis,

Drs. H. Wahab, MM



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KEASLIAN KARYA	iv
ABTSRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Manfaat Penelitian	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Kajian Penelitian terdahulu	13
2.2. Landasan Teori	18
2.2.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	18
2.2.2. Teori <i>Stewardship</i>	19
2.2.3. Teori <i>Sustainability Report</i>	21

2.3.	Tinjauan Pustaka	22
2.3.1.	<i>Sustainabilitas</i> Usaha LKMS	22
2.3.2.	Efektivitas Program <i>Linkage</i>	33
2.3.3.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	34
2.3.4.	Model Program <i>Linkage</i> pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	42
2.3.5.	<i>Road Map Sustainabilitas</i> LKMS	46
2.3.6.	Indikator <i>Sustanabilitas</i> Lembaga Keuangan Mikro Syariah	53
2.3.6.1.	Profitabilitas	54
2.3.6.2.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	55
2.3.7.	Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	56
2.3.8.	Manfaat Analisis Rasio Keuangan dalam LKMS	58
2.3.9.	Kinerja Nonkeuangan dalam LKMS	59
2.4.	Kerangka Pemikiran	67
2.5.	Hipotesis	71
2.5.1.	Pengaruh Program <i>Linkage</i> Terhadap <i>Sustainabilitas</i> Usaha LKMS	71
2.5.2.	Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) terhadap <i>Sustanabilitas</i> Usaha LKMS	73
2.5.3.	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap <i>Sustainabilitas</i> Usaha LKMS	74

2.5.4. Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap <i>Sustainaibilitas</i>	
Usaha LKMS	75
2.5.5. Pengaruh Jumlah Aset Terhadap <i>Sustainaibilitas</i>	
Usaha LKMS	76
2.5.6. Pengaruh Jumlah Cabang terhadap <i>Sustainabilitas</i>	
Usaha LKMS	77

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian	80
3.2. Jenis dan Sumber Data	81
3.3. Populasi dan Sampel.....	81
3.4. Teknik Pengumpulan Data	83
3.5. Definisi Operasional	84
3.6. Metode Analisis data	85
3.7. Pengujian Estimasi Data Panel	86
3.8. Pemilihan Model Estimasi Data Panel	88
3.8.1. Uji Chow.....	89
3.8.2. Uji Hausman	90
3.8.3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	90
3.8.4. Keunggulan Regresi Menggunakan Panel Data	91
3.8.5. Koefisien Determinasi (R^2)	92
3.8.6. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	93
3.8.7. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	94

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum LKMS di Jawa Tengah	95
4.2. <i>Sustanabilitas</i> LKMS	95
4.2.1. <i>Sustanabilitas</i> LKMS di Jawa Tengah	95
4.2.1.1. Perkembangan Profitabilitas LKMS di Jawa Tengah	96
4.2.1.2. Perkembangan BOPO LKMS di Jawa Tengah	97
4.2.2. Perkembangan Program <i>Linkage</i> LKMS di Jawa Tengah	98
4.2.3. Perkembangan Kinerja Keuangan LKMS di Jawa Tengah	100
4.2.3.1. Perkembangan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) LKMS di Jawa Tengah	100
4.2.3.2. Perkembangan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) LKMS di Jawa Tengah	101
4.2.3.3. Perkembangan Jumlah Pembiayaan LKMS di Jawa Tengah	102
4.2.3.4. Perkembangan Jumlah Aset LKMS di Jawa Tengah	103
4.2.3.5. Perkembangan Jumlah Cabang LKMS di Jawa Tengah	104
4.3. Statistik Deskriptif	105
4.4. Pemilihan Model Data Panel Persamaan Pertama	106
4.4.1. <i>Chow Test</i>	106

4.4.2. Uji Hausman	107
4.5. Model Estimasi Regresi Data Panel Persamaan Pertama ...	108
4.6. Pemilihan Model Persamaan Kedua	110
4.6.1. Uji Chow	110
4.6.2. Uji Hausman	110
4.6.3. Model yang Terbaik Persamaan Kedua	111
4.7. Hasil Uji Hipotesis Persamaan Pertama	113
4.7.1. Hasil Uji t (Uji Parsial)	113
4.7.2. Uji F (Uji Simultan)	114
4.8. Hasil Uji Hipotesis Persamaan Kedua	114
4.8.1. Hasil Uji t (Uji Parsial)	114
4.8.2. Uji F (Uji Simultan)	115
4.9. Persamaan Estimasi dengan Intersep sebagai Pembeda	
<i>Cross Effect</i> dan <i>Period Effect</i>	116
4.9.1. Persamaan estimasi dengan intersep sebagai	
pembeda <i>Cross Effect</i>	116
4.9.2. Persamaan Estimasi Dengan Intersep <i>Period Effect</i>	122
4.10. Pengaruh Program <i>Linkage</i> terhadap Profitabilitas	124
4.11. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas	127
4.11.1. Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas	127
4.11.2. Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas	128
4.11.3. Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap	
Profitabilitas	129
4.11.4. Pengaruh Jumlah Aset terhadap Profitabilitas	129
4.11.5. Pengaruh Jumlah Cabang terhadap Profitabilitas ...	130
4.12. Pengaruh Program <i>Linkage</i> terhadap BOPO	131
4.13. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap BOPO	132

4.13.1. Pengaruh NPF terhadap BOPO	132
4.13.2. Pengaruh CAR terhadap BOPO	132
4.13.3. Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap BOPO	133
4.13.4. Pengaruh Jumlah Aset terhadap BOPO	134
4.13.5. Pengaruh Jumlah Cabang Terhadap BOPO	134
4.14. Program <i>Linkage</i> dan Kinerja Keuangan	135
4.14.1. Analisis Program <i>Linkage</i> Terhadap Sustainabilitas LKMS di Jawa Tengah	135
4.14.2. Kinerja Keuangan Terhadap Sustainabilitas LKMS di Jawa Tengah	145

BAB V: PENUTUP

5.1. Simpulan.....	148
5.2. Implikasi Hasil Penelitian	149
5.2.1. Implikasi Teoritis.....	149
5.2.2. Implikasi Manajerial dan Saran.....	150
5.3. Keterbatasan Penelitian	150
5.4. Agenda Penelitian Lanjutan	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Gambar Diagram Alir Temuan Penelitian Terdahulu	16
Gambar 2.2.	Kerangka Pemikiran Penelitian	71
Gambar 3.1.	Prosedur Pengujian Pemilihan Model Panel Data	86
Gambar 4.1	Perkembangan Profitabilitas Rata-rata LKMS se-Jawa Tengah Periode 2010 sampai 2018	96
Gambar 4.2	Perkembangan BOPO rata-rata LKMS se Jawa Tengah Periode 2009-2018	98
Gambar 4.3	Perkembangan program <i>linkage</i> rata-rata LKMS se-Jawa Tengah periode 2010 sampai 2018	99
Gambar 4.4	Perkembangan NPF rata-rata LKMS se Jawa Tengah Periode 2010 sampai 2018	100
Gambar 4.5	Perkembangan Rata-rata <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) LKMS di Jawa Tengah Periode 2010 sampai 2018	102
Gambar 4.6	Perkembangan Jumlah Pembiayaan rata-rata LKMS di Jawa Tengah Periode 2010 sampai 2018	102
Gambar 4.7	Perkembangan Jumlah Aset rata-rata LKMS di Jawa Tengah Periode 2010 sampai 2018	103
Gambar 4.8	Perkembangan Jumlah Cabang LKMS di Jawa Tengah Periode 2010 sampai 2018	104
Gambar 4.9.	Skim <i>Executing</i> pada Program <i>Linkage</i>	137
Gambar 4.10.	Skim <i>Channeling</i> pada Program <i>linkage</i>	137
Gambar 4.11.	Model Program <i>linkage</i> yang digunakan BMT di Jawa Tengah	140
Gambar 4.12	Alasan LKMS menggunakan Program <i>Linkage</i>	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pola Program <i>linkage</i> di Indonesia	3
Tabel 2.1. Instrumen Pembiayaan LKMS	37
Tabel 3.1. Data Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	83
Tabel 3.2. Definisi operasional variabel	84
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif	105
Tabel 4.1. Uji Chow	107
Tabel 4.2. Uji Husman	107
Tabel 4.4. Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> dengan Variabel Dependen Profitabilitas	108
Tabel 4.5. Uji Chow	110
Tabel 4.6. Uji Hausman	111
Tabel 4.7. Hasil Estimasi dengan <i>Fixed Effect Model</i> Persamaan Kedua dengan Variabel Dependen BOPO	111
Tabel 4.8. Hasil Regresi Persamaan Pertama	113
Tabel 4.9. Hasil Regresi Persamaan Kedua	114
Tabel 4.10 Hasil Estimasi Koefisien <i>Cross Effect</i> Persamaan Pertama	116
Tabel 4.11 Persamaan <i>Cross Effect</i> Masing-Masing LKMS	117
Tabel 4.12 Hasil Estimasi Koefisien <i>Cross Effect</i> Persamaan Kedua	119
Tabel 4.13 Persamaan Kedua <i>Cross Effect</i> Masing-Masing LKMS	120
Tabel 4.14 Hasil Estimasi Koefisien <i>Period Effect</i> Persamaan Pertama	122
Tabel 4.15 Hasil Persamaan <i>Period Effect</i> Masing-Masing LKMS	122
Tabel 4.16 Hasil Estimasi Koefisien <i>Period Effect</i> Persamaan Kedua	123
Tabel 4.17 Persamaan Kedua <i>Period Effect</i> Masing-Masing LKMS	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Tabel 2.2 Pola evaluasi Program <i>Linkage</i>	168
Lampiran 1 Data Variabel Dependen dan Variabel Independen	170
Lampiran 2 Estimasi Regresi Common Effect Persamaan Pertama	177
Lampiran 3 Estimasi Regresi Fixed Effect Persamaan Pertama Dependent Variable	178
Lampiran 4 Estimasi Regresi Random Effect Persamaan Pertama	179
Lampiran 5 Uji Chow Persamaan Pertama	181
Lampiran 6 Uji Hausman Persamaan Pertama	182
Lampiran 7 Estimasi Regresi Common Effect Persamaan Kedua	183
Lampiran 8 Estimasi Regresi Fixed Effect Persamaan Kedua	184
Lampiran 9 Estimasi Regresi Random Effect Persamaan Kedua	185
Lampiran 10 Uji Chow Persamaan Kedua	186
Lampiran 11 Uji Hausman Persamaan Kedua	187

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan menerapkan sistem syariah yang memberikan bagi hasil antara pihak nasabah/anggota dengan BMT (Mulyaningrum, 2009). UMKM merupakan salah satu dari komponen pelaku usaha yang memiliki peran cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan (Maryati, 2014). Oleh karena itu, keberadaan UMKM sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi terkendala oleh keterbatasan ekonomi dalam pengembangan potensi (Anggraeni, dkk., 2013). Hal inilah yang membuat UMKM rentan pada berbagai perubahan eksternal.

Lembaga keuangan mikro syariah khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hingga saat ini terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik. BMT memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan yang diberikan (Sriyana & Raya, 2013). BMT juga membantu masyarakat miskin dan kelas menengah ke bawah untuk memperoleh modal dalam membuka usahanya (Sari, 2013).

Kehadiran pembiayaan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi di sisi lain pengusaha mikro memiliki kekurangan akses terhadap permodalan, kemitraan, serta peluang usaha. Permasalahan tersebut menjadi penghambat tumbuh dan berkembangnya usaha mikro (Anggraeni dkk.,

2013). Oleh karena itu, upaya-upaya meningkatkan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan harus dilakukan. Perluasan akses dapat dilakukan dengan menyelaraskan hubungan BMT dengan lembaga keuangan bank, baik bank syariah maupun nonbank syariah.

Adanya keterbatasan BMT berkenaan dengan pembiayaan, sumber daya manusia, jangkauan, dan jaringan pelayanan dalam bertransaksi dan melayani UMKM, menjadikan kerja sama BMT dengan mitra perbankan sangat krusial untuk dilakukan. Hamidah (2016) dalam penelitiannya, memberikan saran bahwa program *linkage* dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian masalah BMT. Program *linkage* merupakan kerja sama yang dilaksanakan bank umum dengan lembaga keuangan mikro dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil mikro (UKM). Melalui program ini dibuat perjanjian kerja sama penyaluran pembiayaan antara pihak bank umum dengan lembaga keuangan mikro (BMT) kepada UKM-UMKM yang akan menguntungkan masing-masing pihak.

Program *linkage* yang diluncurkan sejak tahun 2002 merupakan kerja sama antara bank umum dan lembaga keuangan mikro, tetapi saat itu konsep awal program *linkage* belum terorganisasi secara baik, baik dari sisi konsep ataupun mekanismenya (Hamada, 2010). Program *linkage* mulai terorganisasi secara baik ketika Bank Indonesia (BI) meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2014 dan *linkage* menjadi salah satu program dalam pilar satu API. Salah satu yang membangkitkan program *linkage* adalah dikeluarkannya peraturan Generic Model Program Linkage. Sejak saat

itulah aturan-aturan program *linkage* menjadi jelas, seperti adanya persyaratan minimum BPR peserta program *linkage*.

Program *linkage* memiliki tiga pola yaitu, *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Dalam penerapan pola *executing*, bank umum syariah (BUS) menyalurkan kepada BMT untuk selanjutnya disalurkan kepada UKM. Keputusan siapa calon mitra (UKM) berada di tangan BMT.

Tabel 1.1 Pola Program *Linkage* di Indonesia

<i>Executing</i>	<i>Channeling</i>	<i>Joint Financing</i>
Akad <i>mudharabah</i> ini merupakan suatu bentuk <i>equity financing</i> , penyanggah dana adalah BUS sedangkan BMT bertindak sebagai <i>entrepreneur/mudharib</i> .	BUS langsung memberikan pembiayaan kepada UKM sehingga risiko ditanggung oleh BUS. Kewenangan BMT sebatas yang diberikan oleh BUS.	Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kegagalan bisnis secara normal (<i>normal business loss</i>) maka risiko ditanggung bersama antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsi nya.
Secara teknis, pihak pertama (<i>shahibul maal</i>) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara <i>mudharabah</i> dibagi menurut kesepakatan yang digunakan dalam kontrak.	BMT tidak memiliki kewenangan memutuskan pembiayaan kecuali setelah adanya kuasa yang diberikan oleh BUS. Dasar yang dipergunakan adalah akad <i>wakalah</i> .	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi anggota koperasi merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai.
Kerugian ditanggung oleh pemilik modal (BMT) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Atas dasar inilah maka pihak BUS tidak bertanggung jawab atas permasalahan pembiayaan kepada UKM.	Adapun akad antara BMT dengan UKM disesuaikan dengan kebutuhan UKM, dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada.	Distribusi pendapatan: BUS/UUS memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati dengan UMK; pembagian pendapatan antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsi yang disepakati.

Sumber: Data Diolah (2020)

Munculnya tiga skema penerapan program *linkage*, yaitu *executing*, *channeling*, dan *joint financing* serta kode etik peserta *linkage*, menjadikan BMT memiliki gerak bisnis, kekuatan dana, dan permodalan yang sangat dibutuhkan untuk ekspansi pembiayaannya (Suhartatik, 2013). Berdasarkan data yang diperoleh dari Forum Baitul Maal Jawa Tengah (2018), dari 273 anggotanya hanya 32 yang menggunakan program *linkage*. Sedangkan dari jumlah tersebut, program *linkage* yang dipilih adalah *executing* dan *channeling*. Sementara itu, data dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (dalam Miráj dan Nafik, 2015) menunjukkan jumlah dana program *linkage* perbankan syariah per Oktober 2012 yang disalurkan ke BMT selama satu tahun mencapai Rp439,2 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari dana program *linkage* ke BPRS sebesar Rp207,2 miliar. Lebih lanjut, dari 128 BMT yang tercatat di Bank Indonesia baru 75 BMT (58,5%) yang sudah melakukan *program linkage* dengan bank umum syariah.

Menghadirkan sudut pandang lain, hasil penelitian Ndiege dkk. (2014) menyatakan bahwa program *linkage* yang keberlanjutan sangat tidak disarankan karena akan mematikan profitabilitas mitra (BMT). Hal ini diungkapkan di hasil penelitiannya yang menguji hubungan antara keterkaitan keuangan (diukur sebagai rasio ketergantungan keuangan) dan keberlanjutan (diukur sebagai kecukupan operasional) dari lembaga keuangan yang kurang formal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterkaitan keuangan, semakin *contribution of savings and credit cooperative societies* (SACCOS) menjadi tidak berkelanjutan. Hal ini menyiratkan bahwa

untuk menjadi lembaga yang berkelanjutan, SACCOS harus berusaha menjauhi penggunaan dana eksternal dalam portofolio pinjaman mereka.

Sejalan dengan Ndiege dkk., hasil penelitian Miraáj dan Nafik (2014) menjelaskan bahwa program *linkage* berpengaruh dalam perkembangan kinerja BMT, tetapi lebih nyaman apabila menggunakan dana anggota sebagai sumber pembiayaan karena lebih murah. Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut jika diterapkan di Indonesia karena keberadaan BMT di Indonesia menurut data Permodalan BMT (PBMT) Ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola oleh sekitar 20 ribu orang. Sedangkan di Jawa Tengah ada 273 BMT yang eksis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya BMT bagi kesuksesan dan keberlanjutan UMKM maka penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan.

UMKM menurut UU Nomor 1 Tahun 2013 merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat; pengelolaan simpanan; maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Bank Indonesia, membagi LKM menjadi dua kategori, yaitu LKM yang berwujud bank dan LKM nonbank. BMT merupakan LKM nonbank. Lebih lanjut, berdasarkan deklarasi PBB pada tahun 2005 mengenai lembaga keuangan mikro (*international year of microfinance*), realisasi agenda penelitian mengenai keberlanjutan (*sustainability*) LKMS/BMT, sangat disarankan (Bakhtiari, 2006).

Beberapa studi tentang LKMS/BMT difokuskan pada penilaian kinerja dan keberlanjutan BMT dengan mengevaluasi indikator-indikator keuangan yang secara langsung memengaruhi tingkat kemandirian, jangkauan, dan mekanisme pemberian kredit. Hasil temuan Chaves dkk. (1996) mengungkapkan bahwa keberhasilan BMT di Indonesia ditentukan oleh rancangan organisasinya. Mereka berpendapat bahwa rancangan organisasi perantara layanan keuangan sangatlah penting karena akan menentukan kinerja LKM tersebut dan pada akhirnya menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Hal ini ditunjang dengan adanya payung hukum dari lembaga keuangan mikro sehingga lembaga tersebut dapat berkembang sampai terwujud adanya suatu lembaga yang bernama lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

Keberhasilan LKMS/BMT dalam mencapai tujuan pembangunan telah diungkap dalam berbagai studi. Bukti-bukti di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa BMT tidak hanya menjadi lembaga keuangan semata, tetapi juga sebagai alat pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan (Sutopo, 2005). Kemampuan sebuah BMT dalam mengentaskan kemiskinan tidak semata-mata karena memiliki jumlah aset yang *miliaran*, tetapi disebabkan juga adanya kemampuan BMT dalam menjaga neraca keuangannya dengan kemampuan menghimpun dana dari anggota dan calon anggota, serta kemampuan menyalurkannya untuk modal usaha kepada masyarakat miskin. Ada dua aspek yang sering dijadikan acuan dalam mengukur kinerja keuangan BMT, yaitu aspek keterjangkauan (*outreach*) dan aspek keberlanjutan (*sustainability*) (Tiong dan Anantharaman, 2011).

Aspek keterjangkauan (*oureach*) memberikan indikator keterjangkauan layanan yang diberikan BMT dengan melihat jumlah nasabah (*borrower*); jumlah modal yang dimiliki BMT; dan jumlah cabangnya. Ada pun aspek keberlanjutan (*sustainability*) dibuktikan dengan kemandirian BMT dalam menghimpun dana masyarakat tanpa bergantung kepada lembaga donor asing atau proyek bantuan pemerintah yang sifatnya sesaat (hibah) (The Asia Foundation, 2003).

Sementara itu, menurut Association for Social Advancement (ASA), sustainabilitas BMT dapat dilihat dari dua aspek, yakni sustainabilitas lembaga (*institutional sustainability*) dan sustainabilitas keuangan (*financial sustainability*). *Sustainabilitas* lembaga merupakan kemampuan BMT untuk beroperasi secara berkelanjutan yang didukung oleh faktor keberhasilan dalam mengimplementasikan *cost-effectiveness* sebagai kunci utama kegiatan usahanya (Steinwand, 2007), sedangkan sustainabilitas keuangan merupakan kondisi keuangan BMT yang dapat mencukupi kebutuhan biaya operasi dan biaya dana untuk jangka panjang.

Sustainabilitas LKMS/BMT dimulai dengan kesinambungan operasional ketika lembaga tersebut mampu menutupi biaya operasional tanpa sumber pendapatan yang diikuti dengan kemandirian keuangan ketika lembaga menutupi pendapatan usaha menggunakan operasional pendapatan dan modal dasar yang disubsidi (Situmorang, 2007).

Tahap akhir keberlanjutan dalam sisi keuangan, yaitu tidak hanya mencakup biaya operasi, tetapi juga biaya dana, biaya inflasi, dan semua biaya nonkas sepenuhnya tanpa subsidi dana. *Sustainabilitas* lembaga keuangan

mikro dimulai dengan kesinambungan operasional ketika lembaga tersebut mampu menutupi biaya operasional tanpa sumber pendapatan kemudian diikuti dengan kemandirian keuangan saat lembaga menutupi pendapatan usaha menggunakan operasional pendapatan dan modal dasar yang disubsidi (Situmorang, 2007). Tahap akhir keberlanjutan dalam sisi keuangan lembaga tidak hanya mencakup biaya operasi, tetapi juga biaya dana, biaya inflasi, dan semua biaya nonkas sepenuhnya tanpa subsidi dana.

Perkembangan BMT di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan serta memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan perekonomian Indonesia (Minako, 2010). Keberadaan BMT sudah menjadi salah satu infrastruktur penting yang turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian, BMT dalam perkembangannya sejauh ini dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat karena adanya berbagai persoalan, yakni sumber daya manusia yang belum profesional, modal yang tidak mencukupi, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah, serta infrastruktur yang sangat terbatas.

Hasil penelitian Campion (2010) menunjukkan bahwa komersialisasi industri keuangan mikro menghadapi beberapa hambatan, yaitu: 1) subsidi yang tidak tepat; 2) regulasi dan pengawasan yang buruk; 3) hanya sedikit LKMS yang mampu mengumpulkan tabungan dari masyarakat; 4) kapasitas manajemen yang terbatas; 5) lembaga yang belum efisien; 6) memerlukan penguasaan metode keuangan mikro yang lebih baik untuk daerah perdesaan dan sektor pertanian (Rusydiana, Aam & Abrista, 2010). Keadaan ini

menyebabkan tingkat keberlanjutan usaha atau sustainabilitas LKMS maupun program keuangan mikro masih rendah. Hal ini mengakibatkan hanya ada beberapa LKMS yang mampu bertahan dan bersaing secara baik dengan sesama LKMS maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern.

BMT sebagai bagian dari LKMS seharusnya memiliki pilar-pilar atau berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang memengaruhi sustainabilitas industri keuangan mikro. Pilar-pilar maupun prinsip-prinsip yang dimaksud dapat dirumuskan dengan baik apabila terlebih dahulu mampu ditemukan faktor-faktor yang menjadi penentu sustainabilitas BMT. Lebih lanjut, identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BMT dapat dimanfaatkan untuk merancang kebijakan-kebijakan yang diperlukan, baik dari pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong pengembangan BMT sehingga secara luas dan berkelanjutan mampu menjangkau dan memberdayakan pelaku usaha mikro serta masyarakat miskin melalui ekonomi produktif.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa perkembangan BMT di wilayah ini cukup pesat dan memiliki karakteristik yang menarik dan beragam. Perkembangan BMT di Jawa Tengah sangat signifikan. Menurut data dari PBMTI di Jawa Tengah, ada 273 BMT yang masuk sebagai anggotanya dengan total aset Rp3,8 triliun. Berkembangnya BMT di Jawa Tengah ini seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti bank-bank Islam dan lembaga pembiayaan mikro lainnya yang didukung pemerintah, termasuk di dalamnya

koperasi, Bank Kredit Desa (BKD), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bersaing satu sama lain untuk menarik para pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan mikro. Karakteristik unik ini menjadi jalan bagi peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

Terdapat beberapa penelitian yang membahas *program linkage*, tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian lain sebelumnya karena penelitian ini menekankan pengaruh *program linkage* terhadap sustainabilitas dengan menggunakan indikator profitabilitas (ROA) dan beban operasional. Melihat adanya nilai strategis BMT sebagai LKMS maka penelitian ini akan menguji pengaruh program *linkage* terhadap sustainabilitas usaha pada lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan sustainabilitas yang diukur adalah aspek kinerja faktor-faktor keuangan BMT. Adanya pengaruh program *linkage* BMT dalam penelitian ini digambarkan sebagai suatu kondisi BMT dilihat dari kesehatan, CAR, NPF, jumlah aset, jumlah *out standing* pembiayaan, dan jumlah cabang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh program *linkage*, NPF, CAR, jumlah aset, jumlah pembiayaan, dan jumlah cabang terhadap sustainabilitas usaha LKMS di Jawa Tengah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program *linkage*, NPF, CAR, jumlah aset, jumlah pembiayaan, dan jumlah cabang terhadap sustainabilitas usaha LKMS di Jawa Tengah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Melihat pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan dalam meningkatkan perekonomian, kajian yang khusus menganalisis pengaruh program *linkage* terhadap keberlangsungan usaha LKMS di Jawa Tengah sangatlah penting. Penelitian ini merupakan salah satu upaya akademis yang penting untuk dilakukan, yakni melihat pengaruh program *linkage* terhadap kesinambungan (*sustainability*) usaha pada BMT. Hasil yang diharapkan tidak hanya bermanfaat praktis bagi pemerintah dan *stakeholder* lain seperti pihak pemodal dan masyarakat, tetapi juga akan memberikan kontribusi akademis khususnya di bidang keuangan mikro syariah. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Manfaat akademis

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan program *linkage* dan teori sustainabilitas lembaga keuangan mikro, khususnya lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah.

b. Manfaat praktis

Bagi pengelola BMT, sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah sehingga akan mencapai tingkat keberhasilan yang optimal untuk

menghadapi tantangan persaingan usaha dalam lingkup pembiayaan mikro, khususnya BMT di Jawa Tengah

c. Manfaat kebijakan

Sebagai bentuk kontribusi berupa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah sebagai pengatur dan pengawas BMT dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan industri BMT di Jawa Tengah dan umumnya di Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan disertasi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Di dalam Bab I diuraikan pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, berisi gap penelitian dan *novelty* disertasi, rumusan masalah yang diselesaikan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian bagi kalangan akademisi dan praktisi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, serta sistematika penulisan yang berisi urutan dan alur hasil disertasi.

Ada pun Bab II berisi kajian teori yang mencakup *blending* teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, dan pembuatan sistem. Sedangkan Bab III berisi uraian tentang metode penelitian yang mencakup perancangan dan implementasi yang dilakukan penulis. Bab IV berisi uraian hasil dan pembahasan yang memaparkan hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, desain, hasil penelitian, dan implementasinya. Di dalam Bab V berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Mengkaji pengaruh program *linkage*, kinerja lembaga, keterjangkauan LKMS terhadap sustainabilitas usaha maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan. Penelitian terdahulu yang dipakai adalah sebagai berikut:

Bansal (2003) menjelaskan bahwa program *linkage* di India yang dilakukan oleh bank komersial, BPR, dan koperasi dengan pemerintah sebagai fasilitator, meningkatkan kinerja keuangan lembaga keuangan. Ia menjelaskan kredit yang diberikan kepada masyarakat miskin dapat digunakan untuk penambahan modal usaha dan memulihkan kehidupan desa di berbagai wilayah di India. Hal yang sama dapat dilihat dari hasil penelitian Anita dan Rahardian (2003) tentang pengaruh *finacial sustainability ratio* (CAR, LDR dan NPL) terhadap Profitabilitas (ROA) dan BOPO. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel CAR dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel NPL berpengaruh negatif terhadap BOPO

Keberlanjutan lembaga keuangan mikro diteliti lebih lanjut oleh Hartarska, & Nadolnyak (2007). Mereka meneliti di 62 LKM di negara berkembang terhadap dampak regulasi pendanaan terhadap LKM. Penelitian ini menggunakan variabel OSS (*Operational self-sufficiency*), NAB (*Logarithm of the number of active borrowers*), SAVINGS (*Ratio of saving*

to total assets). Variabel-variabel ditetapkan sebagai fungsi dari variabel khusus LKM karena adanya bantuan pendanaan dan secara konsisten juga terbukti adanya perumbuhan LKM di lintas negara. Penelitian ini menyatakan bahwa keterlibatan regulasi pendanaan secara langsung berdampak pada keberlanjutan operasional LKM dan pengumpulan tabungan LKM akan berdampak lebih baik bila dibandingkan dengan regulasi pendanaan dari pihak lain.

Penelitian Jubaedah (2009) menjelaskan bahwa program *linkage* melalui pola *executing* lebih berperan karena lebih signifikan bagi BPRS. Di sisi lain, permasalahan yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah ketidaksesuaian potensi dan kompetensi antara BPRS dan BMI, strateginya, yaitu dengan penguatan manajemen, administrasi, dan operasional BPRS; memantapkan sistem, SDM; pendampingan yang maksimal dari BMI; serta penggunaan yang maksimal atas infrastruktur perbankan syariah Indonesia.

Hamada Miki (2010) dalam penelitian berjudul "*Commercialization of Microfinance in Indonesia: The Shortage of Fund and the Linkage Program*" menjelaskan bahwa dari hasil analisis regresi dengan menggunakan data keuangan dari total 1.104 BPR, terungkap bahwa pinjaman bank berkontribusi pada perluasan kredit BPR. Apalagi efek pinjaman bank melalui program *linkage* lebih besar dari pinjaman bank saja sehingga akan memengaruhi pengembalian aset secara positif.

Hasil penelitian Maesaroh (2011) tentang tingkat efektivitas program *linkage* dengan melihat peningkatan aset, modal, laba, serta jumlah nasabah

LKM setelah menjalin program *linkage* dengan BSM, menunjukkan bahwa LKM yang menjalin program *linkage* dengan Bank Syariah Mandiri telah mengalami peningkatan aset, modal, dan jumlah nasabah, tetapi sebagian mengalami penurunan pada perolehan laba.

Hasil temuan Hamada (2010), Jubaedah (2009), Maesaroh (2011) di atas selaras dengan hasil temuan REF Nasution dan Ahmed (2015) yang menemukan bahwa kesinergian antara perbankan syariah dan BMT memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan BMT Pulau Jawa dan Provinsi Lampung.

Dalam penelitian yang lain, Kumara (2010) membandingkan antara BPR yang mengikuti dan tidak mengikuti program *linkage*. Perbedaan tersebut dihitung melalui hasil ukur kinerja BPR dari LDR, NPL, dan ROA. Hasil pengujian menunjukkan bahwa BPR yang mengikuti program *linkage* tidak lebih baik dari BPR yang tidak mengikuti program *linkage* sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan program *linkage* tidak dapat mendorong kinerja BPR terhadap ROA, LDR, dan NPL menjadi lebih baik. Hal ini didukung dengan pernyataan Kaleshu dan Temu (2012) yang menyatakan bahwa program *linkage* akan meningkatkan likuiditas pada koperasi kredit masyarakat dalam jangka pendek, tetapi jika hal ini dilakukan secara jangka panjang akan mengganggu keberlanjutan koperasi kredit masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.

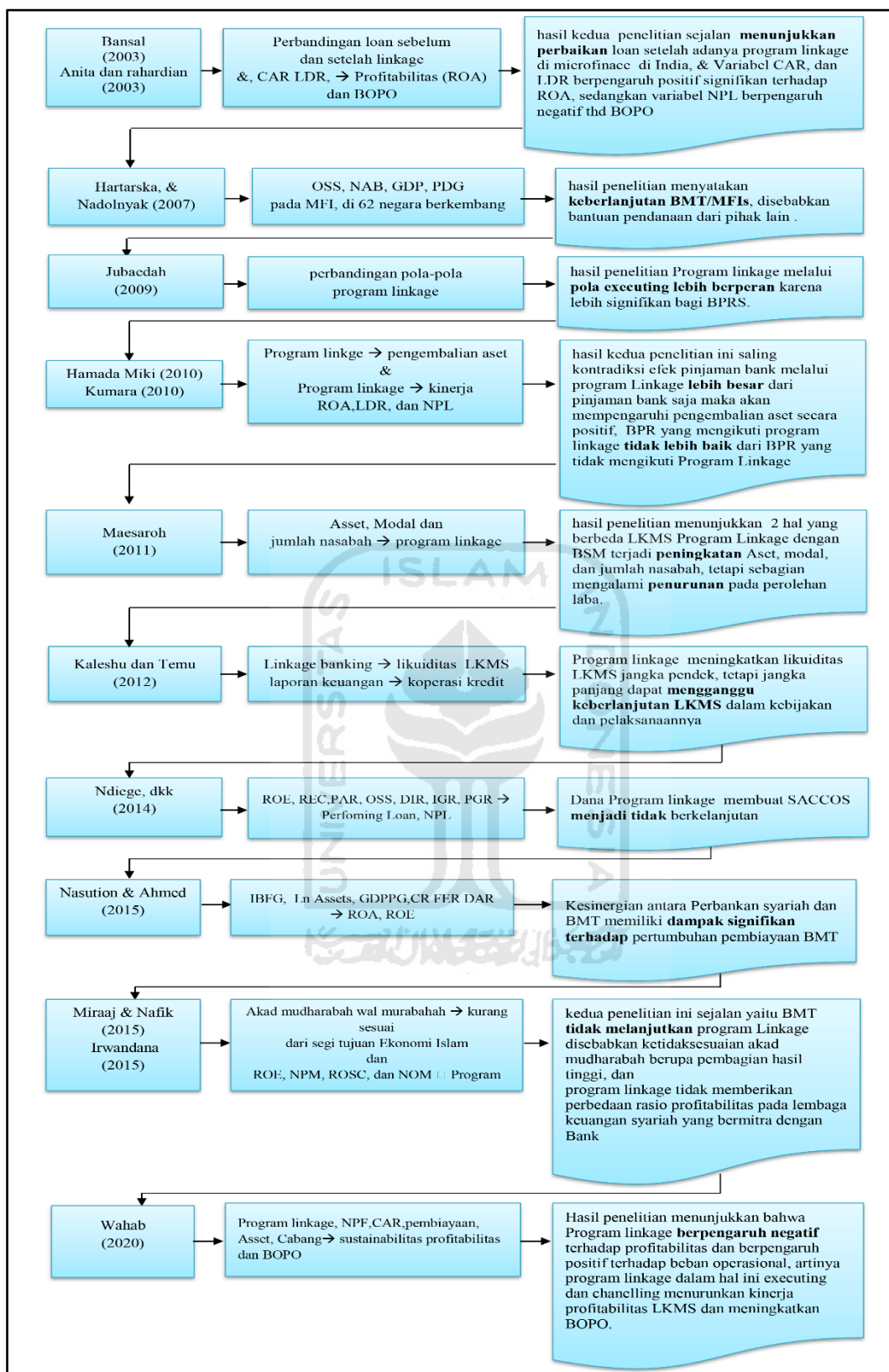
Hasil temuan Kumara (2010) juga selaras dengan Ndiege dkk. (2014) yang menemukan bahwa program *linkage* oleh SACCOS (sejenis koperasi jika Indonesia) akan membuat SACCOS tidak berkelanjutan (sustainabilitas). Hal ini menyiratkan bahwa untuk menjadi lembaga yang berkelanjutan,

SACCOS harus berusaha menjauhi penggunaan dana eksternal (program *linkage*) dalam portofolio pinjaman mereka.

Hasil temuan Miraáj dan Nafik (2015) menunjukkan bahwa keputusan BMT untuk tidak melanjutkan program *linkage* bukan disebabkan karena memberatkan BMT, melainkan sistem yang digunakan, yaitu akad *mudharabah*, tidak sesuai dengan akad di mana pihak BMT ingin pembagian hasil tinggi, tetapi pembayaran keinginannya rendah. Selain itu, bank syariah juga belum menjalankan secara penuh sistem *mudharabah* tersebut sehingga pemahaman kedua belah pihak terkait akad *mudharabah* dengan prinsip *taáwun* belum dijalankan dengan baik.

Sama halnya dengan temuan Miraáj dan Nafik (2015), hasil penelitian Irwandana (2015) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dan peningkatan signifikan pada rasio profitabilitas dengan adanya program *linkage* atau tidak di lembaga keuangan syariah yang bermitra dengan Bank Muamalat Indonesia selama 4 (empat) tahun.

Hasil-hasil kajian penelitian di atas digunakan untuk menyusun dan mengelaborasi konsep, teori, atau model sebagai kelanjutan, peningkatan, ataupun penyempurnaan model program *linkage* yang dipilih terhadap sustainabilitas lembaga keuangan mikro syariah. Perbedaan ini menjadi peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan.



Gambar 2.1. Diagram Alir Temuan Penelitian Terdahulu

Sumber: Penelitian diolah (2020)

Berdasarkan Diagram Alir Temuan Penelitian Terdahulu di atas maka penelitian ini menguji pengaruh program *linkage* yang terdiri dari *executing* dan *channeling* serta adanya penambahan variabel keuangan dan nonkeuangan terhadap sustainabilitas usaha pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain karena pada penelitian lain tidak mencakup dua jenis dalam program *linkage*, salah satunya penelitian terdahulu yang hanya menggunakan satu jenis program *linkage* dan pengaruhnya terhadap sustainabilitas di koperasi kredit di Kilimanjaro Tanzania (Ndiege dkk., 2014)

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi terfokus pada dua pihak, yaitu *principal* dan *agent* (agen). *Principal* didefinisikan sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk dapat bertindak atas nama *principal* tersebut. Agen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pihak pemilik harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkan. Di lain pihak, *principal* sebagai pihak pemberi amanah akan memberikan insentif kepada agen dengan berbagai macam fasilitas, baik finansial maupun nonfinansial. Permasalahan akan timbul apabila terdapat persepsi dan sikap yang berbeda dalam memberikan informasi yang akan digunakan untuk memberikan insentif kepada agen. Teori agensi mengimplikasikan adanya informasi asimetris antara manajer sebagai agen dengan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai *principal*. Informasi asimetris muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi

internal dan prospek perusahaan pada masa mendatang dibanding pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Jensen & Meckling, 1976).

2.2.2. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), mekanisme, serta psikologis (motivasi, identifikasi, dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai *steward* akan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Davis *et al.*, 1997).

Stewardship (suatu sikap melayani) merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi; suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang ada sekarang, dari konsep mengendalikan (*control*) dan mengarahkan, ke konsep peraturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota/tim dalam organisasi yang merasa organisasi sebagai miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri (Ikhsan & Suprasto, 2008).

Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi di mana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi, tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (pemilik) (Davis *et al.*, 1997). Teori ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan sehingga fungsi utilitas akan maksimal dan

tujuannya sesuai dengan harapan pemilik karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan mencoba bekerja sama daripada menentanginya. *Steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007). Teori *stewardship* ini merupakan teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia, yang hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pihak LKMS sebagai pengelola dana akan memberikan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemilik dana atau lembaga keuangan (*principal*) atau sesuai dengan tujuan bersama, bukan untuk memenuhi kepentingan (tujuan) pribadinya. Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh program *linkage* terhadap sustainabilitas usaha LKMS.

2.2.3. Teori Sustainability Report

Sustainability report memiliki definisi yang beragam. Menurut Elkington (1997), *sustainability report* berarti laporan yang memuat tidak hanya informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). Saat ini, implementasi *sustainability report* di Indonesia

didukung oleh aturan pemerintah, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007.

Praktik pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diungkapkan melalui *sustainability report* membutuhkan pedoman. Salah satu pedoman yang dapat digunakan adalah *global reporting initiative* (GRI). Di Indonesia, pedoman ini digunakan oleh NCSR sebagai lembaga independen yang secara berkala memberikan penilaian pengungkapan *sustainability report* yang disampaikan perusahaan-perusahaan.

Manfaat *sustainability report* berdasarkan pada kerangka GRI (2011) adalah sebagai berikut:

- a. sebagai *benchmark* kinerja *organisasional* dengan memperhatikan hukum, norma, undang-undang, standar kinerja, dan prakarsa sukarela;
- b. mendemonstrasikan komitmen *organisasional* untuk *sustainable development*; dan
- c. membandingkan kinerja *organisasional* setiap waktu.

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan yang ada, terutama para pemangku kepentingan yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pelanggan, dan pemilik (Ghozali dan Chariri, 2007). Oleh karena itu, kelangsungan hidup organisasi bergantung pada dukungan para pemangku kepentingan sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.

Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan perusahaan adalah dengan mengungkapkan *sustainability report* yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengungkapan *sustainability report* diharapkan dapat memenuhi keinginan dari para pemangku kepentingan sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai keberlanjutan di masa akan datang.

2.3. Tinjauan Pustaka

2.3.1. *Sustainabilitas* Usaha LKMS

Cokro dan Ismail (2008) menganalisis *sustainabilitas* pembiayaan mikro Islam untuk mengembangkan usaha mikro (ME). Cokro menggunakan sampel Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi *sustainabilitas*, yaitu efisiensi teknis (menggunakan *Data Envelopment Analysis* [DEA]) dan tingkat jangkauan. Hasilnya menunjukkan bahwa: pertama, umumnya efisiensi BMT relatif rendah. Efisiensi skala juga menunjukkan bahwa BMT dioperasikan masih jauh dari skala optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam skor efisiensi yang diperoleh dari model *Charnes Cooper Rhodes Model* dan *the Banker Charnes Cooper Model*. Hal ini menunjukkan bahwa BMT masih menghadapi masalah manajerial. Kedua, pembiayaan mikro syariah berguna untuk mengembangkan usaha mikro dan menyumbang manfaat sosial yang besar bagi masyarakat dalam beberapa cara. Meskipun efisiensi

profitabilitas BMT relatif rendah, tetapi BMT telah menghasilkan keuntungan dan manfaat sosial.

Kreativitas jangkauan layanan pada anggota atau nasabah dengan biaya transaksi operasional lebih rendah (efisiensi) akan menentukan efisiensi, kinerja, dan jangkauan LKM untuk menyediakan layanan keuangan kepada sejumlah besar anggota atau nasabah. Paxton & Cuevas (2002) menegaskan, jangkauan memiliki keuntungan sosial bagi LKM dalam meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Keduanya juga mengemukakan bahwa *the depth outreach* mengindikasikan seberapa besar kelompok yang selama ini tidak memperoleh layanan.

Di negara berkembang, kebanyakan institusi keuangan, baik formal maupun semi formal secara konsisten tidak melayani beberapa kategori masyarakat, seperti masyarakat miskin, perempuan, masyarakat perdesaan, dan tidak berpendidikan.

Kemiskinan tingkat pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan sehingga menghambat investasi. Sedangkan kredit memberikan masyarakat miskin kesempatan untuk berinvestasi sehingga memecahkan lingkaran kemiskinan tersebut (Hulme, dkk. 1996). Selanjutnya, pada umumnya, untuk mengukur jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dari lembaga keuangan mikro digunakan rata-rata jumlah pinjaman (Cull dkk. [2007], Mersland & Strom [2010], Hermes, dkk. [2011]).

CARE International dan Mercy Corps, LSM internasional yang mempunyai program pengembangan keuangan mikro di Indonesia (Munawar 2010), mendefinisikan nasabah miskin sebagai orang-orang yang

mendapatkan kredit dengan nominal di bawah Rp5.000.000,00. Masyarakat miskin di sini bukan berarti masyarakat yang sangat miskin (*the poorest*) karena persyaratan memperoleh pinjaman adalah telah mengoperasikan usahanya minimal satu tahun (Gonzales dkk., 1997). Artinya, jenis pinjaman yang digunakan adalah pinjaman produktif. Dalam lingkup internasional, nilai kredit mikro sebesar \$100 (El-Komi & Croson, 2012) diperuntukkan bagi masyarakat paling miskin. Selanjutnya, salah satu metode untuk mengukur jangkauan layanan lembaga keuangan mikro bagi masyarakat miskin adalah menggunakan indeks kemiskinan relatif dari CGAP.

Asian Development Bank (2000) dan Weiss & Montgomery (2005) mengemukakan bahwa faktor sustainabilitas LKMS terletak pada tata hukum transaksi keuangan dan daya paksa (*law enforcement*) terhadap sebuah kontrak perjanjian. Tata hukum transaksi lembaga keuangan meliputi: regulasi dengan prinsip kehati-hatian; pengawasan terhadap lembaga keuangan; keterbukaan informasi keuangan; kebijakan dan praktik akuntansi; serta fasilitas pelatihan untuk akuntan. Sedangkan kapasitas kelembagaan mencakup: kemampuan untuk mengurangi biaya-biaya transaksi; mencapai tingkatan untuk terus bertahan hidup; dan mencapai jangkauan yang lebih luas. *Sustainabilitas* dan kapasitas LKM ditentukan oleh kemampuannya beroperasi secara komersial (ADB, 2000).

Sustainabilitas usaha LKM menurut penelitian Woller (2000) dan Schreiner (2000) merupakan pola dan faktor dari kualitas yang produktif; profitabilitas lembaga; layanan yang kreatif dan sistem yang terus-menerus

dengan sistem aturan; organisasi *stakeholder* dan sistem insentif LKM yang dapat bertahan serta mudah beradaptasi dengan perubahan pasar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sustainabilitas memiliki dua pendekatan, yaitu kapasitas lembaga dan penguatan permodalan. Hasil tersebut merupakan temuan dari Adnan dkk. (2003) dan Adnan dkk. (2013). Komponen tersebut berpengaruh langsung terhadap strategi keberlangsungan usaha LKMS.

Pengukuran sustainabilitas usaha LKMS dapat diukur berdasarkan tingkat kesehatan menurut aspek keuangan, yaitu: modal (*capital*), aset (*assets*), pendapatan (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*). Variabel *capital adequacy ratio* (CAR) mewakili kecukupan modal; *non-performing financing* (NPF) sebagai rasio pembiayaan bermasalah dapat mewakili kesehatan kualitas aset; *operational efficiency ratio* (OER) merupakan rasio efisiensi yang diukur menurut beban operasional terhadap pendapatan operasional yang mencerminkan tingkat efisiensi operasional; dan *financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio likuiditas (Anggreni dkk, 2013).

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka sustainabilitas usaha dan menampung risiko kerugian. Besarnya modal suatu LKMS akan berpengaruh pada efisiensi suatu LKMS dalam menjalankan kegiatannya dan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap kinerja LKMS. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya.

Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki LKMS guna menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan LKMS tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit (Muhammad, 2014). Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti LKMS tersebut mampu membiayai operasi LKMS. Keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas LKMS yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, rasio CAR dapat dirumuskan sebagai perbandingan antara modal LKMS terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Modal LKMS adalah total modal yang berasal dari LKMS yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti adalah modal milik sendiri yang diperoleh dari modal disetor oleh pemegang saham. Modal jenis ini terdiri dari modal disetor, agio saham, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap; cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan; modal kuasa; dan pinjaman subordinasi. Sementara itu ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dengan ATMR administratif. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, besarnya CAR yang harus dicapai oleh LKMS minimal 8%.

Risiko kredit yang diterima oleh LKMS merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan oleh ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak LKMS kepada debitur. Menurut Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 Lampiran 14, NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit LKMS yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, LKMS harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh LKMS.

Kredit sebagaimana yang dimaksud di atas adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah di bawah 5%.

Tingkat kelangsungan usaha LKMS berkaitan dengan aktiva produktif yang dimilikinya. Oleh karena itu, manajemen LKMS dituntut untuk senantiasa memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimilikinya. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi oleh LKMS akibat pemberian kredit dan investasi dana LKMS. Aktiva produktif yang dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana, baik dalam rupiah maupun dalam

valuta asing, dalam bentuk kredit, dan surat berharga. Rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen LKMS dalam mengelola kredit bermasalah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen LKMS dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh LKMS.

Kunci bagi keberlanjutan (*sustainability*) dari sebuah LKM adalah harus ada tujuan komersial (*profit making objective*), yakni kemampuan menghasilkan laba, di samping adanya misi sosial yang diemban (*social mission*). Penyelenggaraan jasa keuangan mikro yang *sustainable* dapat dilaksanakan oleh institusi komersial yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi. Aspek terpentingnya adalah menyediakan layanan kredit dan tabungan secara menguntungkan serta dapat menjangkau nasabah dalam skala besar. Hal ini dimungkinkan apabila LKM telah diregulasi dan mandiri.

Sustainabilitas LKM dapat dilihat dari aspek *sustainabilitas* lembaga dan *sustainabilitas* keuangan. *Sustainabilitas* lembaga adalah kemampuan LKM untuk beroperasi secara berkelanjutan yang didukung oleh faktor keberhasilan dalam maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern. Menurut Association for Social Advancement (ASA), *sustainabilitas* LKM dapat dilihat dari aspek *sustainabilitas* lembaga dan *sustainabilitas* keuangan (Ito, 2003). *Sustainabilitas* lembaga adalah kemampuan LKM untuk beroperasi secara berkelanjutan yang didukung oleh faktor keberhasilan dalam mengimplementasikan *cost-effectiveness* sebagai kunci utama kegiatan usahanya, sedangkan *sustainabilitas* keuangan

merupakan kondisi keuangan suatu LKM yang dalam kegiatannya dapat mencukupi kebutuhan biaya operasi dan biaya dana untuk jangka panjang.

Asian Development Bank (ADB) melakukan kajian pengembangan LKM. Menurut ADB, infrastruktur keuangan merupakan hal yang menentukan sustainabilitas, yang terdiri dari tata hukum untuk transaksi keuangan dan daya paksa (*law enforcement*) terhadap sebuah kontrak perjanjian. Tata hukum transaksi lembaga keuangan meliputi regulasi dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan terhadap lembaga keuangan, keterbukaan informasi keuangan, kebijakan dan praktik akuntansi, serta fasilitas pelatihan untuk akuntan. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan mencakup kemampuan untuk mengurangi biaya-biaya transaksi; mencapai tingkatan untuk terus bertahan hidup; serta mencapai jangkauan yang lebih luas. *Sustainabilitas* dan kapasitas LKM ditentukan oleh kemampuannya beroperasi secara komersial.

Konsep sustainabilitas LKM yang dikembangkan selama ini menyatakan bahwa sustainabilitas LKM adalah kemampuan LKM dalam menjalankan sistem yang telah dibangun agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Begitu pun LKM yang memiliki kemampuan sebagai penyedia keuangan mikro untuk menutupi semua biaya dalam mencapai *financial sustainability* (Kinde, 2012; Quayes, 2012). Sistem tersebut dalam konsep sustainabilitas LKM syariah diukur berdasarkan pada syariah *compliance finance* yang merujuk pada pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya modal dan biaya pendanaan (Hirschhorn, 1984; Hartarska & Nadolnyak, 2007). Lebih lanjut, pendapatan dan biaya modal dalam LKM

syariah diperoleh bukan dari transaksi *ribawi*, *tadlis*, perilaku spekulasi, perjudian, dan *gharar*. *Sustainability* LKM merupakan kemampuan LKM untuk bertahan secara terus-menerus dalam menutupi biaya operasional dengan menggunakan pendapatan usaha yang dihasilkan dari aktivitas bisnis.

Menurut Murdoch (dalam Hemann, 2008), dalam gerakan keuangan mikro (*microfinance movement*) di dunia terdapat dua pendekatan utama untuk menjangkau kaum miskin melalui pemberian akses terhadap layanan keuangan, yaitu pendekatan kelembagaan (*institutionist approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*welfarist approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro secara signifikan ditandai dengan pendekatan institusional untuk keberlanjutan.

Lebih lanjut, pendekatan kelembagaan fokus pada penciptaan lembaga keuangan untuk menjangkau nasabah yang tak terlayani oleh sistem keuangan formal (Baskara, 2013). Penekanan terhadap kelembagaan terdapat pada pencapaian kecukupan keuangan (*financial self sufficiency*); lebar jangkauan (*breadth of outreach*) yang artinya jumlah nasabah terlayani; serta dampaknya secara positif terhadap nasabah (*positive client impact*) (Hiemann, 2008). Sementara pendekatan kesejahteraan lebih menekankan pada kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) yang berarti level masyarakat termiskin yang dilayani (Indarto & Ayu, 2011). Pendekatan ini tidak selalu melihat sisi kelembagaan, tetapi penekanan pada dampak (*impact*) dari layanan keuangan terhadap masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*economically active poor*). Dalam pelaksanaannya,

Zeller dkk. (2006) mencatat bahwa kedua pendekatan tersebut pada dasarnya mempunyai peran yang sama dalam pengembangan keuangan mikro institusional.

Kunci bagi keberlanjutan (*sustainability*) dari sebuah LKMS adalah harus ada tujuan komersial (*profit making objective*), yakni kemampuan menghasilkan laba, di samping adanya misi sosial yang diemban (*social mission*). Penyelenggaraan jasa keuangan mikro yang *sustainable* dapat dilaksanakan oleh institusi komersial yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi. Aspek terpentingnya adalah menyediakan layanan kredit dan tabungan secara menguntungkan dan dapat menjangkau nasabah dalam skala besar. Hal ini dimungkinkan apabila LKM telah diregulasi dan mandiri.

Berdasarkan uraian tentang teori sustainabilitas lembaga keuangan mikro (LKM) dan penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan faktor-faktor eksternal dan internal yang terindikasi memengaruhi sustainabilitas BMT (Copestake, 2007). Faktor eksternal meliputi tiga aspek, yaitu aspek regulasi, aspek pengawasan, dan aspek infrastruktur. Sedangkan faktor internal terdiri dari lima aspek, yaitu aspek sumber daya manusia (SDM), aspek manajemen, aspek permodalan, aspek jangkauan pasar, dan aspek inovasi produk.

Sustainability usaha LKMS dalam penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja keuangan, yaitu rasio profitabilitas (ROA) dan rasio efisiensi (BOPO). Kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting mengingat LKMS merupakan bisnis kepercayaan. Dengan kinerja keuangan

yang semakin baik maka semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi di LKMS.

Salah satu peningkatan kinerja keuangan adalah dengan meningkatkan profitabilitas LKMS karena profit yang dihasilkan oleh LKMS tidak hanya memengaruhi tingkat bagi hasil bagi pemegang sahamnya, tetapi juga memengaruhi tingkat bagi hasil yang diterima oleh para anggota atau nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, LKMS harus terus meningkatkan profitabilitasnya. Rasio profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio *return on equity* (ROE) atau *return on assets* (ROA). Namun, regulator lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena ROA menunjukkan nilai profitabilitas yang dihasilkan dari aset yang sebagian besar merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat.

Kinerja keuangan juga mencerminkan kesehatan LKMS tersebut dan berdasarkan aturan regulator menyatakan bahwa tingkat kesehatan LKMS adalah diukur dari aspek rasio ROA dan rasio BOPO (Anggraini, 2013). Rasio BOPO merupakan salah satu indikator penting keuangan yang sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat efisiensi perusahaan sebelum melakukan investasi. Sedangkan rasio ROA merupakan indikator profitabilitas dari suatu perusahaan (Nugroho & Bararah, 2018). Jadi, penggunaan ukuran kinerja rasio ROA dan rasio BOPO dalam mengukur tingkat sustainabilitas usaha LKMS sudah sesuai dengan aturan regulator. Sedangkan kinerja keuangan tersebut bisa menunjukkan tingkat kemampuan LKMS menghasilkan laba dan menjaga tingkat kesehatannya.

2.3.2. Efektivitas Program *Linkage*

Penelitian Campion (2002) menyimpulkan bahwa komersialisasi industri keuangan mikro menghadapi beberapa hambatan, yaitu: 1) subsidi atau program *linkage* yang tidak tepat; 2) regulasi dan pengawasan yang buruk; 3) hanya sedikit LKM yang mampu mengumpulkan tabungan dari masyarakat; 4) kapasitas manajemen yang terbatas; 5) kelembagaan yang belum efisien; dan 6) memerlukan penguasaan metode keuangan mikro yang lebih baik untuk daerah perdesaan dan sektor pertanian.

Keadaan-keadaan di atas menyebabkan tingkat keberlanjutan usaha atau *sustainability* LKMS maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Hanya beberapa LKM yang mampu bertahan dan bersaing, baik dengan sesama LKM maupun dengan lembaga keuangan lain.

Kehadiran program *linkage* memengaruhi tingkat kesehatan LKM secara keseluruhan, sedangkan perbandingan rasio menjelaskan bahwa penerapan program *linkage* belum mengalami pengaruh terhadap peningkatan laba (Maesaroh, 2011). Ada beberapa keuntungan program *linkage*, yaitu adanya pengaturan pinjaman kelompok serta peminjam sendiri yang melakukan tugas evaluasi kredit. Hal tersebut ditegaskan di dalam penelitian bahwa program *linkage* menciptakan efek penyaringan sejawat dan mengurangi biaya transaksi karena LKM memiliki informasi yang lebih baik daripada bank (Bansal, 2013). Keberlanjutan program *linkage* dari aspek finansial sangat penting untuk sustainabilitas lembaga keuangan mikro syariah, tetapi pendanaan selalu menjadi masalah yang sulit bagi LKMS. Program *linkage* diharapkan menjadi salah satu solusinya.

Selanjutnya terkait dengan penelitian ini, unsur-unsur *novelty* dalam penelitian ini adalah pengaruh model program *linkage*, kinerja keuangan, dan jangkauan pasar terhadap sustainabilitas LKMS di Jawa Tengah.

2.3.3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) memiliki falsafah untuk mencapai Allah, yaitu memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Aktivitas keuangan mikro syariah menunjukkan diri sebagai lembaga keuangan pada syariah (*sharia compliant finance*) yang merujuk pada prinsip hukum Islam. Zamir (2012) menjelaskan sistem keuangan Islam memiliki prinsip dasar: larangan bunga (*riba*). Riba dalam lembaga keuangan konvensional digunakan pada bunga atas pinjaman dan simpanan, bunga diberikan sebagai pengembalian tetap tanpa pembagian risiko. Transaksi ini tidak akan memberikan keadilan. Sebagaimana Al-Qur'an yang menjelaskan larangan riba pada surah Al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari *Rabb*-nya, lalu terus berhenti

(dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah: 275).”

Ayat di atas menggambarkan kedudukan harta riba dalam Al-Qur'an. Islam mengenal prinsip dalam memperoleh harta sesuai dengan kaidah suka sama suka atau saling rida antara pihak-pihak yang terlibat (*antarodin minkum*) dan kamu tidak dirugikan tidak pula merugikan (*la tazlamu wa la tuzlamu*). Prinsip tersebut melekat, tidak dapat dipisahkan dalam sistem keuangan Islam. Sebagai prinsip, kaidah ini akan berimplikasi pada tatanan sosial ekonomi yang lebih berkeadilan.

Risiko merupakan kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang terjadi dalam investasi yang terikat dengan hasil masa depan dari setiap investasi dan bisnis (Muhammad, 2014) sehingga pembagian risiko ini berimplikasi pada larangan bunga dalam sistem konvensional sebab penyandang dana sebagai investor untuk kreditur-kreditur akan menyediakan modal keuangan dan berbagi risiko bisnis pada saat pengembalian (*return*).

Selanjutnya, uang sebagai modal potensial diperlakukan sebagai modal “potensial”. Hal ini bermakna uang akan menjadi modal aktual saja ketika uang bersama-sama dengan sumber-sumber untuk menempati aktivitas produksi (Zamir, 2013). Islam mengenal nilai waktu dari uang (*time value*) hanya ketika uang beraksi sebagai modal, bukan ketika uang sebagai modal “potensial”. Pelarangan perilaku spekulasi: sistem keuangan Islam mengecam penimbun dan melarang transaksi bercirikan *bai najasy*, *ihtikar*, perjudian, dan *gharar*.

Islam juga membenarkan keharusan kontrak dan melarang menutup informasi. Dalam kontrak jual beli, produk atau jasa yang diperjualbelikan harus pasti atau jelas pada kedua pihak yang terlibat (Parveen, 2000). Ciri ini diniatkan untuk menghapus risiko dari informasi asimetris dan *moral hazard*. *Short selling* tidak dibolehkan: masyarakat muslim tidak diizinkan untuk menjual apa yang bukan menjadi hak milik, oleh karena ini *short selling* tidak dibolehkan.

Islam dengan tegas menempatkan semua relasi ekonomi pada landasan *contractus*. Kontrak merupakan hal vital dalam menentukan standar perilaku yang diharapkan oleh agen ekonomi dan menentukan sifat dari sistem dasar lembaga keuangan mikro syariah. Pendekatan Islam dari sistem LKM syariah berdasarkan pada:

1. Pendekatan pada pengurangan kemiskinan

Zakat dan sedekah merupakan instrumen pemberian derma yang sentral dalam *skim* pengurangan kemiskinan. Zakat adalah alat redistribusi keuangan publik dan alat redistribusi pendapatan, serta sebagai mekanisme untuk mengurangi kemiskinan.

2. Instrumen LKMS

Prinsip larangan riba, *gharar*, *darar*, dan lainnya dalam praktik keuangan Islam bukanlah halangan untuk mengembangkan produk LKMS. Kebutuhan kepatuhan syariat telah membawa ke dalam pengembangan produk-produk LKMS. Produk-produk LKM konvensional menyediakan simpanan, dana, dan pinjaman berbasis

bunga dengan mudah. Gambaran instrumen produk pembiayaan dalam LKMS dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Instrumen Pembiayaan LKMS

Instrumen	Kecocokan	Biaya Modal	Risiko terhadap Peminjam	Risiko terhadap Institusi
<i>Mudaraba</i> dan musyarakah	<i>Fixed assets & working capital</i>	Sangat tinggi	Rendah	Sangat tinggi
Ulasan ahli				
Biaya administrasi pembiayaan dan pemantauan tinggi, mengingat kompleksitas jadwal pembayaran dan kurangnya akuntansi yang tepat; dianggap ideal tetapi tidak populer dalam praktik (Woldie dkk., 2012).				
<i>Ijarah</i>	<i>Fixed assets</i>	Sedang	Tinggi	Sedang
Biaya administrasi pembiayaan dan pemantauan rendah serta jadwal pembayaran sederhana yang memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian berdasarkan preferensi klien; populer di kalangan LKMS; dan potensi adaptasi yang mudah oleh LKMS (Ubaidullah, M., & Khan, T., 2008).				
<i>Murabahah</i>	<i>Fixed assets & working capital</i>	Sedang	Tinggi	Sedang
Biaya administrasi pinjaman dan pemantauan rendah karena jadwal pembayaran sederhana; banyaknya transaksi dalam modal kerja pembiayaan dapat meningkatkan biaya; merupakan produk yang sangat populer; sebagai pengganti pinjaman berbasis riba (Saad, 20012).				
<i>Qard</i>	<i>All-purpose</i>	Sangat rendah	Sangat rendah	Sedang
Berbasis amal, biasanya dikombinasikan dengan kesukarelaan; biaya <i>overhead</i> rendah; populer karena dianggap sebagai bentuk pembiayaan paling murni (Hassan, 2014).				
(Disarikan dari Berbagai Jurnal Penelitian)				

Tabel tersebut menjelaskan tentang karakteristik dari beberapa produk pembiayaan yang ada di LKMS.

Sistem Islam terdiri dari sebuah aturan instrumen untuk memobilisasi pembiayaan dan untuk pengelolaan risiko. Ada tiga instrumen LKMS, yaitu:

- a) Instrumen untuk memobilisasi simpanan (*instruments for mobilization of fund*). Instrumen untuk memobilisasi simpanan terbagi dalam: 1) derma termasuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan pemberian termasuk hibah dan tabungan baru; 2) simpanan, termasuk *wadi'ah*, *qard hasan*,

dan *mudarabah*; 3) hak untuk keadilan diambil dari bentuk *musyarakah* klasik dan saham modern.

- b) Instrumen pembiayaan (*instruments of financing*). Instrumen pembiayaan dibagi menjadi: 1) model pembagian profit, *profit sharing system* (PSS); 2) model yang didasarkan penjualan, seperti *murabahah*; 3) model dasar sewa-menyewa atau *ijarah*; 4) pinjaman kebajikan atau *qard* dengan biaya layanan. Instrumen pembiayaan pada lembaga keuangan syariah berdasarkan kesesuaian, biaya modal, risiko peminjam, dan risiko lembaga keuangan syariah,
- c) Instrumen manajemen risiko (*instruments of risk management*). Instrumen manajemen risiko dan asuransi (*instruments of risk management and insurance*) dalam lembaga keuangan mikro syariah didasarkan pada konsep *kafalah* (*gurantee*) dan *dhamanah* (*collateral*).

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) tahun 2009 telah menyepakati sebuah konsep Arsitektur Baitul Maal wat Tamwil Indonesia (ABI) yang merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong perkembangan bisnis keuangan mikro syariah (Suarsih, 2010). Arsitektur BMT Indonesia ini mencakup lima program. Kelima program tersebut adalah program penguatan struktur BMT nasional; program peningkatan fungsi pengawasan BMT; program peningkatan kualitas manajemen dan operasional BMT; program pengembangan infrastruktur BMT; dan program perlindungan nasabah BMT. Dalam rangka implementasi ABI tersebut maka dirumuskan tujuh pilar Arsitektur BMT di Indonesia, yaitu: 1) penguatan kelembagaan BMT; 2) peningkatan

kualitas tata kelola BMT; 3) peningkatan fungsi pengawasan BMT; 4) peningkatan kualitas manajemen dan operasional BMT; 5) pengembangan infrastruktur BMT; 6) peningkatan perlindungan anggota BMT; serta 7) peningkatan dan pengembangan *social insurance*.

Perkembangan BMT yang kian pesat membutuhkan regulasi dan pengawasan untuk mengatur segala aspek operasional BMT. *Sustainability* operasional BMT dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh tersedianya kerangka regulasi serta pengawasan yang sehat dan efektif. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Bank Indonesia. Alasan utama perlunya regulasi dan pengawasan terhadap BMT adalah informasi yang asimetris di antara faktor yang terlibat dalam operasional BMT. Regulasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa operasional BMT dapat berjalan baik sehingga akan menguntungkan bagi lembaga keuangan maupun nasabah. Regulasi dengan prinsip kehati-hatian diperlukan untuk melindungi sistem keuangan dari kemungkinan terjadinya risiko sistematis.

Mengingat kegiatan BMT berkaitan erat dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan maka setiap pelaku BMT diharapkan tetap menjaga kepercayaan tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini akan terjaga apabila BMT diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya (Faozan, 2014). Atas dasar itu, BMT harus diatur dan diawasi dengan ketat. Pentingnya pengawasan terutama untuk melindungi nasabah dan menghindari *moral hazard* sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara lembaga dan nasabah (Battilana & Dorado,

2010). Pengawasan yang efektif membutuhkan adanya pengawas dengan kompetensi khusus karena aspek-aspek yang diawasi sangat spesifik dan rinci (Barbier, 1987).

Pengawasan terhadap BMT dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan melalui pembentukan atau penunjukan suatu lembaga eksternal yang independen untuk menilai tingkat kesehatan BMT. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Lebih lanjut, kegiatan usaha BMT dapat berjalan berkelanjutan apabila didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang kuat sebagai penunjang pemberdayaan BMT. Dengan dukungan infrastruktur kelembagaan yang memadai terhadap aktivitas keuangan mikro terbukti mampu menumbuhkan industri tersebut secara sehat. Hal ini diperkuat oleh penelitian ADB yang menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya mengubah pola intervensi secara langsung menjadi intervensi secara tidak langsung dengan membangun infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh lembaga keuangan mikro.

Selain itu, BMT sebagai lembaga kepercayaan, memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai integritas dan kompetensi. Sumber daya manusia ini harus mampu mengelola BMT secara transparan dan akuntabel dengan suatu sistem manajemen operasional yang baik. Aspek SDM ini sangat terkait dengan tingkat pendidikan. Bagaimanapun tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang mampu membentuk *skill* kepemimpinan seseorang (Sakti, 2013). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Akhyar

yang menunjukkan bahwa kinerja BMT dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dan pengelola BMT.

Dengan mengacu pada penilaian tingkat kesehatan BMT, dapat diketahui bahwa unsur utama dari sustainabilitas adalah tata kelola serta kualitas manajemen dan operasional yang baik. Tata kelola atau manajemen operasi tersebut diukur dengan suatu indikator penerapan standar operasional dan prosedur (SOP) serta standar operasional manajemen (SOM). Dengan penerapan SOP dan SOM maka operasionalisasi lembaga akan berdasarkan suatu sistem yang baku sehingga terjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Salam pada industri koperasi simpan pinjam (KSP) yang menemukan bahwa semakin baik penerapan SOP dan SOM pada suatu koperasi maka semakin tinggi nilai *rating* KSP tersebut.

BMT juga memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasional agar dapat mencapai salah satu tujuan usaha berupa perolehan keuntungan. BMT sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan kepada nasabah atau mitra, membutuhkan dana yang cukup untuk kegiatan pembiayaan berkelanjutan. Namun, BMT sebagai lembaga keuangan mikro mengalami keterbatasan dalam hal permodalan (Anita & Zulfadin, 2003). Permodalan BMT dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Sumber-sumber permodalan tersebut membentuk faktor permodalan yang memengaruhi sustainabilitas BMT.

2.3.4. Model Program *Linkage* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Program *linkage* merupakan kerja sama yang dilaksanakan bank umum syariah kepada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK). Arsitektur Perbankan Indonesia (API, 2010) mengeluarkan *generic* model program *linkage* yang berisi aturan-aturan pelaksanaan program *linkage* antara bank umum dan lembaga keuangan mikro sehingga penerapan program *linkage* semakin jelas dan terarah. Salah satu aturannya adalah ditetapkannya tiga *skim* dalam melaksanakan program *linkage*, yaitu *executing*, *channeling* dan *joint financing*.

Dalam pola *executing*, bank syariah memberikan pembiayaan kepada LKMS untuk diteruskan kepada UMK. LKMS diberikan kewenangan untuk memutuskan calon mitra yang akan mendapat fasilitas pembiayaan dan sebagai konsekuensinya risiko juga ditanggung oleh pihak BPR, serta untuk pencatatan di bank umum sebagai pembiayaan ke LKMS.

Pada pola *channeling*, bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada UMK sebagai *end user* melalui LKMS yang bertindak sebagai wakil dari bank tersebut (API, 2010). Dalam pola ini, risiko ditanggung oleh bank sehingga LKMS tidak memiliki kewenangan memutus pembiayaan kecuali setelah mendapatkan surat kuasa dari bank umum dan pencatatan di bank umum sebagai pembiayaan ke UMK, sedangkan di LKMS dicatat pada *off balance sheet*. Pada bank syariah, akad yang digunakan antara bank syariah dan LKMS adalah *wakalah*.

Selanjutnya, dalam pola *joint financing*, pembiayaan dilakukan bersama antara bank syariah dan LKMS dalam membiayai UMK, serta risiko ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai porsinya masing-masing sehingga kewenangan memutuskan pembiayaan ada pada bank umum dan LKMS, serta untuk pencatatan di bank umum sebagai pembiayaan ke UMK, sedangkan pencatatan di LKMS pada *off balance sheet*. Akad yang digunakan antara bank syariah dan LKMS adalah musyarakah.

Program *linkage* merupakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagi bank yang memiliki keterbatasan jaringan dan infrastruktur, dengan adanya program *linkage* dapat menjangkau usaha mikro dan kecil yang terbukti tahan terhadap krisis ekonomi. Sedangkan bagi lembaga keuangan mikro yang memiliki dana terbatas akan sangat terbantu dengan adanya program *linkage* ini sehingga LKM dapat menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil. Program ini juga menguntungkan bagi UMKM yang umumnya kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana dari bank umum karena termasuk dalam kategori *unbankable* (Euis Amalia, 2009). Dari uraian tersebut, terlihat keterkaitan satu sama lain yang menguntungkan.

Program *linkage* sejatinya sudah ada sejak 2001, tetapi karena aturan dalam pelaksanaannya masih belum jelas maka program *linkage* belum dapat terealisasi dengan optimal. Kondisi tersebut bertahan hingga pada 2004 Arsitektur Perbankan Indonesia (API, 2010) mengeluarkan *generic model program linkage* yang menjadikan aturan dalam menjalankan program *linkage* lebih jelas dan terarah. Prinsip bank syariah yang berbeda

dengan bank konvensional membuat aturan *linkage* pada *generic model program linkage*-nya pun berbeda, di sini penulis akan memaparkan aturan yang dimuat dalam *generic model program linkage* antara bank syariah dan LKM, di antaranya distribusi pendapatan.

Pada pola *executing*, distribusi pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara bank syariah dan LKM. Sedangkan pada pola *channeling*, bank syariah mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang telah disepakati dengan UMK, serta LKM mendapatkan upah yang besarnya disepakati antara bank syariah dengan LKM. Dalam pola *joint financing*, bank syariah juga mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati dengan UMK dan pembagian pendapatan antara bank syariah dengan LKM sesuai dengan porsi yang telah disepakati.

Program *linkage* adalah program pembiayaan yang bersifat kemitraan. Pembiayaan ini disalurkan lewat perusahaan mitra (Kasmir 2005: 71). *Linkage* tidak dikenal dalam literatur Islam, tetapi dilihat dari maknanya, yaitu mengaitkan dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan dengan cara *sharing resource* maka *linkage* memiliki kedekatan dengan pengertian *ukhuwah* yang artinya persaudaraan (Streets, dkk. 2003). Untuk melihat apakah sistem kerja sama tersebut berjalan dengan baik atau tidak dapat dilihat dari sustainabilitas LKMS.

Keberlangsungan program *linkage* memiliki kode etik yang harus dipatuhi para pihak yang terlibat (Sutopo, 2005). Kode etik tersebut meliputi: (1) BUS/UUS yang melakukan kerja sama program *linkage* dengan BPRS, tidak diperbolehkan mengambil alih pembiayaan terhadap

nasabah BPRS yang sedang dibiayai melalui program *linkage* dan atau masih menjadi nasabah BPRS. (2) Bagi nasabah BPRS yang telah naik kelas (dari nasabah mikro menjadi kecil) dan memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar, tetapi BPRS tidak mampu membiayai karena kendala BMPK maka BUS/UUS dapat membiayai nasabah BPRS dimaksud. (3) BUS/UUS yang melakukan program *linkage* dengan BPRS, tidak diperbolehkan mengambil sumber daya manusia BPRS. BUS/UUS dan BPRS harus transparan dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang terkait dengan program *linkage* sejauh tidak melanggar ketentuan yang berlaku (seperti laporan keuangan struktur pendanaan dan *company profile*). (4) Bagi BPRS, satu jaminan hanya dijamin kepada satu *shohibul maal* mitra pembiayaan (BUS/UUS). (5) BUS/UUS tidak diperkenankan untuk memanfaatkan data nasabah pembiayaan dan BPRS untuk kepentingan di luar program *linkage*. (6) BUS/UUS dan BPRS yang melaksanakan program *linkage* dengan pola *joint financing* dan *channeling*, tidak diperkenankan membebani nasabah pembiayaan dengan margin/nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari harga pasar untuk sektor usaha UMK yang dibiayai. (7) BUS/UUS yang melakukan program *linkage* dengan BPRS, tidak diperkenankan meminta laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. (8) BPRS yang mengikuti program *linkage* harus memelihara tingkat kesehatannya. (9) Setiap pelanggaran kode etik di atas oleh BUS/UUS/BPRS dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh pihak yang merasa dirugikan.

Lebih lanjut, bank umum tidak harus selalu menjalankan gagasan atau usulan mengenai produk baru perbankan dari pemerintah maupun Bank Indonesia (API, 2010). Bank umum harus mempelajari dulu gagasan tersebut dan mempertimbangkan keuntungan serta kerugian yang mungkin timbul akibat program tersebut.

2.3.5. *Road Map Sustainability LKMS*

LKMS merupakan institusi *profit motive* dengan sifat *social motive* yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengabaikan peran LKMS sebagai lembaga intermediasi keuangan. LKMS juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar kelebihan penghasilan dapat ditabung sebagai investasi jangka panjang (Baskara, 2013). Secara historis, perkoperasian dan keuangan mikro sebagai cikal bakal LKMS sudah lama ada dalam bentuk beragam di berbagai negara. Namun, keuangan mikro modern monumennya sering disandarkan dengan peristiwa Grameen Bank tahun 1983 yang dirintis oleh Dr. Muhammad Yunus di Bangladesh. Eksperimen yang dilakukan adalah menyalurkan pinjaman tanpa bunga oleh kaum perempuan di desa miskin, Jobra Bangladesh.

Khandker (1995) mempraktikkan dan menguji lembaga keuangan mikro modern dengan manajemen risiko. Layanan diberikan ke rumah-rumah orang miskin sebanyak hampir 7 juta wanita keluarga miskin. Sejak itu LKM yang diaplikasikan oleh Grameen Bank menjadi tren untuk pengentasan kemiskinan. Berkat ide ini, hadiah Nobel perdamaian diperuntukkan bagi Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya di

Bangladesh. Grameen Bank memberikan pelajaran akan pentingnya institusi keuangan mikro bagi kaum miskin. Program kredit mikro yang memberikan akses kredit yang lebih luas kepada kaum miskin, dianggap sebagai program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan, mengingat selama ini masyarakat miskin mendapat banyak halangan untuk mengakses sistem atau lembaga perbankan lainnya.

Grameen Bank adalah salah satu contoh konsep *microfinance* konvensional yang berhasil dalam mengembangkan *social capital* sebagai pengganti agunan (*collateral*) serta dianggap telah mampu memecahkan permasalahan biaya transaksi (*transaction cost*) akibat tingginya *asymmetric information* (informasi asimetris) di sektor informal. Meskipun demikian, Grameen Bank masih terkesan minim memperhatikan prospek dan kemampuan finansial klien. Hal ini disebabkan karena penentuan biaya modal dilakukan lebih dahulu (*predetermined interest rate*) dengan hanya mempertimbangkan biaya modal/*cost of fund* (*internal side*) serta kurang memperhatikan kemampuan finansial dari prospek usaha klien (*external side*). Hal tersebut mengurangi insentif pihak yang meminjamkan (*lender*) untuk melibatkan diri secara langsung dalam pengembangan usaha klien karena pengembalian *return* riba yang sifatnya tetap.

Ekonomi syariah sebagai alternatif solusi dalam merenovasi program *microfinance*, didasarkan atas konsep bagi hasil (*profit sharing*) yang mendorong keterlibatan pihak *lender* atas prospek dan kemampuan finansial klien. Namun, keberlangsungan konsep syariah tidak luput dari pemahaman yang utuh dan pengaplikasian yang komprehensif atas hukum-

hukum religius (moral dan etika). Hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*) yang dibangun atas dasar perspektif Islam dalam ekonomi syariah, mengarahkan masing-masing pihak untuk saling berperan dalam menciptakan keadaan yang lebih baik melalui upaya maksimal memperkecil risiko kegagalan usaha dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian.

Selain itu, sistem keuangan syariah diyakini sangat memperhatikan asas kemaslahatan bagi orang banyak sehingga pembiayaan yang ditopang oleh lembaga keuangan mikro syariah harus menghindari kemungkinan hal-hal yang merusak moral masyarakat dan lingkungan, serta harus memenuhi kriteria halal menurut syariat Islam. Setiap transaksi yang dibiayai oleh lembaga keuangan mikro syariah juga harus berorientasi langsung terhadap sektor riil. Dari hal tersebut sangat jelas terlihat bahwa dalam sistem keuangan syariah terjadi sinkronisasi antara perkembangan lembaga keuangan dan produktivitas di sektor riil.

BMT sebagai salah satu institusi *microfinance* syariah di Indonesia, saat ini mengalami tren perkembangan yang semakin baik bila dilihat dari perkembangan aset dan penyaluran. Strategi pengelolaan keuangan BMT harus terfokus pada penyelenggaraan *skim* pembiayaan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan klien dan kondisi *market* di pasar keuangan informal. Minimnya aset jaminan dari sebagian besar klien, sesungguhnya merupakan keterbukaan risiko yang harus diantisipasi oleh BMT. Oleh karena itu dalam setiap pengajuan dan persetujuan pembiayaan harus dilewati dengan tahap-tahap prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, BMT harus banyak melakukan penggalan informasi yang relevan dengan keadaan klien dan prospek usaha sehingga mendukung informasi atas kemampuan finansialnya. Dengan demikian keberlanjutan BMT dapat terjaga dan proses penagihan bagi hasil tidak mengganggu aktivitas usaha klien.

Pembiayaan *microfinance* syariah yang lebih variatif dibandingkan dengan *microfinance* konvensional, sesungguhnya dapat dijadikan basis kekuatan dalam mendiversifikasi risiko portofolio aset BMT (Siregar, 2001). Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan penyesuaian risiko dan *return*, serta pembenahan piranti yang tepat dalam proses *screening* dan *monitoring* klien yang prospektif. Selain itu, kemampuan pengelola BMT untuk memahami kesesuaian jenis pembiayaan dan karakteristik usaha klien, juga harus ditingkatkan untuk menjamin konsistensi keberlangsungan pembiayaan dan performa institusi secara umum.

Keberlangsungan dan kemajuan BMT tentunya tidak terlepas dari pengorganisasian yang profesional serta pengimplementasian strategi yang komprehensif dalam memosisikan BMT sebagai salah satu institusi intermediasi keuangan mikro yang praktis dan diminati oleh masyarakat. Hal ini merupakan stimulasi dalam pengembangan BMT ke depan agar konsisten dalam merealisasikan pembiayaan dan pendanaan bagi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah. Sehingga sustainabilitas BMT dapat melahirkan citra positif masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengembangkan UMKM.

Secara umum, para ahli mengkaji sustainabilitas dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kelembagaan. Kajian tersebut salah satunya tampak dari kajian Murdoch (2006) yang mengutarakan dua pendekatan utama gerakan keuangan mikro (*microfinance movement*) di dunia dalam menjangkau kaum miskin melalui pemberian akses terhadap layanan keuangan, yaitu *institutionist approach* dan *welfarist approach*.

Pendekatan kelembagaan (*institutionist approach*) untuk sustainabilitas berfokus pada penciptaan lembaga keuangan untuk menjangkau nasabah yang tak terlayani oleh sistem keuangan formal (Murdoch, 2006). Penekanan diberikan pada pencapaian ketercukupan keuangan (*financial self sufficiency*); lebar jangkauan (*breadth of outreach*) yang artinya jumlah nasabah terlayani; serta dampaknya secara positif terhadap nasabah (*positive client impact*).

Pendekatan kesejahteraan (*welfarist approach*) lebih menekankan pada kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) yang berarti level masyarakat termiskin yang dilayani. Pendekatan ini tidak selalu melihat sisi kelembagaan, tetapi penekanan pada dampak (*impact*) dari layanan keuangan terhadap masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*economically active poor*). Robinson mencatat bahwa kedua pendekatan tersebut pada dasarnya mempunyai peran yang sama dalam pengembangan keuangan mikro institusional.

Lebih lanjut, penyelenggaraan jasa keuangan mikro yang *sustainable* dapat dilaksanakan oleh institusi komersial yang memberikan

layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi. Aspek terpentingnya adalah menyediakan layanan kredit dan tabungan secara menguntungkan serta dapat menjangkau nasabah dalam skala besar (Robinson, 2001). Hal ini dimungkinkan apabila BMT telah diregulasi dan mandiri.

Teori sustainabilitas BMT yang dikembangkan selama ini menyatakan bahwa sustainabilitas BMT adalah kemampuan BMT dalam menjalankan sistem yang telah dibangun agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Begitu pun BMT yang memiliki kemampuan sebagai penyedia keuangan mikro untuk menutupi semua biaya dalam mencapai *financial sustainability*. Sistem tersebut dalam konsep sustainabilitas BMT syariah diukur berdasarkan pada *syariah compliance finance* yang merujuk pada pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya modal dan biaya pendanaan. Pendapatan dan biaya modal yang diperbolehkan dalam LKM syariah, bukan dari transaksi *ribawi*, *tadlis*, perilaku spekulasi, perjudian, dan *gharar*. *Sustainability* BMT juga dimaknai sebagai kemampuan BMT untuk bertahan secara terus-menerus dalam menutupi biaya operasional dengan menggunakan pendapatan usaha yang dihasilkan dari aktivitas bisnis (Woller dkk., 1991).

Lebih lanjut, perkembangan BMT yang kian pesat membutuhkan regulasi dan pengawasan untuk mengatur segala aspek operasional BMT. *Sustainability* operasional BMT dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh tersedianya kerangka regulasi dan pengawasan yang sehat dan efektif. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Bank Indonesia (Bank Indonesia,

2001). Alasan utama perlunya regulasi dan pengawasan terhadap BMT adalah informasi yang asimetris di antara faktor yang terlibat dalam operasional BMT.

Regulasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa operasional BMT dapat berjalan baik sehingga akan menguntungkan bagi lembaga keuangan maupun nasabah. Regulasi dengan prinsip kehati-hatian diperlukan untuk melindungi sistem keuangan dari kemungkinan terjadinya risiko sistematis.

Pengawasan menjadi penting untuk melindungi nasabah dan menghindari *moral hazard* sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara lembaga dan nasabah. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif membutuhkan adanya pengawas dengan kompetensi khusus karena aspek-aspek yang diawasi sangat spesifik dan rinci.

Pengawasan terhadap BMT dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan melalui pembentukan atau penunjukan suatu lembaga eksternal yang independen untuk menilai tingkat kesehatan BMT. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain itu, kegiatan usaha BMT dapat berjalan berkelanjutan apabila didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang kuat sebagai penunjang pemberdayaan BMT. Dukungan infrastruktur kelembagaan yang memadai terhadap aktivitas keuangan mikro, terbukti mampu menumbuhkan industri tersebut secara sehat. Hal ini diperkuat oleh penelitian ADB yang menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya mengubah pola intervensi

secara langsung menjadi intervensi secara tidak langsung dengan membangun infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh lembaga keuangan mikro.

2.3.6. Indikator *Sustainability* Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Aktivitas utama BMT adalah memberikan layanan pembiayaan dan tabungan yang menguntungkan. Semakin besar kemampuan BMT menjangkau nasabah, semakin besar pula skala ekonominya sehingga biaya operasionalnya bisa semakin efisien. BMT dengan kemampuan jangkauan pasar yang baik, ditunjukkan dengan kemudahan akses penabung dan peminjam, cenderung akan berkinerja baik pula. Dapat dikatakan bahwa semakin luas jangkauan pasar maka semakin banyak jumlah nasabah atau anggota yang dapat dilayani. Hal ini juga berarti semakin besar mobilisasi dana yang dapat dihimpun serta jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Faktor jangkauan pasar dalam sisi teoretis dan praktis merupakan syarat utama dalam membentuk BMT yang *sustainable*.

Lebih lanjut, *sustainability* seharusnya dilaporkan. *Sustainability reporting* merupakan praktik pengukuran, pengungkapan, serta upaya akuntabilitas dari kinerja LKMS dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal (Elkington, 1997). Selanjutnya, faktor-faktor *sustainability* dilihat dari profitabilitas dan BOPO.

2.3.6.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu LKMS untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat dijadikan acuan oleh investor atau pemilik perusahaan untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola LKMS. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Bowman dan Haire, 1976).

Hadad dkk. (2007:69) menyatakan profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu LKMS. Sedangkan Riyadi (2006:155) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki LKMS pada periode tertentu.

Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA). *Return on assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Dalam analisis *return on assets* (ROA) terdapat beberapa variabel yang memengaruhinya, yaitu kecukupan modal suatu bank, efisiensi, likuiditas, klasifikasi LKMS maupun pangsa pasar dana pihak ketiga. Dari ketiga variabel tersebut akan membentuk suatu dasar di dalam analisis yang membandingkan ketiganya berdasarkan intensitas pengaruhnya terhadap ROA. Hasil analisis akan menunjukkan dominasi antara suatu variabel

dibandingkan variabel lainnya sehingga dapat mempermudah suatu LKMS dalam memfokuskan pengelolaan atas ROA.

LKMS-LKMS yang memiliki profitabilitas tinggi akan memiliki dorongan lebih kuat untuk menyebarluaskan informasi perusahaan. Sedangkan LKMS dengan kinerja buruk cenderung menghindari melakukan pengungkapan melebihi yang diwajibkan (pengungkapan sukarela) karena mereka berusaha untuk menyembunyikan *badnews*.

2.3.6.2 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Analisis rasio efisiensi operasional menurut Sebaktiningrum & Khasanah (2006), dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan biaya operasional. Biaya operasional adalah semua jenis biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha bank, seperti biaya bunga, biaya valuta asing lainnya, biaya tenaga kerja, penyusutan, dan biaya lainnya (premi asuransi/jaminan kredit, sewa gedung/kantor dan alat-alat lainnya, maupun biaya pemeliharaan gedung/kantor). Di samping itu, juga menggunakan pendapatan operasional, yaitu semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Pendapatan operasional bank tersebut antara lain: hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valuta asing lainnya, dan pendapatan lainnya (dividen yang diterima dari saham yang dimiliki).

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasi dengan pendapatan operasi. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Sebaktiningrum

& Khasanah, 2006). Mengingat kegiatan utama LKMS pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misal dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional LKMS didasari oleh biaya operasional.

BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Prasanjaya & Ramantha (2013) menyatakan BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di LKMS.

2.3.7. Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap LKMS di mana pun karena kinerja merupakan cerminan kemampuan LKMS dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya (Kusumawardani, 2012). Selain itu, tujuan pokok penilaian kinerja adalah memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Kinerja keuangan LKMS adalah sesuatu yang sulit diukur secara eksak dan lebih menyerupai suatu seni karena di dalamnya terkandung aspek subjektif dan objektif dari si penilai. Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa cara yang harus ditempuh agar analisis kinerja keuangan yang dilakukan dapat menjadi suatu tolok ukur yang dapat diandalkan dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Secara khusus para pemimpin strategis memilih sasaran keuangan (*financial goals*) yang ingin mereka capai, antara lain: sasaran pertumbuhan (*growth*), keuntungan (*profitability*), dan *total shareholder return* (TSR). Salah satu alasan digunakannya kinerja keuangan adalah karena ukuran kinerja keuangan dianggap objektif untuk mengukur ketercapaian sasaran.

Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran dan merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya, untuk mengukur variabel kinerja keuangan digunakan dimensi rasio permodalan, rasio rentabilitas, dan rasio esensi yang diukur melalui indikator *capital adequacy ratio* (CAR), *debt to equity ratio* (DER), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

Lebih lanjut, kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Copestake, 2007).

Sedangkan kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pasal 33 mengenai Pengukuran Kinerja KSP/USP Koperasi sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 28, menyebutkan bahwa analisis rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan pada koperasi meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas (Musyarofatun, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, di antara kelima analisis rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pada perusahaan, tiga di antaranya dapat diterapkan dalam menganalisis kinerja keuangan koperasi.

2.3.8. Manfaat Analisis Rasio Keuangan dalam LKMS

Menurut Kuswadi (2008) manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan adalah: 1) analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan; 2) analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan membuat perencanaan; 3) analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dari perspektif

keuangan; 4) analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi, dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman; 5) analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

2.3.9. Kinerja Nonkeuangan LKMS

Kaplan (1996) mengatakan bahwa pengukuran kinerja finansial di dalam perusahaan akan mendorong perusahaan untuk terlalu berpegang pada pencapaian dan pertahanan keuntungan finansial jangka pendek. Hal tersebut menyebabkan perusahaan lebih banyak menanamkan investasi jangka pendek dan kurang memperhatikan investasi yang bisa menciptakan *value* jangka panjang, seperti *intangible* dan *intellectual assets* yang bisa menghasilkan pertumbuhan pada masa yang akan datang.

Aspek-aspek faktor nonkeuangan terdiri dari faktor-faktor eksternal dan internal. Dari aspek-aspek dalam kedua faktor tersebut, yang ditentukan memiliki pengaruh terhadap sustainabilitas BMT adalah aspek regulasi, pengawasan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan permodalan. Aspek-aspek tersebut dapat dijadikan sebagai tuntunan untuk meningkatkan kinerja BMT menuju sustainabilitas lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Temuan ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pengembangan BMT sebagai sebuah sistem intermediasi keuangan berbasis syariah di level mikro. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi BMT, baik yang bersifat internal maupun yang eksternal, perlu segera diselesaikan agar sustainabilitas BMT tetap terjaga.

a) Aspek regulasi

Aspek regulasi merupakan faktor yang penting karena operasional BMT akan dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa aspek regulasi yang dibentuk oleh indikator kecukupan peraturan dan penerapan prinsip kehati-hatian serta penerapan standar keuangan, terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT. Temuan ini didukung pula oleh penelitian Staschen yang mengungkapkan bahwa terdapat dua instrumen regulasi, yaitu perlindungan dan pencegahan. Instrumen perlindungan dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi nasabah dan lembaga keuangan mikro dari kemungkinan bangkrut. Sedangkan instrumen pencegahan dimaksudkan untuk mencegah agar lembaga keuangan mikro tidak mengalami kebangkrutan (Staschen, 1994).

Regulasi merupakan salah satu infrastruktur yang sangat memengaruhi kinerja BMT. Regulasi bukan hanya merupakan faktor eksternal bagi BMT melainkan juga untuk semua lembaga dalam industri LKM termasuk BMT. Kedua instrumen tersebut hanya dapat dijalankan secara optimal apabila didukung oleh penyampaian laporan secara teratur, pembatasan lingkup usaha, penetapan tingkat kesehatan, rasio kecukupan modal yang memadai, dan sebagainya. Ketentuan Bank Indonesia tentang BPR menyatakan bahwa regulasi yang efektif tercermin dari kecukupan dan ketepatan penerapan peraturan-

peraturan, serta seberapa jauh suatu lembaga menerapkan kehati-hatian dalam kegiatan usahanya (Bank Indonesia, 2006).

Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah penerapan instrumen tersebut harus sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan sehingga regulasi yang ditetapkan bisa efektif. Dalam hal ini, BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah harus membuat peraturan-peraturan pelaksanaan sendiri dan prosedur operasi yang baku. BMT justru harus lebih ketat dalam mengikuti dan mematuhi prinsip tersebut karena dalam hal pengelolaan kegiatan usaha terdapat kesamaan risiko dengan perbankan. Di samping itu, regulasi diperlukan untuk melindungi para penabung kecil untuk menghindari ketidakmampuan BMT membayar simpanan nasabah bila terjadi penarikan dana besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan nasabah.

b) Aspek pengawasan

Pengawasan yang efektif merupakan salah satu alat untuk mendeteksi permasalahan secara dini (*early warning system*). Indikator-indikator yang membentuk pengawasan yang efektif dalam penelitian ini adalah sistem pelaporan, efektivitas pelaksanaan laporan, dan pengawasan eksternal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa aspek pengawasan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT.

Lembaga BMT membutuhkan adanya pengawas dengan kompetensi khusus karena aspek-aspek yang diawasi sangat spesifik dan rinci. Hal ini sangat penting agar BMT dapat mematuhi aturan-aturan syariah yang berlaku. Pengawasan yang efektif merupakan alat kontrol bagi BMT untuk beroperasi secara sehat sehingga dapat berkembang secara wajar serta memperoleh kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, salah satu hal yang paling penting terkait dengan pengawasan DPS adalah sumber daya manusia (SDM) di tingkat Dewan Pengawas Syariah.

Belum adanya standar pembinaan dan pengawasan yang baku serta belum dimilikinya lembaga pengawas di beberapa BMT, secara tidak langsung telah ikut menghambat perkembangan BMT. Hal tersebut mengingat peran utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan peraturannya sehingga menimbulkan keresahan masyarakat ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan yang diawasi. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN. Oleh karena itu setiap BMT harus memiliki DPS.

c) Aspek infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor yang penting bagi lembaga BMT. Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian

ini, diketahui bahwa aspek infrastruktur dibentuk oleh indikator-indikator yang terdiri dari peran asosiasi, lembaga *rating*, jasa audit, lembaga induk, dan lembaga penjamin simpanan, serta terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT.

Keberadaan asosiasi berperan dalam pelatihan, konsultasi, serta upaya akses dana dari lembaga keuangan kepada anggota. Sedangkan, jasa audit dan *rating* diperlukan sebagai penilai kinerja keuangan independen agar lebih objektif dan transparan. Keberadaan lembaga *rating* dan jasa audit independen sangat diperlukan, meskipun masih perlu sosialisasi lebih lanjut untuk membentuk persepsi yang benar mengenai pelaksanaan audit dan *rating*.

Selanjutnya, keberadaan lembaga induk dan lembaga penjamin simpanan (LPS) sebagai lembaga pendukung sangat diperlukan bagi nasabah BMT. Keberadaan LPS pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung penguatan sumber dana BMT. Namun, untuk saat ini masih belum dimungkinkan adanya lembaga LPS nasabah BMT karena belum terpenuhinya prasyarat terbentuknya industri BMT yang terstandardisasi dan heterogen. Oleh karena itu, untuk keperluan pengembangan kelembagaan agar menjadi lembaga keuangan yang baik dan sehat, perlu didukung dengan tersedianya infrastruktur kelembagaan yang memadai. Minimal kelembagaan tersebut mencakup adanya jaringan yang kuat, baik antar-BMT maupun antara BMT dengan lembaga keuangan lain.

d) Aspek kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BMT dapat dilihat dari tingkat pendidikan formal pengelola dan frekuensi pelatihan yang terkait dengan tugas serta pengalaman pengelola. Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa aspek sumber daya manusia terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainabilitas BMT. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Akhyar yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan para pengurus BMT merupakan faktor nyata yang menentukan kemampuan bertahan (*sustainability*) BMT secara keseluruhan (Adnan dkk., 2003).

Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai di kalangan pengurus juga merupakan salah satu faktor yang menjadi kunci keberhasilan Pusat Inkubasi Bina Usaha Kecil (Pinbuk) dalam pengembangan BMT. Oleh karena itu, setiap pendirian BMT harus didampingi oleh seorang sarjana yang telah mengikuti pelatihan *community leadership development*.

Bila dilihat dari segi rata-rata pengalaman pengurus dan manajemen BMT, data menunjukkan bahwa BMT pada umumnya dikelola oleh SDM yang telah berpengalaman. Dari *rekonfirmasi* terhadap responden disimpulkan bahwa setiap BMT yang memiliki kekhasan dan pengelola yang berhasil, pada umumnya mampu memahami karakteristik masing-masing BMT serta mampu beradaptasi dengan anggotanya.

Hal ini tercermin dari keikutsertaan pengelola BMT dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaganya sendiri ataupun oleh pihak asosiasi atau instansi terkait. Dukungan terhadap pengembangan SDM relatif cukup mendapat porsi yang besar dalam program peningkatan kapasitas SDM. Pelatihan-pelatihan tersebut beragam, mulai dari pelatihan mental/spiritual yang diarahkan untuk membangun pemikiran yang kuat dan kreatif, hingga sesi-sesi yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan manajemen profesional.

Lebih lanjut, variabel sumber daya manusia (SDM) dibentuk oleh indikator SDM berdasarkan pendidikan, SDM berdasarkan pengalaman, dan SDM berdasarkan pelatihan. Variabel ini merupakan variabel yang dikembangkan dari hasil penelitian Salam (2008) tentang koperasi simpan pinjam (KSP). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa KSP dapat *sustainable* melalui peningkatan kapasitas lembaga KSP dengan perbaikan kondisi internal, di antaranya sumber daya manusia.

e) Aspek manajemen

Variabel manajemen dibentuk oleh indikator manajemen operasional berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP) serta manajemen operasional berdasarkan standar operasional dan manajemen (SOM). Variabel ini mengadopsi teori dari Salam (2008) yang mengemukakan bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) dapat menjadi LKM yang *sustainable* melalui peningkatan kapasitas lembaga

KSP dengan perbaikan kondisi internal, di antaranya SOP dan SOM. (Salam, 2008).

f) Aspek permodalan

Variabel yang memiliki hubungan dengan aspek permodalan adalah tabungan nasabah dan pinjaman yang diterima. Tabungan nasabah dibentuk oleh indikator tabungan nasabah berdasarkan total tabungan serta tabungan nasabah berdasarkan jumlah rekening. Pinjaman yang diterima dibentuk oleh indikator pinjaman yang diterima berdasarkan pinjaman komersial serta pinjaman yang diterima berdasarkan jumlah kreditur. Variabel ini merupakan variabel yang mengadopsi teori yang dikemukakan oleh Morshed tentang sumber-sumber permodalan yang membentuk faktor permodalan dan memengaruhi sustainabilitas Grameen Bank sebagai pelaku keuangan mikro (Lamiya, 2002).

g) Aspek jangkauan pasar

Variabel jangkauan pasar dibentuk oleh indikator jangkauan pasar berdasarkan jumlah *account officer*, jangkauan pasar berdasarkan jumlah pembiayaan, dan jangkauan pasar berdasarkan jumlah nasabah pembiayaan. Variabel ini dikembangkan dari hasil penelitian Martowijoyo yang menyatakan bahwa di antara faktor yang memengaruhi kinerja dan sustainabilitas lembaga keuangan pedesaan (LKP) adalah faktor jangkauan pasar (Martowijoyo, 2001).

h) Aspek inovasi produk

Variabel inovasi produk dibentuk oleh indikator produk yang ditawarkan untuk usaha mikro. Variabel ini dikembangkan dari hasil penelitian Akhyar yang menyatakan bahwa di antara faktor yang memengaruhi kinerja BMT adalah produk yang ditawarkan (Adnan dkk., 2003).

2.4. Kerangka Pemikiran

Kegiatan perekonomian di Indonesia, terutama sektor keuangan, sangat didukung oleh lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas ekonomi masyarakat modern.

Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, tetapi selama ini sektor ini sulit berkembang. Pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah, nyaris tidak tersentuh (*undeserved*) dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, terutama lembaga keuangan konvensional. Hal ini menyebabkan laju perkembangannya terhambat. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada perbankan membuat mereka tergantung pada sumber-sumber informal dan lembaga keuangan mikro (LKM).

Program *linkage* adalah program yang menghubungkan bank dengan pelaku usaha mikro kecil melalui lembaga keuangan mikro. Kelemahan dalam program *linkage* adalah pada aspek peraturan yang tersebar dalam

berbagai aturan, dan khusus bagi lembaga keuangan syariah terdapat pula kendala berkaitan dengan kesesuaian dengan ketentuan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual ini diperoleh dari inventarisasi serta analisis kebijakan program *linkage* bagi lembaga keuangan syariah dalam hukum positif Indonesia. Kebijakan terkait program *linkage* diklasifikasi dalam dua kelompok, yaitu kebijakan substansi dan prosedural. Aturan inilah yang menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam rangka pemberdayaan usaha kecil mikro di Indonesia.

Aturan program *linkage* harus berkeadilan. Hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat terhadap rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik. Dengan demikian, hukum kemitraan dalam program *linkage* harus menjunjung aspek keadilan, yaitu BMT sebagai pelaksana program yang berhadapan dengan nasabah langsung, harus mempunyai informasi dan kedudukan yang seimbang dengan lembaga keuangan pemberi program *linkage*.

Lebih lanjut, BMT dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktivitasnya dapat berlanjut (*sustainable*) dan kemampuan melayani nasabah semakin meningkat (*outreach*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh arah kebijakan dan pengambilan program *linkage* oleh BMT terhadap faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal sustainabilitas BMT.

Secara umum para ahli mengkaji sustainabilitas melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kelembagaan.

Pendekatan kelembagaan, fokus pada penciptaan lembaga keuangan untuk menjangkau nasabah yang tak terlayani oleh sistem keuangan formal. Penekanan terhadap kelembagaan terdapat pada pencapaian kecukupan keuangan (*financial self sufficiency*), lebar jangkauan terhadap jumlah nasabah terlayani (*breadth of outreach*), serta dampaknya secara positif terhadap nasabah (*positive client impact*).

Sedangkan pendekatan kesejahteraan lebih menekankan pada kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) yang berarti level masyarakat termiskin yang dilayani. Pendekatan ini tidak selalu melihat sisi kelembagaan, tetapi lebih memberikan penekanan pada dampak (*impact*) dari layanan keuangan terhadap masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*economically active poor*). Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya mempunyai peran yang sama dalam pengembangan keuangan mikro institusional.

Kunci bagi keberlanjutan (*sustainability*) dari sebuah LKM adalah keharusan dari adanya tujuan komersial (*profit making objective*), yakni kemampuan menghasilkan laba, di samping adanya misi sosial yang diemban (*social mission*). Penyelenggaraan jasa keuangan mikro yang *sustainable* dapat dilaksanakan oleh institusi komersial yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi. Aspek terpentingnya adalah menyediakan layanan kredit dan tabungan secara menguntungkan serta dapat menjangkau nasabah dalam skala besar.

Selanjutnya, penelitian ini mengukur faktor-faktor eksternal yang meliputi aspek regulasi, aspek pengawasan, dan aspek infrastruktur. Selain

itu diukur juga faktor-faktor internal meliputi aspek SDM, aspek manajemen, aspek permodalan, aspek jangkauan pasar, aspek inovasi produk, aspek pertumbuhan total aset, serta aspek *financing performance* dan aspek profitabilitas BMT.

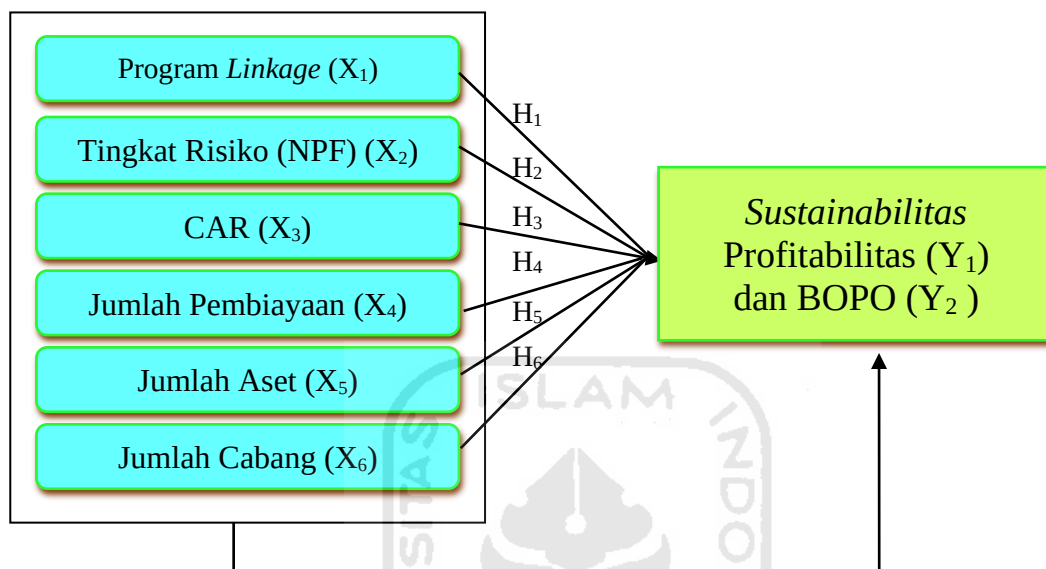
Kreativitas jangkauan layanan pada anggota atau nasabah dengan biaya transaksi operasional lebih rendah (efisiensi) akan menentukan efisiensi, kinerja dan jangkauan LKMS untuk menyediakan layanan keuangan kepada sejumlah besar anggota/nasabah. Selain itu, produktivitas staf LKM juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena baik produktivitas staf maupun efisiensi operasional, akan memengaruhi sustainabilitas lembaga keuangan mikro. Peningkatan produktivitas staf dapat dilakukan dengan pemberian insentif. Insentif merupakan alat paling mujarab untuk memotivasi pegawai agar dapat selaras dengan sasaran yang ditetapkan organisasi. Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Efisiensi kinerja lembaga dapat dinyatakan dengan ukuran rasio performa LKM, yakni faktor pendapatan, faktor efisiensi biaya, dan faktor pertumbuhan yang berpengaruh positif terhadap LKM. Faktor-faktor penentu sosial ekonomi dari empat tahap tersebut merupakan proses penentu pinjaman dari lembaga keuangan mikro di Yordania. Lebih lanjut, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang mencerminkan kemampuan pembayaran adalah faktor utama pemberian kredit di lembaga keuangan mikro, seperti faktor religiositas, kepercayaan, tanggung jawab sosial, ketersediaan keuangan mikro lokal, biaya *aprikasi*, tingkat pengetahuan tentang penyedia

keuangan mikro. Faktor-faktor tersebut secara signifikan memengaruhi proses pinjaman dari LKM.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini ada pada Gambar 2.2

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian



2.5. Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Program *Linkage* terhadap *Sustainability* Usaha LKMS

Adanya program *linkage* akan memberikan *sustainability* usaha LKMS. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, program *linkage* yang dijalankan oleh LKMS terdiri atas pola *executing* dan *channeling*. Dalam pola *executing*, pinjaman/pembiayaan diberikan dari LPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*). Lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir serta menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir. Adapun dalam pola *channeling*, pinjaman/pembiayaan diberikan dari LPDB-KUMKM kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*). Lembaga

tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengambilan program *linkage* oleh LKMS terhadap sustainabilitas LKMS. Secara umum para ahli mengkaji sustainabilitas melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan berfokus pada penciptaan lembaga keuangan untuk menjangkau nasabah yang tak terlayani oleh sistem keuangan formal. Penekanan terhadap kelembagaan terdapat pada pencapaian kecukupan keuangan (*financial self sufficiency*), lebar jangkauan terhadap jumlah nasabah terlayani (*breadth of outreach*), serta dampaknya secara positif terhadap nasabah (*positive client impact*).

Pendekatan kesejahteraan lebih menekankan pada kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) yang berarti level masyarakat termiskin yang dilayani. Pendekatan ini tidak selalu melihat sisi kelembagaan, tetapi memberikan penekanan pada dampak (*impact*) dari layanan keuangan terhadap masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*economically active poor*). Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya mempunyai peran yang sama dalam pengembangan keuangan mikro institusional.

Kunci bagi keberlanjutan (*sustainability*) dari sebuah LKM adalah keharusan dari adanya tujuan komersial (*profit making objective*), yakni kemampuan menghasilkan laba, di samping adanya misi sosial yang diemban (*social mission*). Penyelenggaraan jasa keuangan mikro yang *sustainable* dapat dilaksanakan oleh institusi komersial yang memberikan

layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi. Aspek terpentingnya adalah menyediakan layanan kredit dan tabungan secara menguntungkan dan dapat menjangkau nasabah dalam skala besar. Hal ini dapat diambil hipotesis

H₁: Program *linkage* berpengaruh positif signifikan terhadap sustainabilitas usaha LKMS.

2.5.2. Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Sustainabilitas Usaha LKMS*

Non-performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh BMT. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Antonio (2001) mengemukakan bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan turunnya tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat.

Tahun 2011, NPF BMT mengalami sedikit kenaikan, yaitu sebesar 24,24%. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah. Kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan BMT lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena BMT harus

membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan modal, tetapi peningkatan modal ini tidak dengan peningkatan laba bersih. Hal ini berakibat hipotesis yang diajukan berupa

H₂: NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap sustainabilitas usaha LKMS.

2.5.3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Sustainabilitas Usaha LKMS*

Profitabilitas, pendapatan, dan biaya operasional merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur sustainabilitas suatu BMT (Sofyan, 2002). Menurut Karya dan Rakhman, tingkat *return on assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas BMT karena OJK sebagai pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu LKMS yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu BMT, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai BMT dan semakin baik posisi BMT tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya 2009: 118). Di sisi lain, dipilihnya BMT dalam penelitian ini karena BMT sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian sektor mikro riil.

Oktavia (2009) menyatakan pengujian secara serentak menunjukkan bahwa antara seluruh variabel independen (CAR, nilai tukar rupiah, dan inflasi) berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan (ROA). Variabel CAR dapat mempengaruhi tingkat sustainabilitas usaha. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan

BMT tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka BMT tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi keberlangsungan usaha. Tingginya rasio modal dapat melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BMT dan pada akhirnya dapat meningkatkan keberlangsungan usaha.

Menurut Yuliani (2007), Azwir (2006), Puspitasari (2009), dan Setiawan (2009), CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Lain halnya dengan Utomo (2004) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan negatif. Sedangkan Mawardi (2004) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Faktor eksternal juga dapat memengaruhi kinerja BMT, seperti masalah krisis ekonomi yang menimpa dunia perbankan Indonesia pada tahun 1998. Hal ini dapat diambil hipotesis:

H₃: CAR berpengaruh positif signifikan terhadap sustainabilitas usaha LKMS.

2.5.4. Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap *Sustainabilitas* Usaha LKMS

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang akan atau sudah memiliki usaha yang berjalan 2 tahun. Spesifik pada BMT, pola pembiayaan BMT merupakan pembiayaan penyertaan modal usaha kecil yang khusus membiayai modal kerja mulai dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Wahyuni, 2013). Di mana dana dari BMT merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Namun, walaupun sudah

disepakatinya suatu akad, pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari (Murdoch, 1997). BMT akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Risiko dalam konteks LKMS merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang tentunya akan berdampak negatif bagi pendapatan BMT dan membuat kerugian bagi BMT tersebut. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga LKMS pada umumnya, BMT juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul. Maka dapat disimpulkan, *outstanding* pembiayaan BMT menjadi komponen utama keberlanjutan usaha. Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis:

H₄: Jumlah pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap sustainabilitas usaha LKMS.

2.5.5. Pengaruh Jumlah Aset terhadap Sustainabilitas Usaha LKMS

Pertumbuhan aset mampu mendukung kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat. Semakin tinggi nilai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mengakibatkan profitabilitas juga akan semakin tinggi. Menurut Dendawijaya (2009), semakin besar ROA suatu BMT, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai BMT dan semakin baik posisi BMT tersebut dari segi penggunaan aset.

Hasil penelitian Boon Heng dkk. (2013) pada studi kasus Malaysian Commercial Bank, menekankan bahwa SIZE (total aset) adalah penentu

profitabilitas bank. San dan Boon menjelaskan di dalam hasil penelitiannya bahwa total aset memengaruhi profitabilitas bank di Malaysia secara positif. Sedangkan hasil penelitian Muda, Muhamad, dkk. (2013) yang dilakukan di Malaysia Islamic Banks menghasilkan temuan bahwa ukuran bank memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ROA.

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Muljawan dkk. (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diprosikan dengan nilai aset, memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi operasional bank walaupun tidak signifikan.

H₅: Jumlah aset berpengaruh positif signifikan terhadap sustainabilitas usaha LKMS.

2.5.6. Pengaruh Jumlah Cabang terhadap *Sustainabilitas* Usaha LKMS

Beberapa studi menyatakan masyarakat di pedesaan negara berkembang kekurangan akses kredit perbankan (Navajas dkk., 2015). Berdasarkan data Global Financial Inclusion tahun 2015, hanya 26,03% masyarakat pedesaan negara berpendapatan menengah bawah (termasuk Indonesia) yang mempunyai rekening di keuangan formal (World Bank, 2011).

Dari sisi perbankan, pemberian layanan terhadap masyarakat berpendapatan rendah terlalu mahal biayanya karena tingginya biaya transaksi dan informasi (Hermes & Lensink 2011; Hermes dkk., 2011). BUS membutuhkan investasi yang tinggi untuk membuka *outlet* atau jumlah cabang dan menyediakan tenaga kerja. Kondisi ini tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh karena masyarakat pada segmen ini hanya

menabung dan meminjam dana dengan nilai nominal yang kecil. Pinjaman yang relatif kecil ini menyebabkan BUS segan untuk memberikan kredit pada segmen kelompok ini (Hulme dkk., 1996). Pertimbangan efisiensi dalam penyaluran kredit kepada masyarakat miskin ini sering menjadi pertimbangan utama bagi BMT, di samping juga masalah ketiadaan *collateral* bagi masyarakat miskin (Ahmed, 2002; Rahman, 2007; Li dkk., 2011) sehingga diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya LKM/LKMS di negara berkembang, sebagai upaya memperbaiki akses bagi rumah tangga miskin ke pasar keuangan (Zeller & Sharma, 2000; Nader, 2008; Menkhoff & Rungruxsirivorn, 2011). Di Indonesia, banyak lembaga keuangan mikro yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat miskin, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan BMT.

Peran BMT ini masih baru dalam layanan keuangan mikro di Indonesia. Walaupun masih baru, di Indonesia BMT berdiri sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, tetapi relatif berkembang dan telah banyak beroperasi di wilayah perdesaan serta terpencil yang tidak dijangkau oleh perbankan (Buchori, 2012).

Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT di Pulau Jawa bervariasi, yaitu kurang dari Rp500.000,00 sampai lebih dari Rp2.500.000,00. Data tersebut didapat dari penelitian terhadap BMT yang dilakukan oleh BI bekerja sama dengan Unpad, Undip, dan Unair (Buchori, 2012). Berdasarkan nilai pembiayaan rata-rata yang relatif kecil tersebut, bisa

dikatakan bahwa jangkauan layanan BMT diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Hanya masyarakat miskin yang memerlukan nilai pembiayaan yang relatif kecil tersebut. Namun, pengukuran jangkauan layanan dengan menggunakan rata-rata pinjaman sebagai indikator masyarakat miskin yang menjadi target jangkauan layanannya, relatif sederhana dan sangat kasar (Navajas *et. al.*, 2000). Untuk itu, hipotesis yang diajukan:

H₆: Jumlah cabang berpengaruh positif signifikan terhadap sustainabilitas usaha LKMS.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan keadaan sesuai dengan kaidah ilmiah (Syamsuddin dan Damayanti 2011:14). Berdasarkan hal tersebut, pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menyajikan fakta atau mendeskripsikan statistik untuk menunjukkan hubungan antarvariabel dalam penelitian yang diuji. Pendekatan kuantitatif penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh program *linkage* terhadap sustainabilitas usaha LKMS.

Metode kuantitatif relevan dengan desain penelitian ini dan dipergunakan untuk mengumpulkan data penelitian sehingga hasil penelitian dapat dibuktikan. Sedangkan untuk teknik analisis datanya, peneliti menggunakan teknik analisis korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengungkapkan hubungan korelatif antardua variabel atau lebih. Korelasi ini mengacu pada adanya kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi variabel yang lain. Korelasi penelitian ini terbagi atas korelasi simetris (kebersamaan) dan resiprokal (saling memengaruhi). Korelasi antarvariabel ditunjukkan melalui besarnya koefisien korelasi (-1 s.d +1).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Lebih lanjut, jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel (*pooling data*). Data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*. Jumlah observasi dalam penelitian ini sebesar 273, didapatkan dari BMT yang tergabung dalam Majelis Perwakilan Daerah (MPD) Jawa Tengah.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah BMT yang tergabung dalam Majelis Perwakilan Daerah (MPD) Jawa Tengah sejumlah 273 BMT. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sedangkan kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BMT yang telah berdiri lebih dari sepuluh tahun.
2. Jumlah total aktiva adalah antara 2 M hingga 300 M.
3. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja BMT adalah berdasarkan laporan publikasi keuangan BMT selama periode 9 tahun, mulai dari 2010 hingga tahun 2018.

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan di atas maka BMT yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 BMT dari total 273 BMT yang terdaftar di MPD Jawa Tengah 2010-2018. Data sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengunduh dari situs MPD Jawa Tengah dan mendatangi masing-masing BMT.

Data dalam penelitian ini merupakan gabungan data antara BMT (*cross section*) dan data antarwaktu (*time series*) selama periode 2010-2018 yang disebut *polling data*. Sebaran sampel penelitian secara keseluruhan berada di wilayah Jawa Tengah. Mekanisme pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan penyebaran BMT. Adapun teknik pengambilan sampel adalah memilih jumlah cabang dengan cara sampling kelompok dua tahap (*two stage cluster random sampling*). *Cluster random sampling* adalah sampel acak sederhana di mana setiap *sampling unit* terdiri dari kumpulan atau kelompok elemen. Cara ini dipilih karena lokasi menyebar secara geografis (Supranto, 2000: 226).

Tahapan yang dilakukan adalah dengan membagi wilayah populasi (Jawa Tengah) menjadi beberapa *cluster* menurut keresidenan berdasarkan wilayah geografi yang terdiri dari Keresidenan Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surakarta, dan Keresidenan Pati. Selanjutnya, mengategorikan BMT dari masing-masing wilayah geografis dengan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria kategorisasi diberikan dalam rangka pengambilan sampel yang representatif untuk mewakili seluruh BMT.

Responden yang terpilih menjadi unit analisis, akan ditarik dengan metode *systematic random sampling* dengan menggunakan alokasi proporsional. Sampel ditentukan berdasarkan teori Bailey yang menyatakan bahwa ukuran sampel minimum untuk menentukan sampel penelitian dengan

menggunakan analisis data statistik adalah 30. Adapun data LKMS di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

No	LKMS	KODE
1	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	LKMS1
2	KJKS Dirgantara	LKMS2
3	KSPPS BMT Amal Mulia	LKMS3
4	BMT Al Hikmah	LKMS4
5	KSPPS Al Mu'aawanah	LKMS5
6	KSPP Tamzis Bina Utama	LKMS6
7	KJKS Harber Harapan Bersama	LKMS7
8	KJKS BMT Karisma	LKMS8
9	BMT Dana Mentari	LKMS9
10	KJKS BMT Palur	LKMS10
11	KSU Amanah Indonesia	LKMS11
12	KSPPS Fosilatama Artha Sejahtera	LKMS12
13	KJKS Hudatama	LKMS13
14	KSPPS BMT Bondho Tumoto	LKMS14
15	KSPPS BINA Muamalat Walisongo	LKMS15
16	KJKS BMT An Nur Mandiraja	LKMS16
17	KSU BMT Marhaban	LKMS17
18	BMT Amanah Sinduraja	LKMS18
19	BMT Attina	LKMS19
20	KSPPS BMT Mandiri Sejahtera	LKMS20
21	BMT Inti Muamalat	LKMS21
22	KSU BMT Mitra Anda	LKMS22
23	KSPPS BMT Berkah Mitra Hasanah	LKMS23
24	BMT Binama	LKMS24
25	KJKS Mitra Dana Syariah	LKMS25
26	BMT El Labana	LKMS26
27	BMT Harapan Umat	LKMS27
28	BMT Umat Sejahtera	LKMS28
29	KJKS El Gama Artha Mandiri	LKMS29
30	BMT Nurul Barokah	LKMS30
31	BMT Ki Ageng Pandanaran	LKMS31
32	BMT Mandiri	LKMS32

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dari hasil studi

pustaka dan teknik dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik analisis untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dan lain-lain yang masih relevan. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data serta informasi yang berkaitan dengan objek studi.

3.5. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan penjabaran dari masing-masing variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Sumber data	Jenis data
1.	Program <i>Linkage</i> (X1)	Program pembiayaan <i>linkage</i> yang dilakukan antara pihak BMT dengan bank syariah yang berupa <i>executing</i> dan <i>channeling</i> .	Diukur dari nilai program <i>linkage</i> yang diikuti oleh LKMS dalam bentuk data panel.	- Laporan keuangan - Neraca	Rasio
2.	<i>Non-Performing Financing</i> /NPF (X2)	<i>Non-performing financing</i> (NPF) adalah pembiayaan yang tidak memiliki <i>performance</i> yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet.	Diukur dengan rasio antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan.	- Laporan keuangan - Laporan rasio keuangan	Rasio
3.	CAR (X3)	Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh BMT.	Diukur dengan rasio antara total modal dengan ATMR.	- Laporan keuangan - Laporan rasio keuangan	Rasio
4.	Jumlah Pembiayaan (X4)	<i>Principal balance</i> : jumlah debit pinjaman atau kewajiban lain.	Diukur dengan rasio antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga.	- Laporan keuangan - Laporan rasio keuangan	Rasio
5.	Jumlah Aset (X5)	Jumlah total aset	Diukur dengan penjumlahan total aset.	- Laporan keuangan - Laporan rasio keuangan	Rasio
6.	Jumlah Cabang (X6)	Jumlah cabang BMT merupakan ukuran kesuksesan BMT.	Diukur dengan jumlah cabang.	- Laporan keuangan - Laporan rasio keuangan	Jumlah
7.	<i>Sustainability Usaha</i> (Y1) Profitabilitas	Kemampuan suatu BMT dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.	Diukur dengan rasio antara laba sesudah pajak dengan total aset. Diukur dari nilai ROA.	- Laporan keuangan - Laporan rasio keuangan	Rasio
8.	<i>Sustainability Usaha</i> (Y2) BOPO	Mengukur efisiensi operasional BMT dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.	Diukur dari beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.	- Laporan keuangan - Laporan rasio keuangan	Rasio

3.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel (*pooled data*). Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Bentuk umum data panel, baik yang *pooling* atau kombinasi adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

dengan:

i menyatakan individual ke i dan
t menyatakan waktu ke t.

Asumsi yang digunakan pada data panel adalah bahwa semua variabel penjelas adalah *non-stochastic* (*non-random*) dan *error term* mengikuti asumsi klasik, yaitu terdistribusi normal:

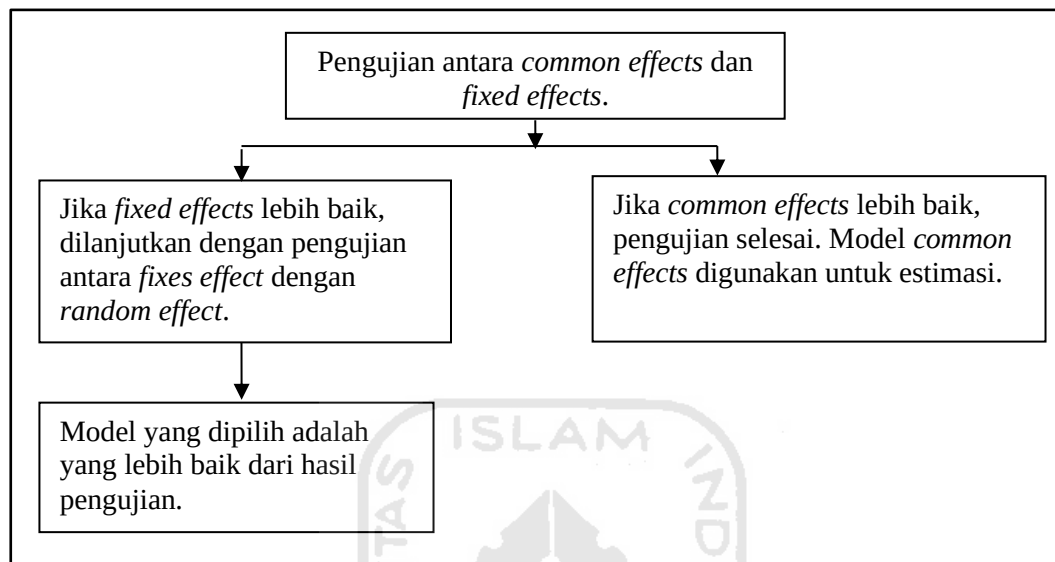
$$E(\varepsilon_{it}) \sim N(0, \sigma^2).$$

Dalam menentukan model regresi data panel terdapat beberapa kemungkinan antara intersep, koefisien slope, dan *error term*, yaitu: (1) intersep dan koefisien slope konstan sepanjang waktu dan individu, eror berbeda sepanjang waktu dan individu; (2) koefisien slope konstan, tetapi intersep bervariasi sepanjang individu; (3) koefisien slope konstan, tetapi intersep bervariasi sepanjang waktu dan individu; (4) baik intersep maupun koefisien slope bervariasi sepanjang individu; (5) baik intersep maupun koefisien slope bervariasi sepanjang waktu dan individu.

Pada kemungkinan 3, 4, dan 5 di atas, estimasi yang dilakukan semakin sulit karena semakin bertambahnya variabel penjelas yang dimasukkan dalam model.

3.7. Prosedur Estimasi Data Panel

Estimasi data panel dapat dilakukan dengan pendekatan *common*, *fixed effect*, maupun *random effect* yang diuraikan pada gambar:



Gambar 3.1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model Panel Data
Sumber: Sriyana (2014:181)

Penjelasan prosedur pemilihan sebagai berikut:

- a. *Common effect* (semua koefisien konstan sepanjang waktu dan individu)
Model yang mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien slope konstan sepanjang waktu dan individu, serta *error term* menjelaskan perbedaan intersep dan koefisien *slope* sepanjang waktu dan individu tersebut. Regresi dilakukan dengan mengombinasikan data *time series* dan *cross section (pooled)*. Estimasi yang dilakukan, yaitu dengan regresi *ordinary least square* (OLS). Cara ini disebut *pooled regression* atau *common effect*. Dengan demikian, dalam model ini tidak ada efek individu.
- b. *Fixed effect* (koefisien slope konstan, tetapi intersep bervariasi sepanjang individu)

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep untuk setiap individu ini dikenal sebagai model regresi *fixed effect*. Istilah *fixed effect* berasal dari kenyataan bahwa meskipun intersep berbeda pada setiap individu, tetapi masing-masing intersep individu tidak bervariasi atau tetap sepanjang waktu (*time invariant*). Selain itu model juga mengasumsikan bahwa koefisien slope konstan sepanjang waktu dan individu. Estimasi yang dilakukan, yaitu dengan teknik variabel *dummy* untuk individu. Selanjutnya, karena penggunaan *dummy* untuk estimasi *fixed effect* itu maka literatur menyebutnya teknik *least square dummy variables* (LSDV). Dengan demikian di dalam model ini ada efek individu. *Software Eviews 10* telah menyediakan program estimasi model data panel dengan teknik *fixed effect* tersebut.

Pada perkembangannya, dapat pula memasukkan unsur *time effect* sehingga intersep individu tidak konstan lagi sepanjang waktu. Pengaruh *time effect* itu dihitung dengan menambahkan variabel *dummy* untuk waktu.

c. *Random effect*

Metode data panel dengan pendekatan *fixed effect* di atas memiliki persoalan dalam hal *degree of freedom* jika ada banyak individu dalam regresi. Jika variabel *dummy* menunjukkan kekurangan pengetahuan tentang model yang sebenarnya maka diuji melalui *disturbance term* μ_{it} . Metode data panel ini disebut pendekatan *random effect*.

Dalam hal ini, dikatakan bahwa individu dalam sampel yang diestimasi diambil dari populasi individu-individu yang besar dan mereka mempunyai nilai rata-rata umum untuk intersep, yaitu β_1 dan perbedaan individu dalam nilai intersep untuk masing-masing individu dinyatakan dalam *error term* ε_i .

Composite error term ω it terdiri dari dua komponen, yaitu ε_i adalah *cross section* atau *individual specific error component*, dan μ it adalah *combined time series and cross section error component*.

Menurut Gujarati dan Porter (2009) ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan *fixed effect* atau pendekatan *random effect* dalam data panel:

1. Apabila jumlah *time series* (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil maka hasil *fixed effect* atau *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung, yaitu *fixed effect model* (FEM).
2. Apabila N besar dan T kecil maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil tidak secara acak maka *fixed effect* harus digunakan.
3. Apabila komponen *error* ε_i individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, serta apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

3.8. Proses Pemilihan Model Data Panel

Sebelum menentukan metode estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian ini

dilakukan untuk mengetahui manakah model yang tepat untuk digunakan sebagai estimasi model regresi dalam penelitian. Terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, yakni:

3.8.1. Uji Chow

Uji Chow yakni pengujian untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *fixed effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel *dummy* atau model *common effect* dengan melihat *sum of residuals* (RSS). Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F-hitung lebih besar ($>$) dari F-tabel maka H_0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect model*. Begitu pun sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil ($<$) dari F-tabel maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *common effect model* (Widarjono, 2007: 259).

3.8.2. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* lebih baik dari metode *random effect*. Uji Hausman digunakan sebagai alat uji dalam penelitian ini untuk menentukan

model yang tepat antara model *fixed effect* (FE) atau model *random effect* (RE) yang akan digunakan dalam estimasi model regresi.

Pengujian Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic chi square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , di mana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih kecil ($<$) dari nilai kritisnya, yaitu 0,05 (5%) maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *fixed effect*. Sebaliknya, bila nilai statistik Hausman lebih besar ($>$) dari nilai kritisnya, yaitu 0,05 atau 5% maka model yang tepat adalah model *random effect*. Kriteria uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a) Apabila nilai χ^2 (*chi-square*) statistik pada uji Hausman signifikan, berarti model yang tepat untuk digunakan adalah model *fixed effect*.
- b) Apabila nilai χ^2 (*chi-square*) statistik pada uji Hausman tidak signifikan, berarti model yang tepat untuk digunakan adalah model *random effect*.

3.8.3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *random effect* atau *common effect*. Uji ini digunakan ketika dalam pengujian uji Chow yang terpilih adalah model *common effect*. Melakukan uji *lagrange multiplier test* data juga diregresikan

dengan model *random effect* dan model *common effect* dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$ (maka digunakan model *common effect*)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (maka digunakan model *random effect*)

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai statistik LM > nilai chi-square maka H_0 ditolak yang artinya model *random effect*.
- b. Jika nilai statistik LM < nilai chi-square maka H_0 diterima yang artinya model *common effect*.

3.8.4. Keunggulan Regresi Menggunakan Panel Data

Menurut Widarjono (2007) metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data *time series* atau *cross section*, yaitu data panel yang merupakan gabungan dua data, *time series* dan *cross section*, mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*). Keunggulan regresi data panel menurut Wibisono (2005) antara lain:

- a. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.

- b. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
- c. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*) sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
- d. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan *kolinieritas (multiko)* antara data semakin berkurang, serta derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
- e. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
- f. Data panel digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dengan keunggulan tersebut maka berimplikasi pada tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dan model data panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005; dalam Shochrul R., Ajija, dkk., 2011).

3.8.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Kebaikan suatu model (*goodness of fit*)

dapat diukur dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tidak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati dan Porter, 2011). Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Nilai koefisien determinasi pada $0 < R^2 < 1$ menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas.
2. Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

3.8.6. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5 persen (Ghozali, 2011).

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah:

$H_0: \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh)

Penentuan kesimpulan uji F dengan menggunakan kriteria, yaitu membandingkan *p-value* dengan taraf signifikansi atau α . Apabila *p-value* $> \alpha$ maka dapat diketahui bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan,

apabila $p\text{-value} < \alpha$ maka variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

3.8.7. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Uji t digunakan dalam pengujian statistik untuk melihat apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_1: \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh)

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S_e(\beta_i)}$$

dengan:

$S_e(\beta_i)$ = Standar error dari b

β_i = Koefisien regresi

Penentuan kesimpulan uji t dengan menggunakan kriteria, yaitu membandingkan $p\text{-value}$ dengan taraf signifikansi atau α . Apabila $p\text{-value} > \alpha$ maka dapat diketahui bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan, apabila $p\text{-value} < \alpha$ maka variabel independen berpengaruh parsial terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Tengah

Sampel objek penelitian terdiri 32 dari total 273 lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) se-Jawa Tengah (Jateng). LKMS diambil dari aset-aset yang memiliki kisaran 2 miliar sampai dengan 300 miliar. Dari 32 objek penelitian, 25 di antaranya telah memiliki sertifikat *Islamic Microfinance Standard* (IMS), 7 lainnya dalam proses pengajuan dan akreditasi ulang. IMS yang didapat menunjukkan bahwa pengelolaan, *corporate governance*, kepatuhan syariat, dan manajemen BMT yang dijadikan sampel berada dalam mutu pratama.

Sampel yang diambil mewakili representasi dari wilayah Jawa Tengah yang memiliki 273 BMT di 35 kabupaten dan kota dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Adapun total aset seluruh BMT naik dari 2,9 triliun pada 2013 menjadi 3,8 triliun hingga Oktober 2017 (puskopsyahbmtjateng, 2018). Setiap BMT mengalami pertumbuhan rata-rata sebanyak 35 persen sampai dengan 40 persen setiap tahun, sedangkan pembiayaan yang diberikan lembaga ini mulai dari kisaran Rp5 juta sampai Rp100 juta.

4.2. *Sustainability* LKMS

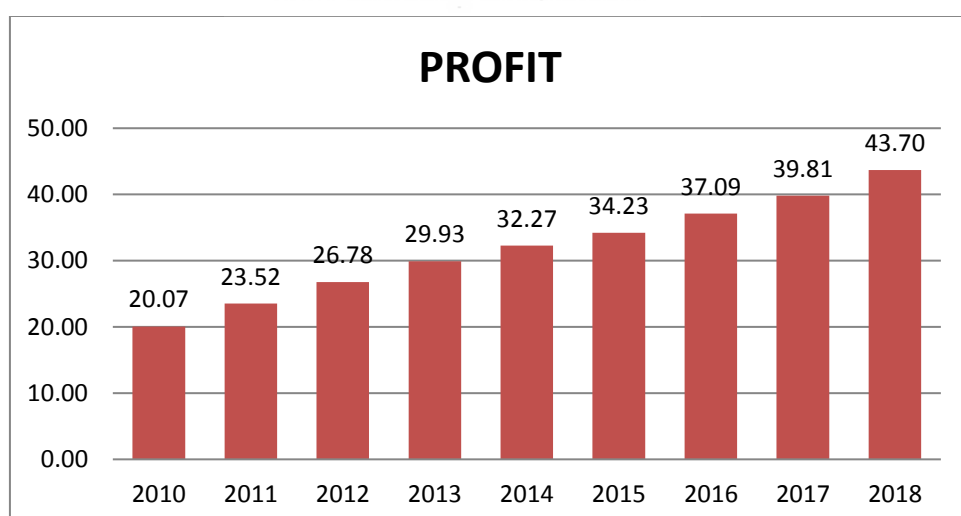
4.2.1. *Sustainability* LKMS di Jawa Tengah

Sustainability BMT merupakan kemampuan BMT untuk bertahan, secara terus-menerus dalam menutupi biaya operasional dengan menggunakan pendapatan usaha yang dihasilkan dari aktivitas bisnis. *Sustainability* lembaga adalah kemampuan LKMS untuk beroperasi secara berkelanjutan yang didukung oleh faktor keberhasilan dalam

mengimplementasikan *cost-effectiveness* sebagai kunci utama kegiatan usahanya, sedangkan sustainabilitas keuangan merupakan kondisi keuangan suatu LKM yang dalam kegiatannya dapat mencukupi kebutuhan biaya operasi dan biaya dana untuk jangka panjang. Di dalam penelitian ini, sustainabilitas LKMS diukur dengan menggunakan dua rasio, yaitu profitabilitas dan rasio efisiensi (BOPO) dari tahun 2010 sampai 2018 di mana data tidak dipublikasikan di web melainkan dilaporkan di Kementerian Koperasi dan Asosiasi BMT se-Jawa Tengah.

4.2.1.1. Perkembangan Profitabilitas LKMS di Jawa Tengah

Profitabilitas merupakan indikator utama dalam melihat apakah LKMS sehat atau tidak, jika profitabilitas LKMS meningkat maka dapat diartikan bahwa kinerja keuangan LKMS dinyatakan sehat. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 dan diperbarui tahun 2017 melalui surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017, apabila nilai komposit ROA > 1,5% maka dinyatakan sangat baik. Di mana di dalam penelitian ini data profitabilitas diambil berdasarkan nilai *return on assets* (ROA) periode 2010 sampai 2018.



Gambar 4.1 Perkembangan Profitabilitas Rata-Rata LKMS se-Jawa Tengah, Periode 2010-2018

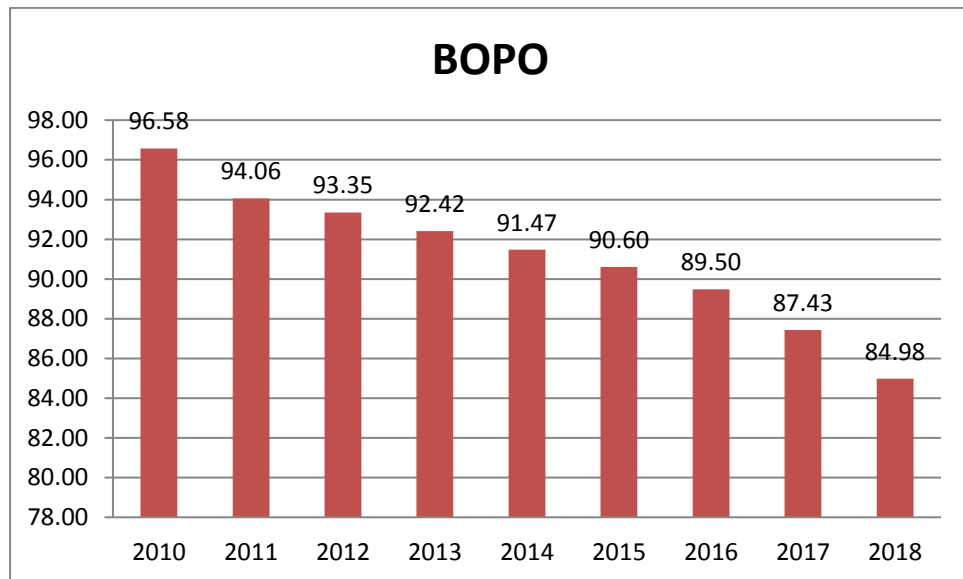
Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan gambar di atas, rata-rata rasio profitabilitas LKMS di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan: dari sebesar 20,07 di tahun 2010, naik menjadi 43,70 di tahun 2018. Selama 9 tahun, rata-rata rasio profitabilitas pada kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa kinerja laba LKMS di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang optimal dan memberikan harapan tinggi pada tingkat sustainabilitas usaha dari aspek keuangan.

4.2.1.2. Perkembangan BOPO LKMS di Jawa Tengah

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi lembaga keuangan mikro syariah. BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di LKMS.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, penilaian efisiensi KJKS/LKMS didasarkan pada 3 (tiga) rasio, salah satunya yaitu rasio biaya operasional terhadap operasional pelayanan. Nilai rasio > 100 dinyatakan tidak efisien, 85-100 dinyatakan kurang efisien, 69-84 dinyatakan cukup efisien, dan 0-68 dinyatakan efisien.



Gambar 4.2 Perkembangan BOPO Rata-Rata LKMS se-Jawa Tengah Periode 2009-2018

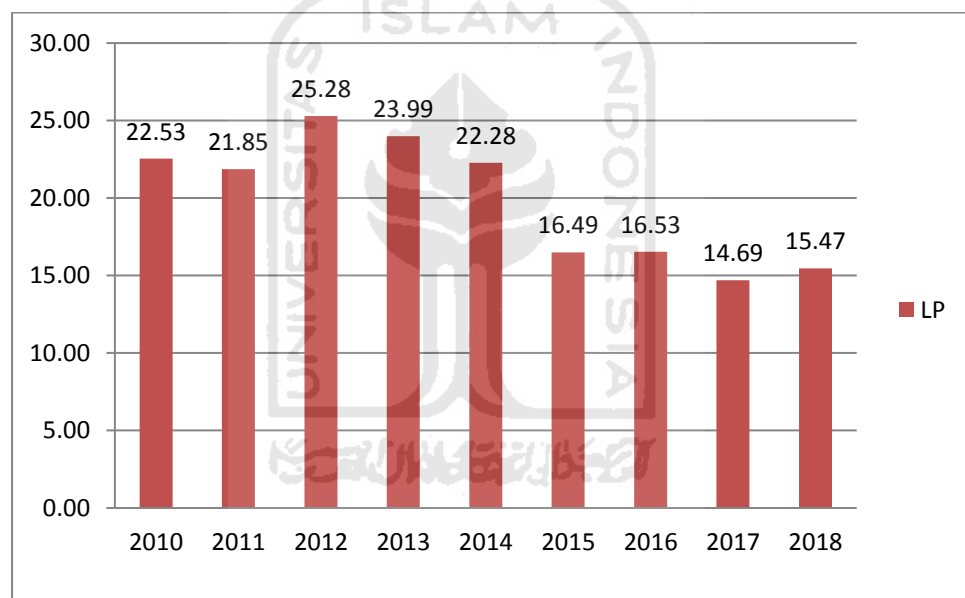
Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat terlihat bahwa rasio efisiensi (BOPO) pada LKMS se-Jawa Tengah pada tahun 2009 sampai dengan 2018 mengalami penurunan. Penurunan dari tingkat rasio BOPO sebesar 96,58% di tahun 2009 menjadi sebesar 84,98% pada tahun 2018, tetapi tren penurunan masih menunjukkan bahwa selama 9 tahun, rasio BOPO menunjukkan kategori kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada pengelolaan biaya operasional LKMS di Jawa Tengah belum efisien, artinya tingkat sustainabilitas usaha pada aspek rasio BOPO belum optimal.

4.2.2. Perkembangan Program *Linkage* LKMS di Jawa Tengah

Program *linkage* merupakan kerja sama yang dilaksanakan bank umum dengan lembaga keuangan mikro (LKM) dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK). Bagi bank yang memiliki keterbatasan jaringan dan infrastruktur, dengan adanya program *linkage* dapat menjangkau usaha mikro dan kecil yang

terbukti tahan terhadap krisis ekonomi. Sedangkan bagi lembaga keuangan mikro yang memiliki dana terbatas, akan sangat terbantu dengan adanya program *linkage*. Di dalam penelitian ini, dari 32 LKMS yang menjadi objek penelitian: terdapat 2 (dua) menggunakan *executing* dan *channeling*; 5 (lima) tidak menggunakan *program linkage*; 1 (satu) menggunakan *channeling*; dan 24 (dua puluh empat) LKMS menggunakan *executing*. Data *linkage* di dalam penelitian ini menggunakan persentase proporsional, yaitu jumlah program *linkage* dibagi jumlah pembiayaan *outstanding* dari periode 2010 sampai 2018.



Gambar 4.3 Perkembangan Program *Linkage* Rata-Rata LKMS se-Jawa Tengah, Periode 2010 sampai 2018

Sumber: Data Diolah (2020)

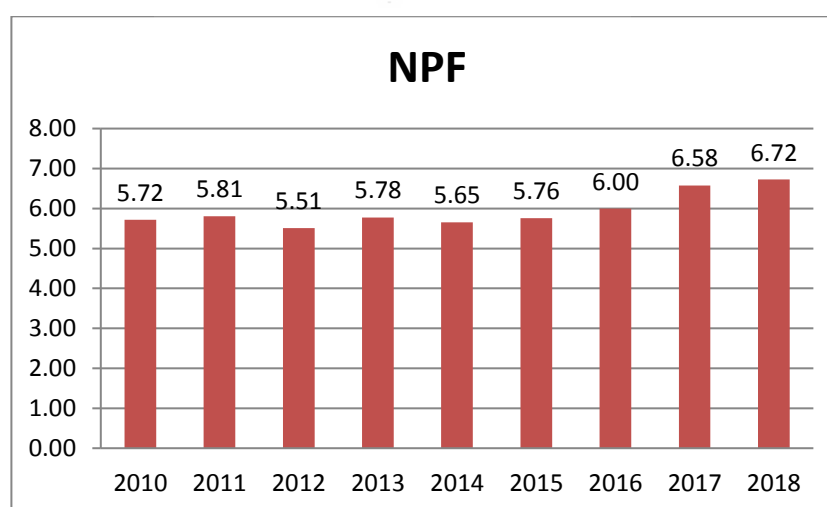
Berdasarkan Gambar 4.3 di atas terlihat bahwa perkembangan program *linkage* mulai tahun 2010 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi, ditunjukkan pada tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan dari 21,85% menjadi 25,28% pada tahun 2012, sedangkan mulai tahun 2012 sampai dengan 2018 mengalami penurunan PL dari rasio sebesar 25,28% menjadi 15,47% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa

program *linkage* yang dilakukan, baik melalui model *executing* maupun *chanelling* mengalami kecenderungan penurunan. Hal tersebut berarti LKMS di Jawa Tengah porsi pembiayaan lebih banyak berasal dari dana anggota atau nasabahnya.

4.2.3. Perkembangan Kinerja Keuangan LKMS di Jawa Tengah

4.2.3.1. Perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) LKMS di Jawa Tengah

Non-performing financing (NPF) merupakan rasio pembiayaan bermasalah besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi oleh LKMS. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin tinggi NPF akan menyebabkan penurunan tingkat sustainabilitas LKMS secara langsung. Menurut SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017, klasifikasi peringkat NPF, yaitu $NPF \leq 2\%$ dinyatakan sangat baik; $2\% \leq NPF < 5\%$ dinyatakan baik; $5\% \leq NPF < 8\%$ dinyatakan cukup baik; $8\% \leq NPF < 12\%$ kurang baik; dan $NPF \geq 12\%$ dinyatakan tidak baik.



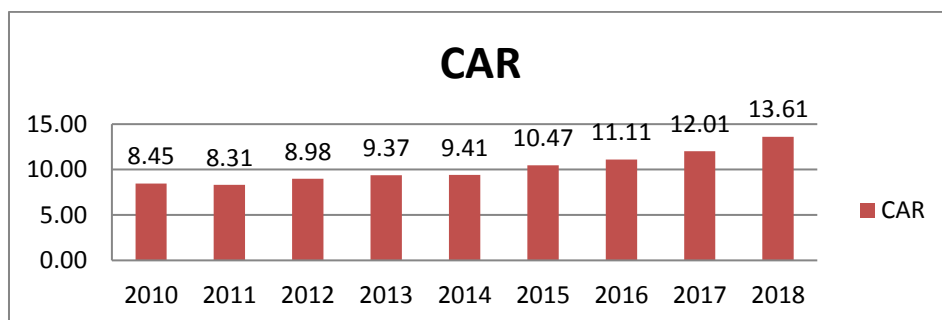
Gambar 4.4 Perkembangan NPF Rata-Rata LKMS se Jawa Tengah Periode 2010-2018

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas terlihat bahwa pertumbuhan kinerja rasio NPF dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Fluktuasi rasio NPF pada kisaran 5,51% sampai dengan 6,72% atau pada kategori cukup baik. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kecenderungan kenaikan, dari 5,65% di tahun 2014 menjadi 6,72% pada tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa kinerja rasio NPF pada LKMS di Jawa Tengah mengalami kenaikan pembiayaan yang macet.

4.2.3.2. Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LKMS di Jawa Tengah

Rasio kecukupan modal atau CAR pada lembaga keuangan mikro syariah merupakan aspek pertama penilaian kesehatan LKMS. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan, yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal, di dalam penelitian ini yang digunakan adalah rasio kecukupan modal 32 LKMS pada periode 2010 sampai 2018. Kecukupan modal atau sering disebut CAR merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal minimum didasarkan aktiva yang dimilikinya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku, LKMS dinyatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih; < 6 dinyatakan tidak sehat; 6 - < 7% dinyatakan kurang sehat; 7 - < 8% dinyatakan cukup sehat.

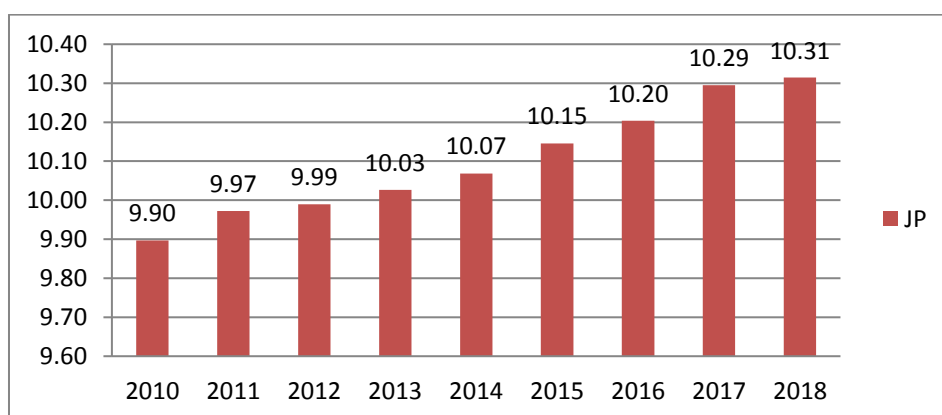


Gambar 4.5 Perkembangan Rata-Rata *Capital Adequacy Ratio* (CAR) LKMS di Jawa Tengah, Periode 2010-2018

Sumber: Data Diolah (2020)

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa pertumbuhan rasio CAR pada LKMS di Jawa Tengah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 mengalami kinerja yang fluktuatif, di mana dari tahun 2010 ke 2011 dan dari tahun 2012 ke 2013 mengalami rasio permodalan yang turun sedangkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan yang konsisten. Pertumbuhan rasio permodalan (CAR) tahun 2013 sebesar 9,37% menjadi sebesar 13,61%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja rasio CAR pada LKMS di Jawa Tengah memiliki kecenderungan kenaikan dan pada kategori sehat.

4.2.3.3. Perkembangan Jumlah Pembiayaan LKMS di Jawa Tengah

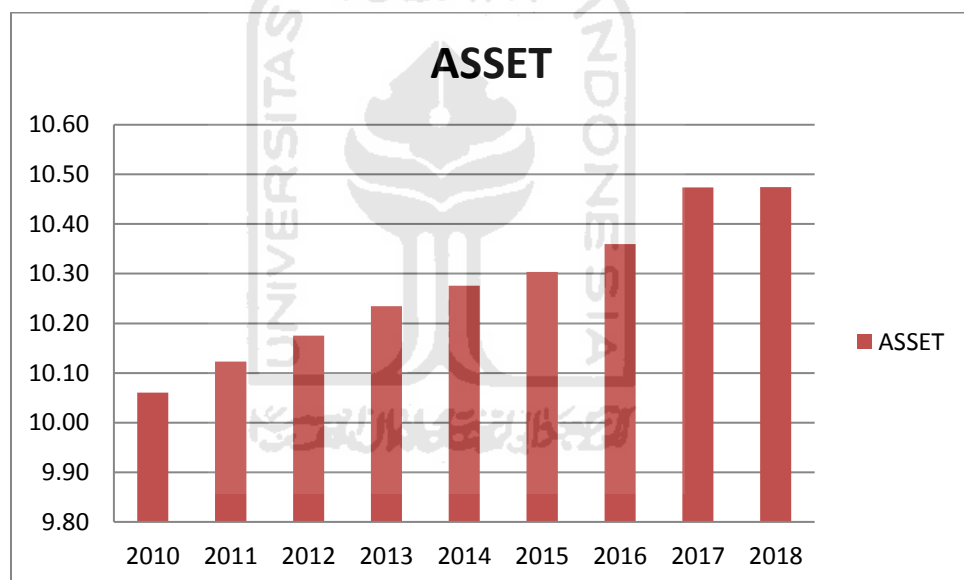


Gambar 4.6 Perkembangan Jumlah Pembiayaan Rata-Rata LKMS di Jawa Tengah, Periode 2010-2018

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan data pada Gambar 4.6, terlihat bahwa pertumbuhan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh LKMS di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan kenaikan yang konsisten, dari sebesar 9,90% pada tahun 2010 menjadi 10,31% pada tahun 2019. Pertumbuhan kenaikan ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan LKMS di Jawa Tengah lebih banyak berasal dari dana anggota atau nasabahnya, mengingat pada periode yang sama pembiayaan dari program *linkage* menurun.

4.2.3.4. Perkembangan Jumlah Aset LKMS di Jawa Tengah

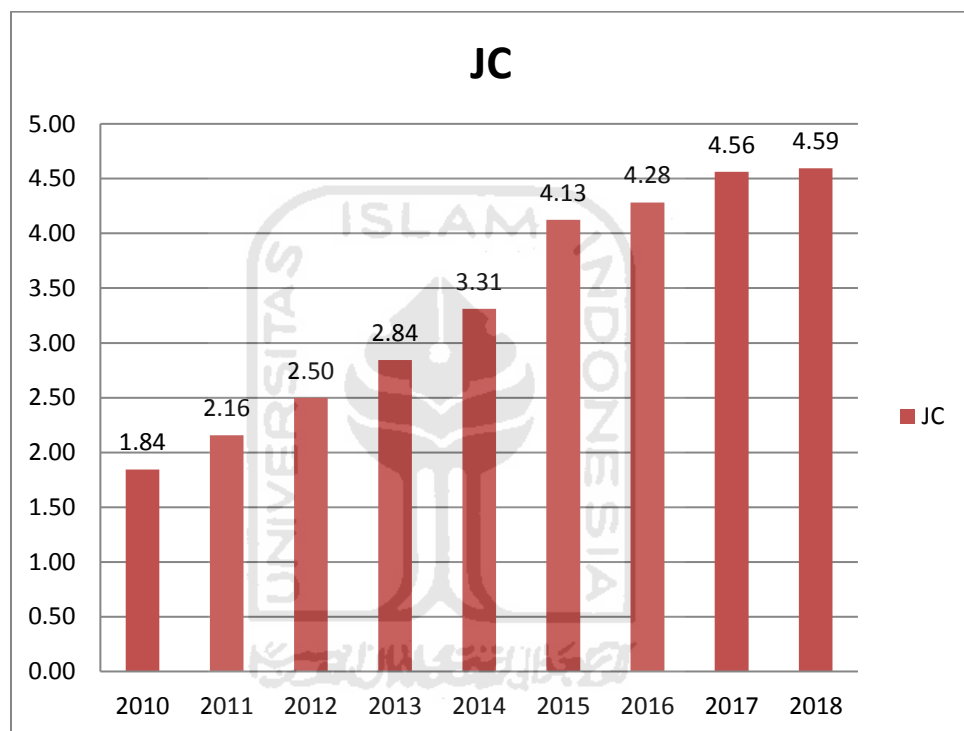


Gambar 4.7 Perkembangan Jumlah Aset Rata-Rata LKMS di Jawa Tengah, Periode 2010-2018
Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 4.7, dapat terlihat bahwa pertumbuhan aset LKMS di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, dari sebesar 10,06 % di tahun 2010 menjadi 10,47% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah aset di LKMS Jawa Tengah banyak berasal dari dana anggota dan nasabahnya. Hal

tersebut konsisten juga dengan kenaikan pembiayaan yang dikeluarkan LKMS pada periode yang sama. Pertumbuhan jumlah aset sekaligus jumlah pembiayaan ini mengandung makna bahwa pada periode 2010 sampai dengan 2018, dana anggota dan nasabah LKMS di Jawa Tengah lebih besar dan mengalami kenaikan daripada dana dari program *linkage*.

4.2.3.5. Perkembangan Jumlah Cabang LKMS di Jawa Tengah



Gambar 4.8 Perkembangan Jumlah Cabang LKMS di Jawa Tengah Periode 2010-2018

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 4.8, dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah cabang LKMS di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, yaitu dari 1,84% di tahun 2010 menjadi 4,59% di tahun 2018. Kenaikan jumlah cabang ini menunjukkan bahwa layanan kantor semakin meningkat senyampang dengan kenaikan jumlah aset serta jumlah pembiayaan pada periode yang sama.

4.3. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Profitabilitas (Y_1)	288	11,51	66,28	31,93	11,08
BOPO (Y_2)	288	58,24	106,55	91,15	6,10
Program <i>Linkage</i> (X_1)	288	0	99	19,90	16,35
NPF (X_2)	288	3,12	9,78	5,94	1,47
CAR (X_3)	288	2,19	39,80	10,20	5,25
Jumlah Pembiayaan (X_4)	288	8,84	11,52	10,10	0,49
Jumlah Aset (X_5)	288	9,28	11,71	10,28	0,49
Jumlah Cabang (X_6)	288	0	44	3,36	6,42

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dijelaskan bahwa hasil statistik dari keenam variabel independen masing-masing berjumlah 288 sampel. Dari 288 data yang dianalisis dapat diketahui bahwa variabel program *linkage* mempunyai nilai rata-rata sebesar 19,90 dengan nilai tertinggi sebesar 99 dan nilai terendah sebesar 0 serta nilai standar deviasi sebesar 16,35. Untuk variabel NPF mempunyai nilai rata-rata sebesar 5,94 dengan nilai tertinggi sebesar 9,78 dan nilai terendah sebesar 2,19 serta nilai standar deviasinya sebesar 1,47.

Variabel CAR mempunyai nilai rata-rata sebesar 10,20 dengan nilai tertinggi sebesar 39,8 dan nilai terendah sebesar 2,19 serta nilai standar deviasi sebesar 5,25. Untuk variabel jumlah pembiayaan mempunyai nilai rata-rata sebesar 10,10 dengan nilai tertinggi sebesar 11,52 dan nilai terendah sebesar 8,84 serta nilai standar deviasi sebesar 0,49

Variabel jumlah aset mempunyai nilai rata-rata sebesar 10,28 dengan nilai tertinggi sebesar 11,71 dan nilai terendah sebesar 9,28 serta nilai standar deviasi sebesar 0,49. Untuk variabel jumlah cabang

mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,36 dengan nilai tertinggi sebesar 44 dan nilai terendah sebesar 0 serta nilai standar deviasi sebesar 6,42.

4.4. Pemilihan Model Data Panel Persamaan Pertama

Menurut Sriyana (2014) ada tiga pengujian model untuk melakukan pemilihan model, yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji LM. Pemilihan model yang akan digunakan dalam penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah model tersebut cocok atau bagus digunakan dalam penelitian atau tidak. Dengan alasan tersebut maka di dalam penelitian ini, sebelum melakukan analisis data, akan dilakukan pengujian pemilihan model untuk menentukan model terbaik guna dijadikan estimasi regresi di dalam analisis pembahasan. Ada pun pemilihan model tersebut sebagai berikut:

4.4.1. Chow Test

Uji Chow adalah pemilihan model antara *common effect* dengan *fixed effect*. Dalam menentukan apakah model yang digunakan adalah *common effect model* atau *fixed effect model* disusun hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Menggunakan model *common effect*

H_a = Menggunakan model *fixed effect*

Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan kriteria:

- a. Jika nilai probabilitas chi square $> \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima.
- b. Jika nilai probabilitas chi square $< \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak.

Tabel 4.2 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ01

Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	30,60	(31,250)	0,00

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa nilai probabilitas chi square $< \alpha$ 5% yaitu sebesar 0,00, artinya bahwa H_a diterima sehingga model yang tepat digunakan adalah *fixed effect*. Menurut Widarjono (2009), jika pemilihan model pertama menerima H_a , yaitu memilih *fixed effect* sebagai model yang tepat maka harus dilanjutkan dengan uji Hausman.

4.4.2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji yang dilakukan untuk memilih antara *fixed effect model* dan *random effect model* untuk mengestimasi data panel. Dalam menentukan model yang digunakan apakah *random effect model* atau *fixed effect model* maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Menggunakan *random effect model*

H_a = Menggunakan *fixed effect model*

Hipotesis tersebut dengan menggunakan kriteria:

- Jika nilai probabilitas chi-square $> \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima.
- Jika nilai probabilitas chi-square $< \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak.

Tabel 4.3 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ01

Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	159,77	6	0,00

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa nilai probabilitas chi-square $< \alpha$ 0.05 yaitu 0.00, artinya bahwa H_0 ditolak, model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*.

4.5. Model Estimasi Regresi Data Panel Persamaan Pertama

**Tabel 4.4 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*
dengan Variabel Dependen Profitabilitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Sig
C	-353,19	26,05	-13,56	0,00	
Program <i>Linkage</i>	-0,05	0,024	-2,16	0,03	Signifikan
NPF	-0,11	0,30	-0,37	0,71	Tidak Signifikan
CAR	0,50	0,12	4,25	0,00	Signifikan
Jumlah Pembiayaan	2,48	4,26	0,58	0,56	Tidak Signifikan
Jumlah Aset	34,52	4,23	8,17	0,00	Signifikan
Jumlah Cabang	0,57	0,14	4,10	0,00	Signifikan
Effects Specification					
Cross-section fixed (<i>dummy variables</i>)					
R-squared	0,85	Mean dependent var		31,93	
Adjusted R-squared	0,83	S.D. dependent var		11,08	
F-statistic	39,52	Durbin-Watson stat		0,87	
Prob (F-statistic)	0,00				

Sumber: Data Diolah (2020)

Data pada Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa program *linkage* berpengaruh signifikan negatif terhadap rasio profitabilitas LMKS, artinya jika ada kenaikan sebesar 1% program *linkage* maka akan berpengaruh terhadap penurunan rasio profitabilitas sebesar 0,05. Hasil yang bisa disimpulkan dari pengaruh tersebut adalah jika ada program *linkage* maka akan menurunkan kinerja rasio profitabilitas LKMS.

Sedangkan dari pengukuran koefisien determinasi (R^2) pada estimasi *fixed effect model* menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,85 atau 85%. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen (program *linkage* [PL],

NPF, CAR, jumlah pembiayaan [JP], aset, dan jumlah cabang [JC]) mampu menerangkan variasi variabel dependen (profitabilitas) sebesar 85% dan sisanya 15% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Sementara itu, jika melihat dari konstanta masing-masing lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dari tahun 2010 sampai 2018, dapat diamati bahwa LKMS yang mempunyai nilai rasio profitabilitas tertinggi adalah LKMS 19 (BMT Attina) dengan nilai konstanta 32.78, sedangkan yang memiliki rasio profitabilitas terendah adalah LKMS 6 (KSPP Tamzis Bina Utama) dengan nilai konstanta -75.60 (Lampiran 3). Rasio profitabilitas pada LKMS 19 dari tahun 2010 sampai 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 rasio profitabilitas LKMS 19 sebesar 22,09% meningkat sebesar 42,82% pada tahun 2018.

LKMS yang memiliki profitabilitas tinggi akan memiliki dorongan lebih kuat untuk menyebarluaskan informasi perusahaan. Sedangkan LKMS dengan kinerja buruk cenderung menghindari melakukan pengungkapan melebihi yang diwajibkan (pengungkapan sukarela) karena mereka berusaha untuk menyembunyikan *badnews*. Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat dijadikan acuan oleh investor atau pemilik perusahaan untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola suatu LKMS. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Bowman dan Haire, 1976).

4.6. Pemilihan Model Persamaan Kedua

4.6.1. Uji Chow

Uji Chow adalah pemilihan model antara *common effect* dengan *fixed effect*. Dalam menentukan apakah model yang digunakan adalah *common effect model* atau *fixed effect model* disusun hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Menggunakan model *common effect*

H_a = Menggunakan model *fixed effect*

Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan kriteria:

- Jika nilai probabilitas chi square $> \alpha 0.05$ maka H_0 diterima.
- Jika nilai probabilitas chi square $< \alpha 0.05$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16,73	(31,25)	0,00
Cross-section Chi-square	323,52	31	0,00

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.5, terlihat bahwa nilai probabilitas chi square $< \alpha 5\%$ yaitu sebesar 0,00, artinya H_a diterima sehingga model yang tepat digunakan adalah *fixed effect*. Menurut Widarjono (2009), jika pemilihan model pertama menerima H_a , yaitu memilih *fixed effect* sebagai model yang tepat maka harus dilanjutkan dengan uji Hausman.

4.6.2. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji yang dilakukan untuk memilih antara *fixed effect model* dan *random effect model* untuk mengestimasi data panel.

Dalam menentukan apakah model yang digunakan apakah *random effect model* atau *fixed effect model* maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Menggunakan *random effect model*

H_a = Menggunakan *fixed effect model*

Hipotesis tersebut dengan menggunakan kriteria:

- Jika nilai probabilitas chi-square $> \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima.
- Jika nilai probabilitas chi-square $< \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak.

Tabel 4.6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	112,34	6	0,00

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.6, terlihat bahwa nilai probabilitas chi-square $< \alpha$ 0,05 yaitu 0,00, artinya H_0 ditolak, model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*.

4.6.3. Model yang Terbaik Persamaan Kedua

Tabel 4.7 Hasil Estimasi dengan *Fixed Effect Model* Persamaan Kedua dengan Variabel Dependen BOPO

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	292,93	24,6	11,91	0,00	
Program <i>Linkage</i>	0,02	0,01	1,98	0,05	Signifikan
NPF	0,13	0,21	0,6	0,53	Tidak Signifikan
CAR	-0,03	0,05	-0,53	0,60	Tidak Signifikan
Jumlah Pembiayaan	-6,89	3,08	-2,22	0,03	Signifikan
Jumlah Aset	-13,09	2,75	-4,76	0,00	Signifikan
Jumlah Cabang	-0,15	0,06	-2,67	0,00	Signifikan
Effects Specification					
Cross-section fixed (dummy variables)					
R-squared	0,69	Mean dependent var		91,15	
Adjusted R-squared	0,64	S.D. dependent var		6,10	
F-statistic	15,01	Durbin-Watson stat		0,79	
Prob (F-statistic)	0,00				

Sumber: Data Diolah (2020)

Data Table 4.7 di atas menunjukkan bahwa program *linkage* berpengaruh signifikan positif terhadap rasio BOPO LMKS, artinya jika ada kenaikan 1% program *linkage* maka akan berpengaruh terhadap kenaikan rasio BOPO sebesar 0,02. Hasil yang bisa disimpulkan dari pengaruh tersebut bahwa jika ada program *linkage* maka akan menaikkan kinerja rasio BOPO LKMS.

Sedangkan dari hasil pengujian determinasi (R^2) pada estimasi *fixed effect model*, menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,69 atau 69%, artinya bahwa variabel independen (program *linkage* [PL], NPF, CAR, jumlah pembiayaan [JP], aset dan jumlah cabang [JC]) mampu menerangkan variasi variabel dependen (BOPO) sebesar 69% dan sisanya 31% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Sementara itu, jika melihat dari konstanta masing-masing lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dari tahun 2010 sampai 2018, yang mempunyai nilai rasio BOPO tertinggi adalah LKMS 5 (KSPPS Al Mu'aawanah) dengan nilai konstanta 28,49 sedangkan yang memiliki rasio BOPO terendah adalah LKMS 21 (BMT Inti Muamalat) dengan nilai konstanta -17,38 (Lampiran 8).

Menurut Prasanjaya & Ramantha (2013), semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di LKMS. Jika melihat grafik 2 rasio BOPO LKMS 21, dari tahun 2010 sampai 2018 mengalami penurunan, di mana awal tahun 2010 BOPO LKMS 21 sebesar 94,33% turun menjadi 77,85% pada tahun 2018.

4.7. Hasil Uji Hipotesis Persamaan Pertama

4.7.1. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Persamaan Pertama

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Program <i>Linkage</i>	-0,05	0,03	Signifikan
NPF	-0,11	0,71	Tidak Signifikan
CAR	0,50	0,00	Signifikan
Jumlah Pembiayaan	2,48	0,56	Tidak Signifikan
Total Aset	34,52	0,00	Signifikan
Jumlah Cabang	0,57	0,00	Signifikan

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas dapat diinterpretasikan bahwa pada uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa program *linkage* berpengaruh negatif terhadap rasio profitabilitas. Hal ini berarti, jika program *linkage* naik 1% akan menurunkan rasio profitabilitas LKMS sebesar 0,05. Sedangkan hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa rasio NPF tidak berpengaruh terhadap rasio profitabilitas, artinya jika rasio NPF naik sebesar 1% tidak akan berpengaruh terhadap penurunan rasio profitabilitas.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan rasio *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap rasio profitabilitas. Hal ini berarti apabila rasio CAR naik sebesar 1% akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0,50. Selanjutnya, hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kenaikan rasio profitabilitas yang artinya apabila jumlah pembiayaan naik sebesar 1% tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan rasio profitabilitas.

Jumlah aset berpengaruh terhadap rasio profitabilitas, artinya hasil hipotesis kelima diterima. Hal ini berarti, kenaikan jumlah aset sebesar 1%

akan meningkatkan rasio profitabilitas sebesar 34,52. Terakhir, hasil uji hipotesis keenam menunjukkan variabel lain yang memengaruhi profitabilitas adalah jumlah cabang dengan nilai 0,57. Hal ini berarti, jika jumlah cabang meningkat 1% akan meningkatkan rasio profitabilitas sebesar 0,57.

4.7.2. Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan hasil estimasi persamaan pertama Tabel 4.8 bahwa nilai F-statistik sebesar 39,52 dengan nilai probabilitas $0.00 < \alpha 0,05$ yang artinya bahwa secara bersama-sama semua variabel independen (program *linkage*, NPF, CAR, jumlah pembiayaan, total aset, dan jumlah cabang) berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.8. Hasil Uji Hipotesis Persamaan Kedua

4.8.1. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis Persamaan Kedua

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Program <i>Linkage</i>	0,02	0,05	Signifikan
NPF	0,13	0,54	Tidak Signifikan
CAR	-0,03	0,59	Tidak Signifikan
Jumlah Pembiayaan	-6,86	0,03	Signifikan
Total Aset	-13,09	0,00	Signifikan
Jumlah Cabang	-0,15	0,01	Signifikan

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pada uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa program *linkage* berpengaruh positif terhadap rasio BOPO, artinya jika program *linkage* naik 1% akan menaikkan rasio BOPO LKMS sebesar 0,02. Sedangkan hasil uji

hipotesis kedua menunjukkan bahwa rasio NPF tidak berpengaruh terhadap rasio BOPO, artinya jika rasio NPF naik sebesar 1% tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan rasio BOPO.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan rasio *capital adequacy ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap rasio BOPO, artinya apabila rasio CAR naik sebesar 1% tidak akan meningkatkan rasio BOPO. Sedangkan hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan berpengaruh negatif terhadap rasio BOPO yang artinya apabila jumlah pembiayaan naik sebesar 1% akan menurunkan rasio BOPO sebesar 6,86.

Jumlah aset berpengaruh negatif terhadap rasio BOPO, artinya hasil hipotesis kelima ditolak. Hal ini berarti, kenaikan jumlah aset sebesar 1% akan menurunkan rasio BOPO sebesar 13,09. Terakhir, hasil uji hipotesis keenam menunjukkan variabel lain yang memengaruhi rasio BOPO adalah jumlah cabang dengan nilai -0,15, artinya jika jumlah cabang meningkat 1% akan menurunkan rasio BOPO sebesar 0,15.

4.8.2. Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan hasil estimasi persamaan pertama tabel 4.7 bahwa nilai F-statistik sebesar 15,01 dengan nilai probabilitas $0.00 < \alpha 0,05$ yang artinya bahwa secara bersama-sama semua variabel independen (program *linkage*, NPF, CAR, jumlah pembiayaan, total aset, dan jumlah cabang) berpengaruh terhadap rasio BOPO.

4.9. Persamaan Estimasi dengan Intersep sebagai Pembeda *Cross Effect* dan *Period Effect*

4.9.1. Persamaan Estimasi dengan Intersep sebagai Pembeda *Cross Effect*

Hasil estimasi pertimbangan *cross effect* untuk penelitian ini dibedakan dalam dua hal, yaitu hasil persamaan pertama dan persamaan kedua.

a. Intersep pembeda *cross effect* persamaan pertama

Tabel 4.10 Hasil Koefisien *Cross Effect* Persamaan Pertama

<i>Fixed Effect (Cross Section Effect)</i>	Koefisien
LKMS-1	13,13454
LKMS-2	0,70314
LKMS-3	5,20663
LKMS-4	10,18733
LKMS-5	-1,010936
LKMS-6	-75,5926
LKMS-7	-10,50111
LKMS-8	-25,11823
LKMS-9	-21,99873
LKMS-10	-19,83751
LKMS-11	-13,06446
LKMS-12	-0,462762
LKMS-13	-16,47016
LKMS-14	-3,764647
LKMS-15	-12,60024
LKMS-16	9,744839
LKMS-17	20,62103
LKMS-18	23,45516
LKMS-19	32,77744
LKMS-20	15,94557
LKMS-21	8,068286
LKMS-22	9,888038
LKMS-23	7,8916
LKMS-24	-29,83183
LKMS-25	4,30982
LKMS-26	31,94819
LKMS-27	-23,6763
LKMS-28	-14,60332
LKMS-29	29,58908
LKMS-30	19,38722
LKMS-31	21,54636
LKMS-32	4,12856

Sumber: Data Diolah (2020)

Hasil persamaan berdasarkan modifikasi untuk masing-masing LKMS yang mempertimbangkan *cross effect* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Persamaan Cross Effect Masing-Masing LKMS

LKMS	Persamaan Cross Effect
LKMS1	Profit _t = (13.13454 -353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-340.05546) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS2	Profit _t = (0,70314-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-352.48686) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS3	Profit _t = (5,20663-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-347.98337) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS4	Profit _t = (10,18733-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-343.00267) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS5	Profit _t = (-1,010936-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-354.200936) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS6	Profit _t = (-75,5926-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-428.7826) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS7	Profit _t = (-10,50111-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-363.69111) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS8	Profit _t = (-25,11823-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-378.30823) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS9	Profit _t = (-21,99873-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-375.18873) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS10	Profit _t = (-19,83751-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-373.02751) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS11	Profit _t = (-13,06446-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-366.25446) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS12	Profit _t = (-0,462762-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-353.65272) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS13	Profit _t = (-16,47016-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-369.66016) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS14	Profit _t = (-16,47016-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-369.66016) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS15	Profit _t = (-3,764647-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-356.954647) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS16	Profit _t = (9,744839-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-343.445161) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS17	Profit _t = (20,62103-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-332.56897) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS18	Profit _t = (23,45516 -353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-329.7384) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS19	Profit _t = (32,77744-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-320.41256) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS20	Profit _t = (15,94557-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-337.24443) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC

LKMS21	Profit _t = (8,068286-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-345.12714) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS22	Profit _t = (9,888038-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-343.301962) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS23	Profit _t = (7,8916-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-345.2984) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS24	Profit _t = (-29,83183-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-383.02183) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS25	Profit _t = (4,30982-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-348.88018) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS26	Profit _t = (31,94819-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-321.24181) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS27	Profit _t = (-23,6763-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-376.8663) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS28	Profit _t = (-14,60332-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-367.79332) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS29	Profit _t = (29,58908-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-323.60092) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS30	Profit _t = (19,38722-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-333.80278) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS31	Profit _t = (21,54636 -353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-331.64364) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
LKMS32	Profit _t = (4,12856-353.19) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-349.06144) -0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC

Berdasarkan model estimasi data tabel di atas, terlihat adanya pengaruh *cross-section* di setiap LKMS yang berada di Jawa Tengah terhadap sustainabilitas (profitabilitas), semua memiliki pengaruh efek *cross section* (efek LKMS) yang bernilai negatif, yaitu masing-masing LKMS memiliki nilai koefisien dan paling tinggi sebesar -428.7826 pada LKMS 6, sedangkan yang paling rendah LKMS 19 sebesar -320.41256. Hal ini terjadi karena profit dari dana program *linkage* tidak sebesar profit yang bersumber dari dana anggota karena margin dana yang berasal dari program *linkage* terlalu tinggi dibandingkan dana yang berasal dari anggota sehingga menyebabkan nilai koefisien dari LKMS 6 memiliki nilai yang paling besar berpengaruh negatifnya.

b. Intersep pembeda *cross effect* persamaan kedua

**Tabel 4.12 Hasil Koefisien *Cross Effect*
Persamaan Kedua**

<i>Fixed Effect (Cross Section Effect)</i>	Koefisien
LKMS-1	3,826765
LKMS-2	8,801722
LKMS-3	-2,788395
LKMS-4	3,915827
LKMS-5	28,49011
LKMS-6	23,44689
LKMS-7	10,76758
LKMS-8	4,1301
LKMS-9	10,21661
LKMS-10	15,52126
LKMS-11	11,83543
LKMS-12	-3,020361
LKMS-13	-9,864382
LKMS-14	-15,79082
LKMS-15	-14,76885
LKMS-16	-6,247267
LKMS-17	-3,370277
LKMS-18	-3,975602
LKMS-19	0,157167
LKMS-20	18,35846
LKMS-21	-17,38779
LKMS-22	-0,027213
LKMS-23	8,516299
LKMS-24	-18,26399
LKMS-25	-11,08164
LKMS-26	-14,76623
LKMS-27	-3,670226
LKMS-28	8,486039
LKMS-29	-9,65678
LKMS-30	-14,0024
LKMS-31	-2,9371
LKMS-32	-4,850921

Sumber: Data Diolah (2020)

Hasil persamaan berdasarkan modifikasi untuk masing-masing LKMS yang mempertimbangkan *cross effect* masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Persamaan Kedua *Cross Effect* Masing-Masing LKMS

LKMS	Persamaan Cross Effect
LKMS1	$BOPO_t = (3,826765 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (296.752165) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS2	$BOPO_t = (8,801722 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (301.727122) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS3	$BOPO_t = (-2,788395 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (290.137005) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS4	$BOPO_t = (3,915827 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (296.84122) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS5	$BOPO_t = (28,49011 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (321.41551) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS6	$BOPO_t = (23,44689 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (316.37229) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS7	$BOPO_t = (10,76758 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (303.69298) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS8	$BOPO_t = (4,1301 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (297.0555) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS9	$BOPO_t = (10,21661 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (303.14201) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS10	$BOPO_t = (15,52126 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (308.44666) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS11	$BOPO_t = (11,83543 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (304.76083) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS12	$BOPO_t = (-3,020361 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (289.905039) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS13	$BOPO_t = (-9,864382 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (283.061018) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS14	$BOPO_t = (-15,79082 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (277.13458) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS15	$BOPO_t = (-14,76885 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (278.15655) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS16	$BOPO_t = (-6,247267 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (286.678133) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS17	$BOPO_t = (-3,370277 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (289.555123) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$

LKMS18	$BOPO_t = (-3,975602 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (288.949798) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS19	$BOPO_t = (0,157167 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (293.082567) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS20	$BOPO_t = (18,35846 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (311.28386) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS21	$BOPO_t = (-17,38779 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (275.53761) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS22	$BOPO_t = (-0,027213 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (292.898187) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS23	$BOPO_t = (8,516299 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (301.441699) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS24	$BOPO_t = (-18,26399 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (274.66141) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS25	$BOPO_t = (-11,08164 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (281.84376) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS26	$BOPO_t = (-14,76623 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (278.15917) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS27	$BOPO_t = (-3,670226 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (289.255174) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS28	$BOPO_t = (8,486039 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (301.411439) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS29	$BOPO_t = (-9,65678 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (283.26862) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS30	$BOPO_t = (-14,0024 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (278.923) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS31	$BOPO_t = (-2,9371 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (289.9883) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
LKMS32	$BOPO_t = (-4,850921 + 292.9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (288.074479) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$

Berdasarkan model estimasi di atas, terlihat adanya pengaruh efek *cross section* di setiap LKMS yang berada di Jawa Tengah terhadap sustainabilitas (BOPO). Pengaruh efek *cross section* tersebut bernilai positif. Lebih lanjut, nilai koefisien yang paling besar, yaitu LKMS 5 sebesar 321.41551, sedangkan nilai koefisien yang paling kecil, yaitu LKMS 24 sebesar 274,66141. Hal ini disebabkan karena program *linkage* tidak dapat meningkatkan profitabilitas di LKMS, tetapi menambah beban operasional yang cukup banyak.

4.9.2. Persamaan Estimasi dengan Intersep *Period Effects*

Hasil estimasi pertimbangan *period effect* untuk penelitian ini dibedakan dalam dua hal, yaitu hasil persamaan pertama dan persamaan kedua.

- a. Intersep pembeda *period effect* persamaan pertama

Tabel 4.14 Hasil Koefisien *Period Effect* Persamaan Pertama

<i>Fixed Effect (Period Effect)</i>	Koefisien
2010	-11,06968
2011	-7,570213
2012	-4,629893
2013	-1,857915
2014	0,475470
2015	2,365658
2016	4,938110
2017	6,921489
2018	10,42698

Sumber: Data Diolah (2020)

Hasil persamaan berdasarkan modifikasi untuk masing-masing LKMS yang mempertimbangkan *period effect* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Persamaan *Period Effect* Masing-Masing LKMS

LKMS	Persamaan <i>Cross Effect</i>
2010	Profit _t = (-11.06968-353.19) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-364.25968) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
2011	Profit _t = (-7.570213-353.19) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-360.760213) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
2012	Profit _t = (-4.629893-353.19) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-357.819893) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
2013	Profit _t = (-1.857915-353.19) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-355.047915) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
2014	Profit _t = (0.475470-353.19) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-352.71453) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
2015	Profit _t = (2.365658-353.19) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-350.824342) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
2016	Profit _t = (4.938110-353.19) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-348.25189) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
2017	Profit _t = (6.921489-353.19) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-346.268511) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC
2018	Profit _t = (10.42698-353.19) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC Profit _t = (-342.76302) - 0,05LP-011NPF+0,50CAR+2,48JP+34,53ASSET+0,57KC

Sumber: Data Diolah (2020)

Hasil estimasi dan persamaan pertama koefisien *period effect* di atas menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan profit, walaupun memiliki pengaruh *period effect* yang bernilai negatif. Pada tahun 2010 nilai koefisien *period effect* sebesar -364,25968, tahun 2011 sebesar -360,760213; tahun 2012 sebesar -357,819893; tahun 2013 sebesar -355,047915; tahun 2014 sebesar -352,71453; tahun 2015 sebesar -350,824342; tahun 2016 sebesar -348,25189; tahun 2017 sebesar -346,268511; dan tahun 2018 sebesar -342,76302.

b. Intersep pembeda *period effect* persamaan kedua

Tabel 4.16 Hasil Koefisien *Period Effect*

Persamaan Kedua

<i>Fixed Effect (Period Effect)</i>	Koefisien
2010	7,320964
2011	4,277084
2012	3,322085
2013	1,946955
2014	0,592485
2015	-0,993650
2016	-2,560269
2017	-5,519274
2018	-8,386379

Hasil persamaan berdasarkan modifikasi untuk masing-masing LKMS yang mempertimbangkan *period effect* masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 Persamaan Kedua *Period Effect* Masing-Masing LKMS

LKMS	Persamaan <i>Cross Effect</i>
2010	$BOPO_t = (7,320964 + 292,9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (300,246364) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
2011	$BOPO_t = (4,277084 + 292,9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (297,202484) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
2012	$BOPO_t = (3,322085 + 292,9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (296,247485) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
2013	$BOPO_t = (1,946955 + 292,9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (294,872355) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
2014	$BOPO_t = (0,592485 + 292,9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (293,517885) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
2015	$BOPO_t = (-0,993650 + 292,9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (291,91175) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
2016	$BOPO_t = (-2,560269 + 292,9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (290,365131) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
2017	$BOPO_t = (-5,519274 + 292,9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (287,406126) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$
2018	$BOPO_t = (-8,38637 + 292,9254) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$ $BOPO_t = (284,539021) + 0,02LP + 0,13NPF - 0,03CAR - 6,858JP - 13,09ASSET - 0,15JKC$

Sumber: Data Diolah (2020)

Hasil estimasi dan persamaan kedua koefisien *period effect* di atas menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi penurunan BOPO dan memiliki pengaruh *period effect* yang bernilai positif. Pada tahun 2010 nilai koefisien *period effect* sebesar 300,246364; tahun 2011 sebesar 297,202484; tahun 2012 sebesar 296,247485; tahun 2013 sebesar 294,872355; tahun 2014 sebesar 293,517885; tahun 2015 sebesar 291,91175; tahun 2016 sebesar 290,365131; tahun 2017 sebesar 287,406126; dan tahun 2018 sebesar 284,539021.

4.10. Pengaruh Program *Linkage* terhadap Profitabilitas

LKMS dalam menjalankan usahanya harus memperoleh keuntungan agar aktivitasnya dapat berlanjut (*sustainable*). Salah satu program agar bisa

sustainable adalah dengan melakukan program *linkage*, baik yang berpola *executing* maupun *channeling*.

Dari hasil penelitian tentang pengaruh program *linkage* ini, dapat diinterpretasikan bahwa program *linkage* memberikan pengaruh, tetapi negatif terhadap profitabilitas LKMS sebesar -0.05. Hal ini berarti bahwa apabila program *linkage* naik 1% akan menyebabkan profitabilitas turun sebesar 0,05 atau 5%. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu penyaluran dana di dalam program *linkage* dengan pola *executing* serta adanya *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah atau anggotanya sehingga dana yang diberikan kepada nasabah untuk usaha mengalami kemacetan padahal LKMS harus tetap membayar pada lembaga keuangan mitra.

Argumentasi lainnya menunjukkan bahwa LKMS memiliki manajerial yang kurang bagus dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota atau nasabahnya yang berasal dari pedesaan. Hal ini menyebabkan risiko keuangan yang cukup tinggi, seperti kemacetan pada pembiayaan yang sudah diberikan sehingga menyebabkan tidak ada keuntungan yang diperoleh padahal LKMS tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana dari program *linkage*.

Di dalam penelitian ini, dari 32 LKMS, 2 menggunakan *executing* dan *channeling*; 5 tidak menggunakan program *linkage*; 1 menggunakan *channeling*; dan 24 menggunakan *executing*. Sementara itu, aturan program *linkage* dengan menggunakan *executing* menurut PBI No. 14/22/PBI/2012, adalah: 1) penyaluran atau pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM

dilakukan oleh lembaga keuangan tertentu, pada penelitian ini adalah LKMS; 2) lembaga keuangan tertentu (LKMS) sebagaimana pada poin pertama merupakan pihak yang menanggung risiko apabila mitra atau debitur UMKM wanprestasi atau cedera janji.

Jika melihat dari aturan tersebut, apabila semakin banyak LKMS menggunakan pola *linkage executing* maka LKMS harus menanggung risiko apabila mitra melakukan *wanpretasi*. Efeknya, ketika mitra melakukan *wanpretasi* akan menyebabkan profitabilitas LKMS menurun sebesar wanprestasi yang dilakukan oleh mitra atau bahkan jika LKMS tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, juga akan menyebabkan profitabilitas LKMS menurun.

Hasil penelitian Ndiege dkk. (2014) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat keterkaitan keuangan terhadap lembaga lain maka menjadikan koperasi (SACCOS) tidak *sustainable*. Hal ini menyiratkan bahwa untuk menjadi lembaga yang berkelanjutan maka koperasi harus berusaha menjauhi penggunaan dana eksternal dalam portofolio pinjaman mereka karena semakin tidak efektif lembaga keuangan dalam menyalurkan dana, akan memengaruhi laba lembaga keuangan syariah tersebut. Sebaliknya, jika semakin efektif lembaga keuangan syariah dalam penyaluran dana maka akan semakin bertambah pula laba perusahaan tersebut.

Maesaroh (2011) meneliti tentang tingkat efektivitas program *linkage* dengan melihat peningkatan aset, modal, laba, dan jumlah nasabah LKM setelah menjalin program *linkage* dengan BSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM yang menjalin program *linkage* dengan Bank

Syariah Mandiri telah mengalami peningkatan aset, modal, dan jumlah nasabah, tetapi sebagian mengalami penurunan pada perolehan laba.

Sejalan dengan hasil penelitian Ndiege dkk. (2014) dan Maesaroh (2011), hasil analisis regresi penelitian Hamada dan Miki (2010) dengan menggunakan data keuangan dari total 1.104 BPR mengungkapkan bahwa pinjaman bank berkontribusi pada perluasan kredit BPR. Apalagi efek pinjaman bank melalui program *linkage* lebih besar dari pinjaman bank saja maka akan memengaruhi pengembalian aset secara positif, tetapi tidak ada efek partisipasi yang jelas dalam program *linkage* tersebut.

4.11. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas

4.11.1. Pengaruh NPF terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan rasio NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas LKMS di Jawa Tengah pada tahun 2010 sampai 2018 dengan nilai NPF -0.11. Hal ini berarti bahwa semakin NPF naik 1% maka tidak akan menaikkan profitabilitas LKMS. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat dan Endang (2016) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap risiko bisnis bank syariah yang jika risiko kecil akan menyebabkan profitabilitas bank semakin tinggi. Demikian juga menurut Akbar, Moeljadi, dan Djazuli (2018) yang menyatakan bahwa besarnya NPF tidak mempunyai dampak penting terhadap ROA pada bank umum swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Uus (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, dengan kata lain jika NPF tinggi akan menyebabkan rendahnya profitabilitas yang dihasilkan oleh bank syariah.

4.11.2. Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas LKMS di Jawa Tengah pada tahun 2010-2018 dengan nilai CAR sebesar 0,50. Hal ini berarti bahwa semakin CAR naik 1% akan menaikkan profitabilitas sebesar 0,50. Hasil penelitian Menicucci, Elisa, dan Guido Paolucci (2016) menunjukkan bahwa rasio CAR berhubungan positif dengan profitabilitas. Bank yang memiliki modal cukup besar akan memiliki risiko yang lebih rendah karena apabila terjadi kegagalan pembayaran, modal tersebut dapat digunakan untuk menutup kerugiannya dan apabila risiko tersebut dapat teratasi dengan baik, lembaga keuangan akan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, penelitian Hidayat dan Endang (2016) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap risiko bisnis yang diukur menggunakan *return on asset* bulan tertentu dengan tingkat rata-rata ROA dalam setahun di bank umum syariah di Indonesia pada periode 2010 sampai 2014. Sedangkan hasil penelitian Kusumastuti dan Azhar Alam (2019) menjelaskan bahwa CAR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank Islam (studi kasus bank Islam di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017).

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan BMT tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka BMT tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

keberlangsungan usaha. Tingginya rasio modal dapat melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BMT.

4.11.3. Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas LKMS di Jawa Tengah pada 2010 sampai 2018, dengan nilai jumlah pembiayaan 2,47. Hal ini berarti bahwa jumlah pembiayaan naik 1% maka tidak akan menaikkan profitabilitas LKMS. Hasil ini menunjukkan secara empiris bahwa kenaikan pertumbuhan jumlah pembiayaan LKMS tidak berkontribusi terhadap kenaikan rasio profitabilitas. Hasil ini selaras dengan Riyadi dan Agung (2014) yang menyatakan bahwa jumlah pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah (BUS). Demikian juga Hidayat (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli pada BUS tidak berpengaruh terhadap rasio profitabilitas.

4.11.4. Pengaruh Jumlah Aset terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas LKMS di Jawa Tengah pada 2010 sampai 2018 dengan nilai total aset sebesar 34,52. Hal ini berarti jika jumlah aset naik 1% maka akan menyebabkan profitabilitas LKMS naik sebesar 34,52%. San dkk. (2013) menekankan di dalam penelitian studi kasus Malaysian Commercial Bank yang dilakukannya bahwa SIZE (total aset) adalah penentu profitabilitas bank. San dan Boon menjelaskan bahwa total aset memengaruhi profitabilitas bank di Malaysia secara positif. Sementara

itu, penelitian Muda, Muhamad, dkk. (2013) yang dilakukan di Malaysia Islamic Banks menghasilkan temuan bahwa ukuran bank memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ROA.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Menicucci, Elisa, dan Guido Polucci (2016) yang menunjukkan bahwa rasio modal dan ukuran bank (aset) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank di Eropa pada periode 2006 sampai 2015 melalui studi kasus 28 bank di Eropa dan satu bank terbesar di Uni Eropa. Hubungan yang positif antara ROA dan total aset juga didukung oleh Berger dan Humphrey (1997) yang menemukan bahwa bank yang lebih besar dapat mencapai skala ekonomi dan mencatat lebih tinggi profitabilitas.

Pertumbuhan aset mampu mendukung kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat. Semakin tinggi nilai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mengakibatkan profitabilitas juga akan semakin tinggi. Menurut Dendawijaya (2009) semakin besar ROA suatu BMT, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai BMT dan semakin baik posisi BMT tersebut dari segi penggunaan aset. Sedangkan menurut hasil penelitian Nurhasanah (2017), *asset growth* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai 2013.

4.11.5. Pengaruh Jumlah Cabang terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah cabang berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebesar 0,57. Hal ini berarti, apabila jumlah cabang pada LKMS naik sebesar 1% maka akan

menyebabkan peningkatan profitabilitas pada LKMS sebesar 0,57 atau 57%. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Hati, Kadina, dkk. (2017) dan Kuswara dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa *branch office* berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada bank di Indonesia dan bank syariah yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia.

Jumlah cabang adalah ukuran keberhasilan lembaga keuangan syariah yang berarti bahwa apabila lembaga keuangan syariah memiliki jumlah cabang banyak maka akan menyebabkan masyarakat lebih mudah menyetorkan dananya ke lembaga keuangan syariah sehingga secara langsung hal tersebut akan meningkatkan pendapatan bagi lembaga keuangan syariah tersebut. Menurut Aryanto (2010), semakin banyak jumlah cabang akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan lembaga keuangan.

4.12. Pengaruh Program *Linkage* terhadap BOPO

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program *linkage* berpengaruh positif terhadap BOPO sebesar 0,017854. Hal ini berarti bahwa semakin program *linkage* bertambah 1% akan menyebabkan BOPO bertambah sebesar 0,017854. Sama halnya dengan justifikasi pertama yang menyatakan bahwa program *linkage* berpengaruh terhadap profitabilitas, tetapi secara negatif. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Ndiege dkk. (2014) yang menjelaskan bahwa semakin *less formal financial institutions* menggunakan program *linkage* maka semakin menjadi tidak berkelanjutan. Hal ini menyiratkan bahwa untuk menjadi lembaga yang berkelanjutan, *less formal financial institutions* harus

berusaha menjauh penggunaan dana eksternal dalam portofolio pinjaman mereka.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika lembaga keuangan syariah tidak efektif dalam penyaluran dana maka akan menyebabkan profitabilitas berkurang serta secara langsung akan mengakibatkan bertambahnya beban operasional lembaga keuangan syariah tersebut.

4.13. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap BOPO

4.13.1. Pengaruh NPF terhadap BOPO

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio NPF tidak berpengaruh terhadap rasio BOPO LKMS di Jawa Tengah pada 2010 sampai 2018. Hal ini berarti bahwa kenaikan rasio NPF sebesar 1% maka tidak akan menurunkan rasio BOPO LKMS. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wahab (2015) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi bank syariah yang artinya semakin tinggi rasio NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi bank umum syariah. Kondisi ini menunjukkan BUS telah menggunakan dananya dengan baik. Adapun tingkat efisiensi diukur dengan menggunakan rasio BOPO.

4.13.2. Pengaruh CAR terhadap BOPO

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap rasio BOPO, artinya setiap kenaikan rasio CAR sebesar 1% tidak memengaruhi tingkat efisiensi (BOPO) pada LKMS di Jawa Tengah. Dengan demikian tingkat efisiensi LKMS yang diukur dengan rasio biaya operasional atau BOPO tidak dipengaruhi oleh

besar rasio kecukupan modal (CAR) yang dimiliki LKMS. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Migustin (2017) yang menunjukkan bahwa rasio CAR tidak berpengaruh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap rasio BOPO pada bank umum di Indonesia.

4.13.3. Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap BOPO

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total pembiayaan berpengaruh negatif terhadap BOPO sebesar -6,86 yang artinya apabila total pembiayaan bertambah 1% akan mengurangi BOPO sebesar 6,86. Dapat disimpulkan bahwa apabila lembaga keuangan syariah efisien dalam pengelolaan penyaluran dana maka akan mengakibatkan pengurangan terhadap BOPO suatu lembaga keuangan. Sebaliknya, apabila penyaluran dana dilakukan secara tidak efisien maka akan mengakibatkan kenaikan terhadap BOPO.

Menurut Kepala Departemen Pengawasan IKNB OJK (2019), sumber penurunan BOPO merupakan dampak dari peningkatan pendapatan operasional dari lembaga keuangan yang fokus pada penagihan pembiayaan di tengah perlambatan pertumbuhan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Muljawan dkk. (2014) yang menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap efisiensi bank walaupun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan semakin besar nilai pembiayaan akan semakin tinggi risiko pembiayaan yang berakibat bank akan memperketat jumlah pembiayaan yang akan disalurkan sehingga akan mengurangi peluang profit dan akan menurunkan efisiensi dari operasional bank. Sementara itu hasil penelitian Hartomo dan Dewi (2018)

menunjukkan bahwa pembiayaan tidak memengaruhi *pure technical efficiency* pada bank umum syariah di Indonesia.

4.13.4. Pengaruh Jumlah Aset terhadap BOPO

Total aset pada hasil penelitian ini berpengaruh negatif terhadap BOPO sebesar -13,09 yang artinya bahwa apabila aset naik 1%, akan menaikkan BOPO sebesar 13,09. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Muljawan dkk. (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan nilai aset, memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi operasional bank walaupun tidak signifikan.

4.13.5. Pengaruh Jumlah Cabang terhadap BOPO

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah cabang berpengaruh terhadap BOPO secara negatif sebesar -0,15, yang artinya apabila jumlah cabang meningkat 1% akan menurunkan beban operasional sebesar 15%. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Lutfiana dan Yulianto (2015) yang menunjukkan bahwa jumlah cabang bank tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi pada bank syariah di Indonesia. Semakin efektif dan efisien lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan risiko dan keuangan akan meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah tersebut dan secara langsung akan mengurangi beban operasional suatu lembaga keuangan. Namun, sebaliknya apabila lembaga tersebut tidak mampu mengelola risiko dan keuangan dengan baik, akan meningkatkan beban operasional suatu lembaga keuangan yang secara langsung menurunkan profitabilitas lembaga keuangan tersebut.

4.14. Program *Linkage* dan Kinerja Keuangan

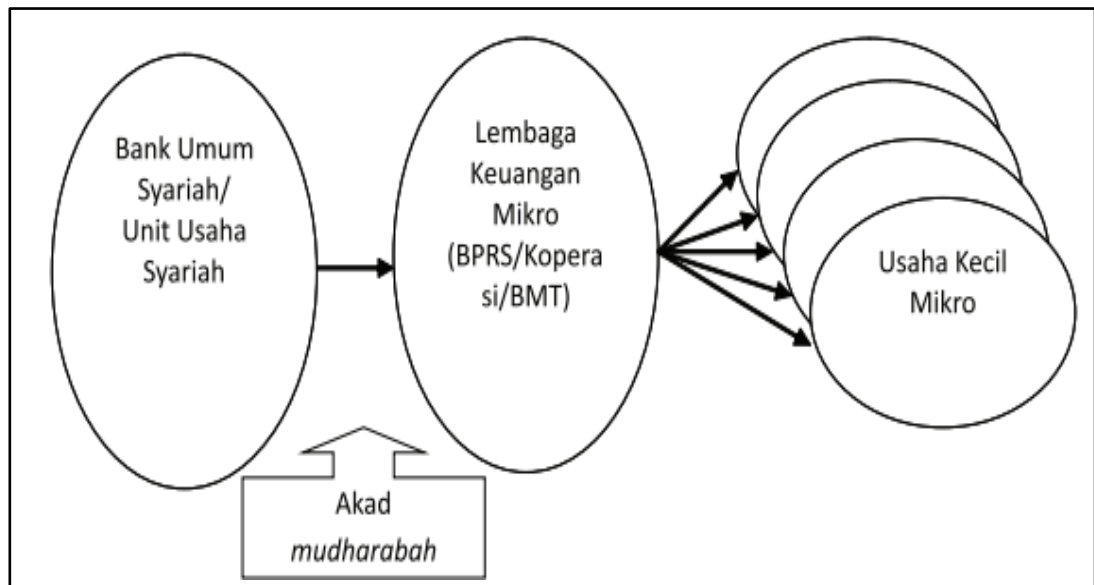
4.14.1. Analisis Program *Linkage* terhadap *Sustainabilitas* LKMS di Jawa Tengah

Program *linkage* merupakan kerja sama yang dilaksanakan bank umum dengan lembaga keuangan mikro (LKM) dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro dan kecil (UMK). Arsitektur Perbankan Indonesia (API, 2010) mengeluarkan *generic model program linkage* yang berisi mengenai aturan-aturan pelaksanaan program *linkage* antara bank umum dan lembaga keuangan mikro sehingga penerapan program *linkage* semakin jelas dan terarah. Salah satu aturannya adalah ditetapkannya tiga *skim* dalam melaksanakan program *linkage*, yaitu *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Dalam pola *executing*, bank syariah memberikan pembiayaan kepada LKMS untuk diteruskan kepada UMK. LKMS diberikan kewenangan untuk memutuskan calon mitra yang akan mendapat fasilitas pembiayaan dan sebagai konsekuensinya risiko juga ditanggung oleh pihak BPR serta untuk pencatatan di bank umum sebagai pembiayaan ke LKMS.

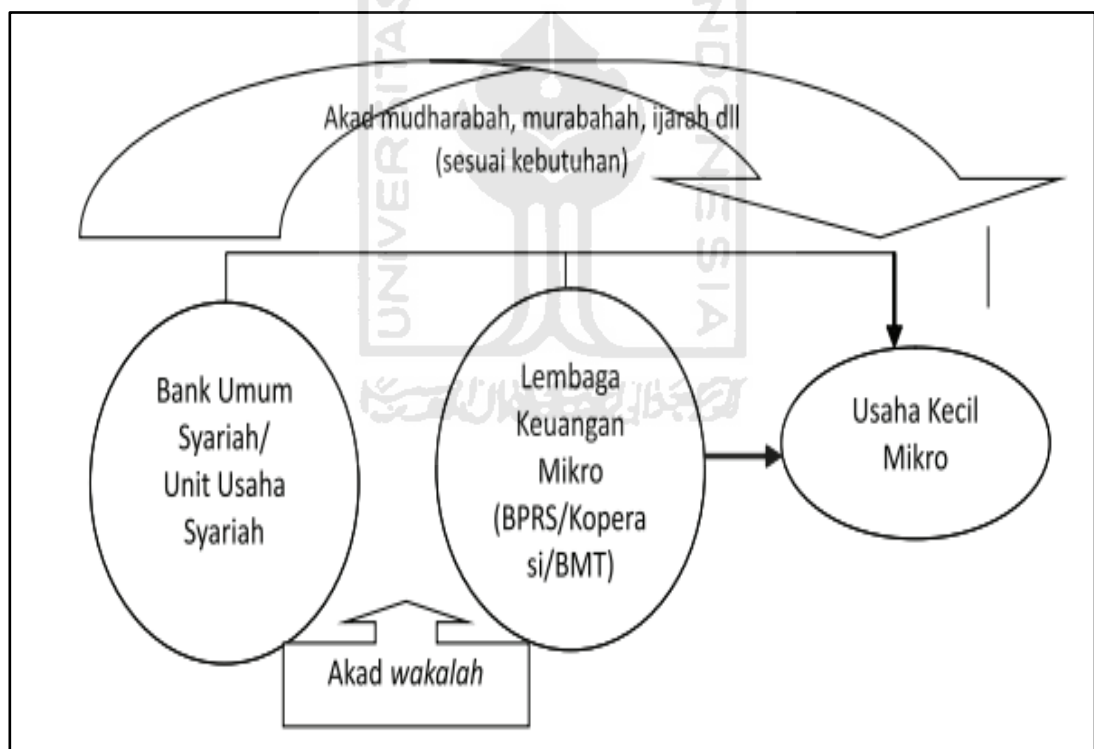
Menurut PBI No. 14/22/PBI/2012 dan PBI No. 17/12/PBI/2015, program *linkage* dengan menggunakan *executing* mempunyai persyaratan, yaitu:

Pola Linkage	Evaluasi Linkage
Executing	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyaluran atau pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM dilakukan oleh lembaga keuangan tertentu, pada penelitian ini adalah LKMS. b) Lembaga keuangan tertentu (LKMS) sebagaimana pada poin pertama merupakan pihak yang menanggung risiko apabila mitra atau debitur UMKM <i>wanprestasi</i> atau cedera janji. c) Penentuan nisbah bagi hasil bagi anggota menurut kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor usaha UMKM tersebut, hal ini dituangkan ke dalam akad atau perjanjian kerja sama. d) Distribusi pendapatan sesuai dengan nisbah yang disepakati BUS dengan LKMS, hal ini dituangkan ke dalam akad atau perjanjian kerja sama. e) Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (<i>normal business loss</i>) maka risiko ditanggung oleh KJKS/UJKS-Koperasi. f) Distribusi pendapatan, sesuai dengan nisbah yang disepakati antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi. g) Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi anggota koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai.

Jika melihat dari aturan tersebut, apabila semakin banyak LKMS yang menggunakan pola *linkage executing* maka LKMS harus menanggung risiko apabila mitra melakukan *wanpretasi*. *Wanprestasi* ini akan menyebabkan profitabilitas LKMS menurun dan beban operasional semakin bertambah. Seberapa besar *wanprestasi* yang dilakukan oleh mitra atau bahkan jika LKMS tidak bisa mengatur keuangan dengan baik juga akan menyebabkan sustainabilitas semakin menurun.



Gambar 4.9 *Skim Executing* pada Program *Linkage*
 Sumber: Badan Hukum (dalam Hamidah, 2015).



Gambar 4.10 *Skim Channeling* pada Program *Linkage*
 Sumber: Badan Hukum (dalam Hamidah, 2015)

Berdasarkan gambar *skim* di atas maka program *linkage* dengan menggunakan *channeling* mempunyai syarat, yaitu:

Pola <i>Linkage</i>	Evaluasi <i>Linkage</i>
Channeling	<ul style="list-style-type: none"> a. Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi: apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (<i>normal business loss</i>) maka risiko ditanggung oleh BUS/UUS. b. Distribusi pendapatan: BUS/UUS memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati dengan UMK. c. KJKS/UJKS-Koperasi mendapatkan <i>fee</i> yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi. d. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi anggota koperasi merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai.

Berdasarkan aturan PBI dan edaran OJK dan PBI tentang *program linkage*, apabila semakin banyak LKMS menggunakan pola program *linkage channeling* maka LKMS tidak harus menanggung risiko apabila mitra atau anggota LKMS melakukan *wanpretasi* karena risiko kegagalan pembayaran akan ditanggung oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah sehingga tidak akan memengaruhi keuangan LKMS baik modal, profit, maupun beban operasional. Namun, akan memengaruhi secara nonmaterial, yaitu kepercayaan BUS terhadap LKMS akan semakin menurun karena dianggap lalai dalam pemilihan mitra untuk dijadikan mitra pembiayaan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menentukan koperasi yang dapat mengikuti program *linkage*, yaitu:

- 1) telah menggunakan sistem syariah;
- 2) pengikatan menggunakan akad syariah;

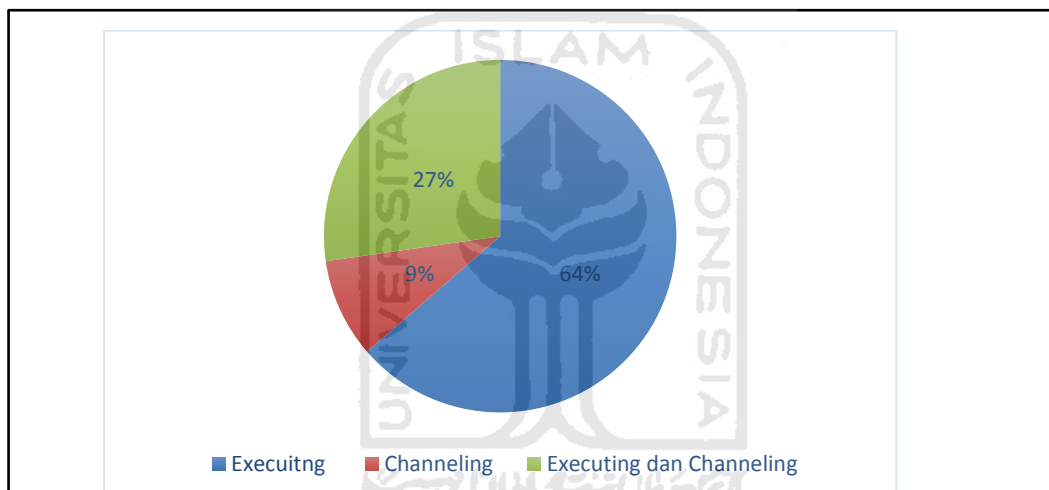
- 3) sudah berbadan hukum minimal 2 tahun;
- 4) bagi hasil selama minimal 2 tahun terakhir;
- 5) koperasi dengan *outstanding* pembiayaan yang diberikan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau koperasi jasa audit dan diumumkan kepada anggotanya;
- 6) *non-performing* maksimum 5% (lima per seratus);
- 7) mempunyai anggota tetap minimal sebanyak 100 orang.

Apabila menelaah lebih lanjut dari PBI No 17/12/PBI/2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/35/DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 tentang syarat koperasi yang dapat mengikuti program *linkage*, terdapat beberapa temuan yang akan dijabarkan ke dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Di dalam penelitian ini, terdapat 32 (tiga puluh dua) LKMS di Jawa Tengah yang menggunakan program *linkage* sebagai upaya alternatif penambahan modal usaha untuk disalurkan ke dalam pembiayaan secara mikro.
2. Dari ketiga jenis *skim* (*executing*, *channeling*, dan *joint financing*) hanya dua yang digunakan sebagai program penyaluran pembiayaan di dalam LKMS, yaitu *executing* dan *channeling*. Dari 32 (tiga puluh dua) LKMS, terdapat 2 (dua) menggunakan *executing* dan *channeling*; 5 (lima) tidak menggunakan program *linkage*; 1 (satu) menggunakan *channeling*; dan 24 (dua puluh empat) LKMS menggunakan *executing* (hasil Lampiran 1).
3. Dari 32 (tiga puluh dua) LKMS, terdapat 10 (sepuluh) LKMS yang mempunyai rata-rata NPF maksimal 5%, sisanya 22 (dua puluh dua) LKMS memiliki NPF rata-rata sebesar $> 5\% < 10\%$ (hasil Lampiran 1).

4. Jumlah Pembiayaan rata-rata dari 32 (tiga puluh dua) LKMS terdapat 8 (delapan) LKMS yang memiliki jumlah pembiayaan rata-rata > 1 (satu) miliar < 5 (lima) miliar, sedangkan yang memiliki jumlah pembiayaan rata-rata > 5 miliar < 10 miliar ada 8 (delapan) LKMS, dan untuk 16 LKMS memiliki jumlah pembiayaan rata-rata *outstanding* > 10 (sepuluh) miliar.

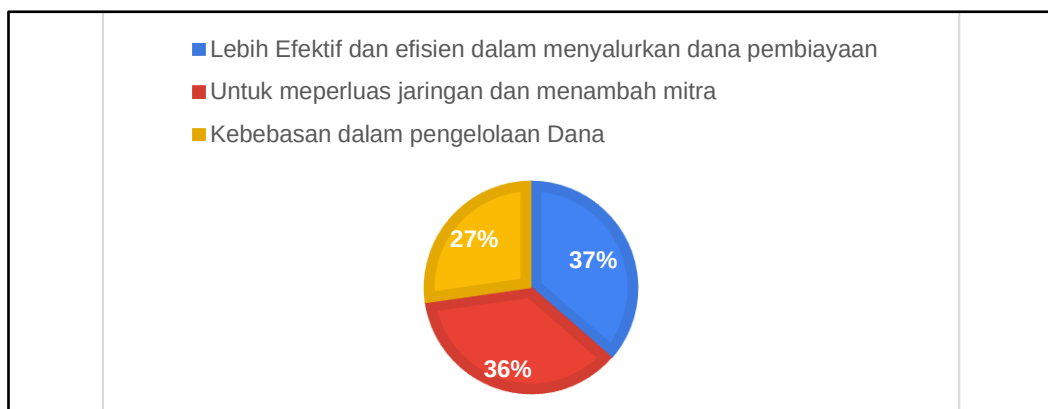
Berdasarkan penjabaran pembahasan di atas, dapat dianalisis bahwa LKMS di Jawa Tengah lebih banyak menggunakan pola program *linkage* dengan pola *executing* dibanding *channeling*.



Gambar 4.11 Model Program *Linkage* yang digunakan BMT di Jawa Tengah
Sumber: Data Diolah (2020)

Menurut hasil survei dengan menggunakan Google Form (2020), model program *linkage* yang banyak digunakan oleh BMT atau LKMS adalah *executing* sebesar 64%, sedangkan LKMS yang menggunakan *executing* dan *channeling* ada 27 %, serta LKMS yang menggunakan *channeling* sebesar 9 %.

Dari data di atas dapat dijelaskan mengapa LKMS menggunakan program *linkage* sebagai program di LKMS mereka.



Gambar 4.12 Alasan LKMS menggunakan Program *Linkage*
Sumber: Data Diolah (2020)

Menurut hasil wawancara dengan LKMS dapat diketahui bahwa alasan LKMS menggunakan program *linkage* adalah: sebanyak 37% menyatakan lebih efektif dan efisien dalam menggunakan program *linkage*; 36% menyatakan penggunaan program *linkage* bertujuan untuk memperluas jaringan dan menambah mitra (nasabah); dan 27% menyatakan bahwa tujuan menggunakan program *linkage* adalah agar LKMS bebas dalam mengelola dana dan tidak terpengaruh oleh bank sebagai *shohibul maal*. Sedangkan berkenaan dengan apakah penggunaan program *linkage* dapat menambah profitabilitas terhadap LKMS maka jawaban mereka adalah sebagai berikut:

No.	Uraian
1	Program <i>linkage</i> tidak dapat meningkatkan profitabilitas dikarenakan beban operasional yang bertambah banyak.
2	Profit dari dana program <i>linkage</i> tidak sebesar profit yang bersumber dari dana anggota karena margin dana yang berasal dari program <i>linkage</i> terlalu tinggi dibandingkan dana yang berasal dari anggota.
3	<i>Cash collateral</i> yang besarnya mencapai 10% dari <i>plafond</i> pembiayaan serta biaya yang menyertainya, membuat keuntungan BMT menjadi semakin kecil.
4	Biaya yang ditimbulkan akibat program <i>linkage</i> lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Hal ini di antaranya disebabkan adanya angsuran anggota yang tidak lancar, sedangkan kewajiban angsuran ke pihak tiga tetap harus dipenuhi.

Sumber: Data Diolah (2020)

Dari hasil di atas maka dapat dijabarkan kembali alasan program *linkage* tetap dipilih meskipun tidak terlalu berpengaruh positif terhadap profitabilitas LKMS, jawaban mereka adalah sebagai berikut:

No.	Uraian
1.	Adanya kebutuhan dana untuk likuiditas.
2.	Adanya kebutuhan dana untuk penambahan modal kerja yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota.
3.	Dana yang berasal dari program <i>linkage</i> biasanya terjadwal secara jelas pengembaliannya sehingga memudahkan untuk melakukan manajemen dananya, sedangkan kalau dana dari anggota tidak jelas pengambilannya sehingga susah untuk diprediksi.
4.	Program <i>linkage</i> tetap dilakukan karena untuk memperluas jaringan dan menambah mitra.

Sumber: Data Diolah (2020)

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa program *linkage* yang dikelola oleh BMT tidak menimbulkan pengaruh positif di sisi profitabilitas, bahkan ada LKMS yang menyatakan menghentikan program *linkage* dengan alasan beban operasional dan NPF yang cukup tinggi bagi LKMS mereka.

Apabila melihat aturan yang sudah diedarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan maka pola *executing* lebih banyak menimbulkan kerugian di posisi LKMS dibanding pola *channeling* karena di dalam pola *executing* apabila LKMS tidak mampu mengatur dari sisi keuangan dan operasional bahkan analisis pembiayaannya, atau jika mitra melakukan wanprestasi atau kegagalan pembayaran (*normal business loss*) maka LKMS yang akan menanggung kerugian pembiayaan. LKMS juga tetap harus membayar distribusi pendapatan sesuai *nisbah* bagi hasil ke bank umum syariah berdasarkan jatuh tempo. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa

apabila kegagalan pembayaran (*non-performing financing*) LKMS semakin tinggi maka akan menimbulkan penurunan pada sustainabilitas LKMS yang dikarenakan rasio profit menurun dan beban operasional tinggi.

Menurut data penelitian pada 32 (tiga puluh dua) LKMS dari tahun 2010 sampai 2018, hanya 10 LKMS yang memiliki NPF kurang dari 5% sesuai aturan OJK dan BI, sisanya memiliki NPF yang lebih dari 5%. Apabila hal tersebut terus-menerus terjadi maka akan mengakibatkan kebangkrutan pada LKMS dan secara langsung akan merugikan anggota atau mitra penabung secara material serta menurunkan tingkat kepercayaan anggota

Dalam proses analisis pembiayaan, seharusnya LKMS lebih mengutamakan menggunakan prinsip 5 C + 1 *Shariah Compliance* serta 7P agar dapat meminimalkan tingkat risiko kegagalan pembayaran dengan kerja sama program *linkage (executing)*. Prinsip 5 C + 1 *Shariah Compliance*, yaitu: *character, capacity, capital, condition, collateral*, dan *sharia complence*. Sedangkan prinsip 7P, yaitu *personality, purpose, party, payment, prospect, profitability*, dan *protection*.

Bentuk hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*) yang dibangun atas dasar perspektif Islam dalam ekonomi syariah adalah masing-masing pihak berusaha untuk saling berperan dalam menciptakan keadaan yang lebih baik dengan berupaya secara maksimal memperkecil risiko kegagalan usaha dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian.

Kegiatan usaha LKMS dapat berjalan berkelanjutan apabila didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang kuat sebagai penunjang

pemberdayaan LKMS. Dukungan infrastruktur kelembagaan yang memadai terhadap aktivitas keuangan mikro terbukti mampu menumbuhkan industri tersebut secara sehat.

Mengingat kegiatan LKMS berkaitan erat dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan maka setiap pelaku BMT diharapkan tetap menjaga kepercayaan tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini akan terjaga apabila BMT diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya. Atas dasar itu, LKMS harus diatur dan diawasi dengan ketat.

Pentingnya pengawasan terutama untuk melindungi mitra dan menghindari *moral hazard* sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan antara lembaga dan nasabah. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif membutuhkan adanya pengawas dengan kompetensi khusus karena aspek-aspek yang diawasi sangat spesifik dan rinci. Pengawasan terhadap LKMS dapat berjalan efektif apabila dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan melalui pembentukan atau penunjukan suatu lembaga eksternal yang independen untuk menilai tingkat kesehatan LKMS. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Keberlangsungan dan kemajuan LKMS tidak terlepas dari pengorganisasian yang profesional dan pengimplementasian strategi yang komprehensif dalam memosisikan LKMS sebagai salah satu institusi intermediasi keuangan mikro yang praktis dan diminati oleh masyarakat.

Hal ini merupakan stimulasi dalam pengembangan LKMS ke depan agar konsisten dalam merealisasikan pembiayaan dan pendanaan bagi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah. Dengan demikian, sustainabilitas LKMS dapat melahirkan *image* positif masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengembangkan.

4.14.2. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Sustainabilitas LKMS di Jawa Tengah

Kinerja keuangan merupakan pembentuk sustainabilitas LKMS. Beberapa kajian tentang kinerja lembaga sebagai pembentuk sustainabilitas dapat dibedakan dengan titik tekan kinerja yang berbeda. LKMS berbeda signifikan dengan industri perbankan, selain itu LKM adalah anggota maka operasional LKMS berdasarkan anggota dan pengurus. Kinerja LKMS yang berhasil lebih ditekankan pada syarat-syarat utama, seperti syarat bagi pengelola dan manajer yang siap sedia untuk menyempurnakan proses pencapaian hasil.

Kinerja LKM lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara eksternal, kinerja lembaga dipengaruhi oleh faktor regulasi penerapan supervisi yang efektif yang dibentuk oleh indikator kecukupan regulasi dengan prinsip-prinsip kehati-hatian serta penerapan standar keuangan. Secara kinerja, LKMS dipengaruhi oleh kapasitas lembaga. Sedangkan kapasitas internal tercermin pada kualitas SDM yang dimiliki oleh LKMS, seperti tingkat pendidikan, frekuensi latihan, jangkauan pasar, inovasi produk, manajemen operasional, penguatan permodalan, dan kondisi perekonomian.

Kinerja keuangan di dalam penelitian ini adalah *non-performing financing*, *capital adequacy ratio*, jumlah aset, jumlah pembiayaan, dan jumlah cabang yang secara langsung berpengaruh terhadap sustainabilitas LKMS dalam menjalankan usaha berprinsip syariahnya. Apabila *non-performing financing* mengalami kenaikan maka akan memengaruhi penurunan sustainabilitas LKMS. Sedangkan apabila CAR, jumlah aset, jumlah pembiayaan dan jumlah cabang mengalami peningkatan maka akan berpengaruh positif terhadap sustainabilitas LKMS karena semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS kepada mitra akan meningkatkan pendapatan LKMS yang secara langsung akan meningkatkan total aset dan permodalan LKMS. Selain itu, apabila pengelolaan manajemen di dalam jumlah cabang meningkat juga akan memengaruhi tingkat sustainabilitas karena secara langsung kepercayaan mitra terhadap LKMS tersebut tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 32 (tiga puluh dua) LKMS dengan: 8 (delapan) LKMS yang memiliki jumlah pembiayaan rata-rata > 1 (satu) miliar < 5 (lima) miliar; 8 (delapan) LKMS memiliki jumlah pembiayaan rata-rata > 5 miliar < 10 milyar; dan 16 LKMS memiliki jumlah pembiayaan rata-rata *outstanding* > 10 (sepuluh) miliar. Sedangkan LKMS yang memiliki *capital adequacy* lebih dari 8% yaitu sebanyak 26 LKMS sisanya dinyatakan tidak sehat dan kurang sehat karena memiliki CAR kurang dari 8%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dianalisis bahwa dari 32 (tiga puluh dua) LKMS, yang memiliki kecukupan modal hanya 26 LKMS yang terdiri dari 16 LKMS memiliki jumlah pembiayaan *outstanding* lebih dari 10 miliar dan sisanya kurang dari 10 miliar. Apabila jumlah pembiayaan semakin besar maka akan menyebabkan modal atau kecukupan modal semakin besar pula, jika LKMS mampu mengelola manajemen

keuangan dengan baik. Namun, jika LKMS tidak mampu mengelola dana dengan baik dan efisien maka akan menyebabkan penurunan terhadap kecukupan modal dan hal itu berarti pula sustainabilitas LKMS akan semakin menurun.

Menurut tim akreditasi BMT se-Indonesia, dari 32 objek penelitian, 25 di antaranya telah memiliki sertifikat *Islamic Microfinance Standard* (IMS), sedangkan 7 lainnya dalam proses pengajuan dan akreditasi ulang. Semakin banyak LKMS di Jawa Tengah mendapatkan sertifikat *Islamic Microfinance Standard* (IMS) maka dapat diartikan bahwa pengelolaan, *corporate governance*, kepatuhan syariat, dan manajemen BMT semakin baik. Hal ini secara langsung akan menaikkan sustainabilitas LKMS itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program *linkage* terhadap sustainabilitas usaha LKMS. Analisis dilakukan dengan meregresikan secara *dummy* serta menganalisis rasio keuangan setelah mengikuti program *linkage* dengan sampel LKMS di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis pengujian, dapat dibuat beberapa kesimpulan:

1. Program *linkage* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan berpengaruh positif terhadap beban operasional. Hal ini berarti, program *linkage*, *executing* dan *channeling*, menurunkan kinerja profitabilitas LKMS. Sebaliknya, program *linkage* meningkatkan efisiensi LKMS dari sisi BOPO.
2. Variabel CAR, jumlah aset, dan jumlah cabang berpengaruh positif terhadap sustainabilitas usaha LKMS pada sisi profitabilitas. Sedangkan variabel jumlah pembiayaan, jumlah aset, dan jumlah cabang berpengaruh negatif terhadap sustainabilitas pada sisi beban operasional.
3. Secara simultan terbukti bahwa NPF, CAR, jumlah pembiayaan, jumlah aset, dan jumlah cabang berpengaruh terhadap sustainabilitas usaha LKMS, baik pada sisi profitabilitas maupun beban operasional.
4. Model program *linkage* yang banyak digunakan oleh LKMS adalah *executing* dibandingkan dengan *channeling*. *Executing* memberikan

kebebasan pembiayaan kepada anggota atau nasabahnya tanpa dipengaruhi oleh pihak lembaga keuangan.

5. Program *linkage* tetap dipilih dengan alasan adanya kebutuhan dana untuk likuiditas, adanya kebutuhan dana untuk pembiayaan. Dana yang berasal dari program *linkage* terjadwal secara jelas pengembaliannya sehingga memudahkan untuk melakukan pengelolaan dana serta memperluas jaringan dan menambah mitra.
6. Program *linkage* tidak memberikan kemanfaatan yang banyak sehingga tidak perlu dilakukan, lebih baik mengoptimalkan potensi dana dari anggota atau nasabahnya.

5.2. Implikasi Hasil Penelitian

5.2.1. Implikasi Teoretis

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan maka implikasi teoretis yang dapat dinyatakan adalah bahwa program *linkage* berpengaruh terhadap sustainabilitas usaha. Hal ini ditandai dengan:

1. Kinerja profitabilitas LKMS di Jawa Tengah mengalami penurunan setelah pelaksanaan program *linkage* karena kenaikan profitabilitas lebih dipengaruhi oleh CAR, total aset, dan jumlah cabang.
2. Kinerja BOPO LKMS di Jawa Tengah mengalami kenaikan setelah pelaksanaan program *linkage* karena efisiensi usaha selain dipengaruhi oleh program *linkage* juga dipengaruhi jumlah pembiayaan, total aset, dan jumlah cabang.

5.2.2. Implikasi Manajerial dan Saran

Secara umum, hasil uji menunjukkan bahwa program *linkage* berpengaruh negatif terhadap sustainabilitas di sisi profit dan berpengaruh positif di sisi BOPO LKMS di Jawa Tengah pada 2010 sampai 2018. Penurunan tingkat profitabilitas bisa jadi dikarenakan kesalahan analisis pembiayaan serta pengambilan keputusan dalam pemilihan program *linkage*. Dari ketiga jenis program (*executing*, *channeling*, dan *joint financing*) hanya dua yang digunakan sebagai program penyaluran pembiayaan di dalam LKMS, yaitu *executing* dan *channeling*. Dari 32 (tiga puluh dua) LKMS, terdapat 2 (dua) menggunakan *executing* dan *channeling*; 5 (lima) tidak menggunakan *program linkage*; 1 (satu) menggunakan *channeling*; dan 24 (dua puluh empat) LKMS menggunakan *executing*. LKMS sebaiknya tidak menggunakan *program linkage* jika terjadi penurunan profitabilitas secara terus-menerus dikarenakan akan menyebabkan kebangkrutan atau ketidakpercayaan mitra terhadap LKMS tersebut.

Model ideal yang disarankan dalam menjaga sustainabilitas usaha LKMS di Jawa Tengah adalah meningkatkan program *linkage* dengan model *join financing*. Dalam model tersebut, kedua belah pihak sama-sama menyertakan modalnya dan melakukan pengelolaan dalam usaha sehingga memberikan nilai manfaat bagi lembaga keuangan maupun LKMS.

5.3. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi model baru tentang program *linkage* yang dilakukan oleh lembaga keuangan

syariah, baik *channeling*, *executing*, maupun *joint financing* yang memberikan manfaat kepada tingkat sustainabilitas LKMS di Jawa Tengah

Model *channeling* dan *executing* yang selama ini dilakukan ternyata tidak memberikan manfaat yang banyak kepada LKMS, baik dari sisi profitabilitas maupun BOPO. Agar LKMS dapat merasakan manfaat yang lebih banyak maka harus mengoptimalkan dana anggota atau masyarakat. Bilamana harus melakukan *linkage*, maka model yang tepat digunakan adalah *joint financing* dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

5.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada laporan keuangan yang hanya terbatas maksimal 9 tahun pelaksanaan program *linkage* dan analisis 9 tahun setelah PL. Keterbatasan juga terdapat pada jumlah sampel yang hanya 32 sampel sehingga baru terlihat cukup tampak pengaruh program *linkage* terhadap sustainabilitas LKMS. Sedangkan pada aspek metode analisis, penelitian ini tidak menggunakan data panel periodik sehingga tidak mampu menggambarkan perkembangan kinerja profitabilitas secara periodik, untuk itu ke depan penelitian tentang sustainabilitas usaha LKMS bisa menggunakan data kinerja periodik triwulan.

5.5. Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian yang sama di masa mendatang diharapkan dapat menggunakan periode program *linkage* yang lebih lama dan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga diharapkan dapat terlihat pengaruh yang lebih baik dari program *linkage* terhadap sustainabilitas usaha LKMS.

DAFTAR PUSTAKA.

- Adnan, Muhammad, A., Agus, W., and Bekti, H. A. (2003). Study on factors influencing performance of the best baitul maal wat tamwils [BMTS] in Indonesia. *Jurnal Iqtisad* 4. (1) 34-46
- Adnan, Muhammad A, and Shochrul, R. A. (2015). The effectiveness of baitul maal wat tamwil in reducing poverty: the case of indonesian Islamic microfinance institution. *Humanomics* 31.2 160-182.
- Ahmed H. (2002). financing microenterprises: an analytical studi of Islamic microfinance institutions. *Islamic Economic Studies*. 9 (2): 27-64
- Albaity, M., & Ahmad, R. (2008). Performance of syariah and composite indices: evidence from bursa Malaysia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 4 (1), 23-43.
- Almilia, L. S., & Herdiningtyas, W. (2005). Analisis rasio CAMEL terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2000-2002, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 7, No. 2.
- Asian Development Bank (ADB). (2000). Finance for the poor, microfinance development strategy. ADB. Manila.
- Arifin, J. (2013). Hubungan hukum kemitraan dalam program *linkage* perbankan syari'ah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2), 43-54.
- Amir, J.U. (2002), *Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan* Penerbit Pers, Universitas Negeri Makassar (Makassar, 2002), h. 12.
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). The access of msme towards Islamic microfinancing and its impact on business development: a case of bmt tadbiirul ummah, Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1 (1), 56-67.
- Anita, F., dan Rahadian, Z. (2003), Analisis kinerja keuangan bank devisa dan bank non devisa di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan* vol. 7 no. 4 (Jakarta: 2003), h. 27
- Antonio, M. S, Yulizar D. Sanrego, and Muhammad, T. (2012). An analysis of Islamic banking performance: maqashid index implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance* 1.1
- Anonim, (2013) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang lembaga keuangan Mikro*.

- Anik, S (2004), Indikasi manajemen laba (earnings management) dan hubungannya dengan kinerja operasi di sekitar initial public offering (ipo) pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Jakarta, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 5, No. 2, pp. 199-219
- Apriadi, F., & Alexandi, M. F. (2013). Solusi peningkatan sumber daya manusia pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia melalui pendekatan *Analytic Network Process (ANP)*. *Al-Muzara'ah*, 1 (2), 107-118.
- Arsitektur Perbankan Indonesia, (2010). *Generic Model Program linkage*, antara Bank Umum Konvensional/Syariah/Unit Usaha Syariah & Bpr Konvensional/Syariah, Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Tim Arsitektur Perbankan Indonesia
- Az-Zuhaili, W. M., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Gema Insani.
- Bakhtiari, S. (2006). Microfinance and Poverty Reduction: Some International Evidence. *International Business and Economics Research Journal*, 5 (12), 65.
- Bansal, H. (2013). SGH-Bank *Program linkage* in India: An overview. *Journal of Microfinance/ESR Review*, 5 (1), 3.
- Bank Indonesia, (2006), *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 4, No. 5, April, pp. vii-xii
- Bank Indonesia (2010). *Generic Model Program linkage*, Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia (2010). *Linkage antar LKS*. Jakarta: Bank Indonesia
- Barbier, E. B. (1987). The Concept of Sustainable Economic Development. *Environmental Conservation Journal*, 14 (2), 101-110.
- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Battat, J., Frank, I., & Shen, X. (1996). Suppliers to Multinationals: *Program linkages* to Strengthen Local Companies in Developing Countries. *The World Bank*. 13 (1), 101-112
- Battilana, J., & Dorado, S. (2010). Building Sustainable Hybrid Organizations: The Case of Commercial Microfinance Organizations. *Academy of Management Journal*, 53 (6), 1419-1440.
- Ben N, S., & Goaid, M. (2008). The Determinants of Commercial Bank Interest Margin and Profitability: Evidence From Tunisia. *Frontiers in Finance and Economics*, 5 (1), 106-130.

- Berger dan Humphrey, 1997, Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, *European Journal of Operational Research*, Elsevier, vol. 98 (2), pages 175-212, April.
- Bhanot, D., & Bapat, V. (2015). Sustainability Index of Micro Finance Institutions (MFIs) and Contributory Factors. *International Journal of Social Economics*, 42 (4), 387-403.
- Bowman dan Haire, 1976, *Social Impact Disclosure and Corporate Annual Reports, Accounting, Organizations and Society*, Volume 1, Issue 1, 1976, Pages 11-21
- Buddelmeyer, H., Jensen, P. H., Oguzoglu, U., & Webster, E. (2008). Fixed Effects Bias in Panel Data Estimators. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 44 (3), 417-436.
- Buchori A. (2012). *Program linkage Bank Syariah-BMT Solusi Financial Inclusion Bagi UMK*. *Majalah perbankan* 5 (6), Bank Indonesia
- Cahyadi, Thalib Noor, and Lincoln Arsyad (2010). *Signifikansi Ombudsman Dalam Menegakkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Atas Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dissertasi. Universitas Gadjah Mada. Tidak diterbitkan
- Campion, A. (2002). Challenges to Microfinance Commercialization, *Journal of Microfinance*. Vol. 4 (2), pp. 57
- Chaves, Rodrigo A & Claudio Gonzales-Vega. (1996). The Design of Successful Rural Financial Intermediaries: Evidence from Indonesia. *World Development*, 24 (1): 65-78.
- Cokro, W. B. M., & Ismail, A. G. (2008). Sustainability of BMT financing for Developing Micro-Enterprises. *Emerald, Insight* 8.9-11.
- Copestake, J. (2007). Mainstreaming microfinance: Social Performance Management or Mission Drift? *World Development*, 35 (10), 1721-1738.
- Cull R, Demirguc-Kunt A, Morduch J. (2009). *Microfinance Trade offs Regulation, Competition, and Financing*. Policy Research Working Paper. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Team.
- Dendawijaya 2009, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djazuli dan Yadi Janwari, (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. h. 170
- El-Komi M, Croson R. (2012). Experiments in Islamic Microfinance. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 95: 252-269.

- Elfakhani, S., Hassan, M. K., & Sidani, Y. (2005). Comparative Performance of Islamic Versus Secular Mutual Funds. In *12th Economic Research Forum Conference in Cairo, Egypt* (Vol. 53, pp. 19-21).
- Euis Amalia (2009), *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Faozan, A. (2014). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *La_Riba*, 7 (1), 1-14.
- Forum Riset Perbankan Syariah Ke-4*, (2011), Universitas Padjadjaran Bandung
- Ghozali, I. (2006). *Structural Equation Modeling Metode Alaternatif Dengan Partial Least Square PLS*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2008). *Basic Econometrics*, New York: McGraw-Hill.
- Gujarati dan Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Salemba Empat
- Hadad, M.D. Santoso, W., & Sarwedi. (2004), Model Prediksi Kepailitan Bank Umum di Indonesia (Vol. 5). *Working Paper. Directorate of Banking Research and Regulations Bank Indonesia*. www.bi.go.id.
- Hamada, M. (2010). Commercialization of Microfinance in Indonesia: The Shortage of Funds and The *Program linkage*. *The Developing Economies*, 48 (1), 156-176.
- Hamidah, S (2013). Gaya Kempemimpinan, Budaya Organisasi, dan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Review of Islamic Economics, Finance, and Banking*. Vol. 1, No. 1 (April 2013): h. 134
- Hamidah, S (2016). Analisis Kebijakan *Program linkage* Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan UKM di Indonesia. *Arena Hukum* 8.2 (2016): 185-202.
- Handayani, P., & Arsyad, L. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedalaman Jangkauan (depth of outreach) lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Sleman. *Journal Ekonomi UAJY* 4. (5)
- Hartarska, V., & Nadolnyak, D. (2007). Do Regulated Microfinance Institutions Achieve Better Sustainability and Outreach? Cross-country Evidence. *Applied economics*, 39 (10), 1207-1222.
- Hartomo dan Dewi (2018), Efisienkah Bank Umum Syariah Di Indonesia? *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 18, No. 1, 2018

- Hamada, Miki, (2010), Commercialization Of Microfinance In Indonesia: The Shortage Of Funds And The *Program linkage*, The Developing Economies 48, no. 1 (March 2010): 156–76.
- Hans, D. S., (2015) Islamic Microfinance in Indonesia, Deutsche Gesellschaft Für Technische. *Zusammenarbeit (GTZ)*, August 2005, pp. 50-51.
- Hassan, A. (2014). The Challenge in Poverty Alleviation: Role of Islamic Microfinance and Social Capital. *Humanomics*, 30 (1), 76-90.
- Hati, Kadina, Khairunnisa, Iradianty, (2017), Pengaruh BOPO, Debt To Equity Ratio (DER), dan Pertumbuhan Jumlah Cabang Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015), *e-Proceeding of Management: Vol.4, No.3* Desember 2017, Page 2156
- Hemann, W. (2008). Regulatory Options for Increasing The Outreach of The BPR Industry, *ProFi Working Paper Series*. WP 01/2008
- Hermes N, Lensink R. (2011). Microfinance: Its Impact, Outreach, and Sustainability. *World Development*. 39 (6): 875-881.
- Hermes N, Lensink R, Meesters A. (2011). Outreach and Efficiency of Microfinance Institutions. *World Development*. 39 (6): 938-948. <http://doi.org/fsvdbb>
- Hidayat dan Endang , 2016, Analisis CAR, NPF, FDR, NOM DAN SIZE Terhadap Risiko Bisnis: Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014, *Diponegoro Journal Of Management*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Halaman 1-12.
- Hirschhorn, J. M. (1984). Where the money is: Remedies to Finance Compliance With Strict Structural Injunctions. *Michigan Law Review*, 82 (8), 1815-1877.
- Hosen, M, Nadrattuzaman, and Sa'roni, L.S. (2012) Determinant factors of the successful of Baitul Maal Wat Tamwil (bmt). *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 1.4 (2012): 36-56.
- Hudon, M., & Traca, D. (2011). On the Efficiency Effects of Subsidies in Microfinance: An Empirical Inquiry. *World development*, 39 (6), 966-973.
- Husein, M. F, The Stability of Islamic Banks in Indonesia, *The 2nd IBEA – International Conference on Business, Economics and Accounting*, Hong Kong, 2014.

- Hsun, Chen Chien & Tzu Shih Hui, (2003), Initial Public Offering and Corporate Governance in China's Transitional Company, *NBER Working Paper* 9574, March, pp. 01-27
- Hulme, J (2016). Impact Assessment Methodologies for Microfinance: Theory, Experience, *Development Policy and Management Journal*, 88 (2)
- Hulme D, Montgomery R, Bhattacharya D. (1996). Mutual Finance and The Poor. *Finance Against Poverty*. Vol.2 (1). 76-103
- Imaniyati, N. S., & BAKTI, P. C. A. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Citra Aditya Bakti.
- Indarto, S. L., & Ayu, S. D. (2011). Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, dan Job Relevant Information (JRI). *Seri Kajian Ilmiah*, 14 (1), 1-22.
- Ito, S. (2003). Microfinance and Social Capital: Does Social Capital Help Create Good Practice?. *Development in Practice*, 13 (4), 322-332.
- Indonesia, B. (2009). *Kajian stabilitas keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Irwandana (2015). Analisis Profitabilitas Perusahaan Mitra Bank Muamalat Indonesia Sebelum dan Setelah *Program linkage*. Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Ismanto, K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi BMT/BTM di Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 9.
- Ismail, A. G., & Mislan C, W. (2008). Sustainability of BMT financing for Developing Micro-Enterprises. *Islamic Finance in a Challenging Economy: Moving Forward*. 10.11-17
- Jubaedah (2009). Peran Strategis *Program linkage* Bank Syariah Terhadap Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah: *Studi Pada Bank Muamalat Indonesia (Undergraduate Thesis)*. Retrived from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/13343>
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating Strategy Into Action*. Boston: Harvard Business School Press
- Kasmir (2005). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Khatimah, H. (2009). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007/2008. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3 (1), 1-14.
- Khan, M. M. (2015). Credit Constraints for Microfinance Sector in Pakistan, an Analysis of Internal and External Factors. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 47, 164-173.
- Khandker, S. R., Khalily, M. B., & Khan, Z. H. (1995). Grameen Bank: Performance and Sustainability. *World Bank Publications*. (Vol. 306).
- Kim, J.B., Itzhak Krinsky, & Jason Lee, (1993), Motives for Going Public and Under Pricing: New Findings from Korea, *Journal of Business Finance & Accounting*, Vol. 20, Iss. 2, pp. 195 – 211
- Kinde, B. A. (2012). Financial Sustainability of microfinance institutions (MFIs) in Ethiopia. *European Journal of Business and Management*, 4 (15), 1-10.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. *Educational and psychological measurement*, 30 (3), 607-610.
- Kumara, R. (2010). Analisis uji beda kinerja BPR yang Mengikuti *Program linkage* Dengan BPR yang Tidak Mengikuti *Program linkage* Pada Wilayah DPC Depok, *Jurnal Ekonomi Gunadarma* /1282/
- Kusumawardani, Angrawit (2012). Analisis Pengaruh EPS, PER, ROE, FL, DER, CR, ROA Pada Harga Saham dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI Periode 2005-2009, *Jurnal Litbang* 11-1
- Kusumastuti dan Azhar Alam, 2019, Analysis Of Impact OF CAR, BOPO, NPF ON Profitability Of Islamic Banks (Year 2015-2017), *Journal of Islamic Economic Laws*, Vol. 2, No. 1 January 2019: 30-59.
- Kusumo, W. K. (2002). *Analisis Rasio-rasio Keuangan Sebagai Indikator Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Kuswadi (2008), *Memahami Rasio-rasio Keuangan Bagi Orang Awam*. Jakarta: Persada Press
- Kuswara, dkk. (2019), Determinant of Islamic Banking Profitability In Indonesia, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vo;.15. No.1, 2019
- Li X, Gan C, Hu, B. (2011). Accessibility to Microcredit by Chinese Rural Households. *Journal of Asian Economics*. 22 (3): 235-246.

- Lyn M. & Aileen O. (2008). *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi Pasar*. Modal. Grasindo, Jakarta. Fraser, Penerjemah Sudartomo
- Lutfiana dan Yulianto (2015), Determinan Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia (Pendekatan Two Stage Dea), *Accounting Analysis Journal*, Vol. 4 No. 3 (2015)
- Lusiana, F. W. & Chabachib, M. (2011). *Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas Terhadap Price Earning Ratio Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Mahajan, V., & Nagasri, G. (1999). Building Sustainable Microfinance Institutions in India: Factors That Make Microfinance Institutions Sustainable. *A paper written for seminar on New Development Finance*, Frankfurt, September 1999.
- Maryati, S. (2014). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat. *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, 3 (1).
- Maesaroh, S. (2011). Efektifitas *Program linkage* Bank Syariah Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 123456789/1557
- Masrifah, A. R. (2017). Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT) Sebagai Alternatif Strategis Memajukan Usaha Mikro Kecil Sektor Pertanian. *Islamic Economics Journal*, 3 (1).
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang no. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (2), 17-36.
- Menkhoff L, Rungruxsirivorn O. (2011). Do Village Funds Improve Access To Finance? Evidence From Thailand. *World Development*. 39 (1): 110-122
- Menicucci, Elisa dan Guido Paolucci , 2016, Factors Affecting Bank Profitability in Europe: An empirical investigation, *African Journal of Business Management*, Vol. 10 (17), pp. 410-420, 14 September, 2016.
- Mersland R, Strom RO. (2010). Microfinance mission drift? *World Development*. 38 (1): 28-36.
- Meyer, R. L. (2002). Track Record of Financial Institutions in Assisting the Poor in Asia. *ADB Institute Research Paper*, 49.

- Miráj dan Nafik (2015) *Program linkage* Bank Syariah dengan BMT: Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah, JESTT, Vol. 2, No. 10, Oktober 2015.
- Moldoveanu, Mihnea and Martin, Roger, 2001, Agency Theory And The Design Of Efficient Governance Mechanisms, Rotman School Of Management. Rotman. *Management*, (1)2001,7-18.
- Moran, T. H. (2001). Parental supervision: The new Paradigm For Micro Finance Direct Investment and Development, *Peterson Institute* Vol. 64, 123-145.
- Monge, R., & Rodriguez, J. (2013). Impact evaluation Of Innovation And Linkage Development Programs in Costa Rica: The cases of Propyme and CR Provee. *BAR-Brazilian Administration Review*, 8 (3), 247-265.
- Morduch, J. (1999). The Microfinance Promise. *Journal of Economic Literature*, 37 (4), 1569-1614.
- Morduch, J. (1999). The Role of Subsidies in Microfinance: Evidence From The Grameen Bank. *Journal of Development Economics*, 60 (1), 229-248.
- Muda, Muhamad, dkk. , 2013, Profitability Determinants and The Impact of Global Financial Crisis: A Panel Data Analysis of Malaysian Islamic Banks, *Research Journal of Finance and Accounting*, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online), Vol.4, No.7, 2013
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muljawan, dkk., (2014), Faktor-Faktor Penentu Efisiensi Perbankan Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Perhitungan Suku Bunga Kredit, *Working Paper Bank Indonesia*, WP/2/2014.
- Mulyaningrum. (2009) Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Pasar Semolowaru Surabaya, *Jestt* Vol. 1 No. 3 Maret 2009.
- Munawir, Slamet. (2002) *Analisis informasi keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Musyarofatun, L. D. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. *Accounting Analysis Journal*, 2 (1).
- Mutmaidah, S. (2010). Analisis Rasio Sebagai Tolak Ukur Kinerja Keuangan Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang Periode 2005-2009. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 20 (1), 102-122

- Murdoch, J., (1997). The Micro-Finance Revolution, *Journal of Economic Perspectives* 9 (3), 103–114
- Murdoch, J., (2006). Efficiency of Microfinance Institutions: A Data Envelopment Analysis. *Asia-Pacific Financial Markets*, 17 (1), 63-97.
- Nasution, Ruri Eka Fauziah dan Ahmed, Habib (2015) Outreach and Profitability Trade-off: Does Synergy Between Islamic Banking and Islamic Microfinance Institutions Matter? *Indonesian Capital Market Review*, Vol 7, No 2, 2015
- Nader YF. (2008). Microcredit and Socio-Economic Wellbeing of Women and Their Families in Cairo. *The Journal of Socio-Economics*. 37 (2): 644-656.
- Nazirwan, Mohamad. (2015) The Dynamic Role and Performance of Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Community-Based Microfinance in Central Java. *Victoria University journal*, 2015.
- Navajas S, Schreiner M, Meyer SL, Gonzalez-Vega C, Rodriguez-Meza J. (2000). Microcredit and The Poorest Of The Poor: Theory and Evidence From Bolivia. *World Development*. 28 (2): 333-346.
- Ndiege, dkk., 2014, The Impacts of Financial Linkage on Sustainability of Less-Formal Financial Institutions: Experience of Savings and Credit Co-Operative Societies in Tanzania, *Journal of Co-Operative Organization and Management* 2 (2014) 65–71.
- Ningsukma H., Haqiqi R, (2016), Pengaruh internal capital adequency ratio (car), financing to deposit ratio (fdr), dan biaya operasional per pendapatan operasional (bopo) dalam peningkatan profitabilitas industri bank syariah di Indonesia, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1, 1 Mei 2016.
- Nurhasanah (2017) Pengaruh Asset Growth terhadap Profitabilitas Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Visioner & Strategis*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2017
- Nuryanto, R., Tho'in, M., & Wardani, H. K. (2014). Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Rentabilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15 (01).
- Olivares-Polanco, F. (2005). Commercializing Microfinance and Deepening Outreach? Empirical Evidence from Latin America, *Journal of Micronance*, Vol. 7, pp. 47-69.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives. *Islamic Research & Training institute Policy Dialogue Paper*, (2).

- Orniati, Y. (2009). Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14 (3), 206-213.
- Payamta & Mas'ud Machfoedz, (1999), Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ), *Kelola*, Vol. VIII, No. 20, pp. 54-69
- Payamta & Nur Sholikhah, (2001), Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Publik di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1, pp. 17-41.
- Parveen, J. A. (2009). Sustainability Issues of Interest-Free Micro-Finance Institutions in Rural Development and Poverty Alleviation. The Bangladesh Perspective. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 4 (2 (11), 112-133.
- Parveen J. A, (2000) Sustainability Issues of Interest Free Micro-Finance and Rural Development aud Poverty Alleviation: The Bangladesh Perspective, *Journal of Business Administration University of Chittagong*, 20, 26-30
- Paxton J, Cuevas CE. (2002). *Outreach and Sustainability of Member-Based Rural Financial Intermediaries at The Triangle of Microfinance*, 2002. In: Zeller M, Meyer RL (ed). Washington (US): The International Food Policy Research Institute.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesi Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang 'Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi' Tahun 2007
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Tahun 2012. Diakses Pada Halaman <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-Bank-Indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-14-22-pbi-2012.aspx> , Pada Tanggal 3 Maret 2020.
- Peraturan Bank Indonesia No 17/12/PBI/2015 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Diakses dihalaman https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/pbi_171215.aspx
- Pollinger, J. Oouthwaite, J., & Cordero GH, Theeuestion (2007) Sustainability Microfinance Institutions. *Journal of small Business Management*, 56 (2) 23-44

- Pratami, W. A. N., & Muharam, H. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf) Dan Return On Asset (Roa) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Prasanjaya, A. Y., & Ramantha, I. W. (2013). Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR dan ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi*, 230-245.
- Quayes, S. (2012). Depth of Outreach And Financial Sustainability of Microfinance Institutions. *Applied Economics*, 44 (26), 3421-3433.
- Rahayu, S. (2015). Pengaruh Return on Asset, BOPO, Suku Bunga dan Capital Adequacy Ratio terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Journal Of Accounting*, 1 (1).
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Iqtishoduna*. 20 (2), 34-45
- Rahman ARA. (2007). Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*. 1 (2): 38-53
- Rachman, dkk. (2013), Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank Dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah, *Accounting Anlysis Journal*, Vol 2, No. 4 2013
- Rompas, G. P. (2013). Likuiditas Solvabilitas Dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1 (3).
- Robinson, Marguirete. (2002). The Microfinance Revolution: Lesson from Indonesia. *The World Bank*. Washington DC.
- Rusydiana, Aam S., and Abrista Devi (2013). Challenges in developing Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) in Indonesia using Analytic Network Process (ANP). *Business & Management Quaterly Review* 4.1 (2013): 51-62.
- Saad, N. M. (2012). Microfinance and Prospect for Islamic Microfinance Products: The Case of Amanah Ikhtiar Malaysia. *Advances in Asian Social Science*, 1 (1), 27-33.
- Saidah, Z. (2016). Analysis of Microfinance and Outreach to The Poor. *Journal Of Sciencetech research*, 1 (1), 28-42.
- Sakai, Minako. (2010). Growing Together in Partnership: Women's Views of The Business Practices of an ISLAMIC Savings and Credit Cooperative (Baitul

- Maal wat Tamwil) in Central Java, Indonesia." *Women's Studies International Forum*. Vol. 33. No. 4. Pergamon, 2010.
- San, Ong Tze dan Boon Heng, 2013, Factors Affecting The Profitability of Malaysian Commercial Banks, *African Journal of Business Management* Vol. 7 (8), pp. 649-660, 28 February, 2013.
- Sari, Z. (2013). Analisis Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT (Studi Pada Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1 (3).
- Sakti, A. (2013). Pemetaan kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar & jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro. *Al-Muzara'ah*, 1 (1), 1-18.
- Schreiner, M. (2000). Ways Donors Can Help The Evolution of Sustainable Microfinance Organizations/Comment Les Bailleurs De Fonds Peuvent-Ils Aider L'évolution Soutenue Des Organisations De Microfinance? *Savings and Development*, 423-437.
- Slamet R., Agung Y., (2014), Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal*, AAJ 3 (4) (2014).
- Sriyana, J., & Raya, F. (2013). Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7 (1), 29-50.
- Sriyana, 2014, *Metode Regresi Data Panel*. Ekosiana, Yogyakarta
- Serli, N. N. (2016). *Pengaruh Kompetensi dan Kelayakan Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kinerja Karyawan pada BMT Madani Pati* (Doctoral Dissertation, STAIN Kudus).
- Setyobudi, A. (2007). Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 5 (2), 29-35.
- Sebaktiningrum & Khasanah, N. (2006). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal ekonomi UNNES*, 12 (3), 34-45.
- Shochrul R, Ajija, dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai EVIEWS. Jakarta: Salemba Empat
- Situmorang, J. (2007), Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UM Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif, *Jurnal Infokop*, Volume 2, Tahun 2007

- Siregar, H., Nuryartono, N., & KP, E. I. (2016). Determinant of Microcredit Repayment. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 19 (1), 57-80.
- Srimindarti, C. (2006). *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja*, STIE Stikubank, Semarang
- Steinwand, Dirk (2001), *The Alchemy of Microfinance: The Evolution of the Indonesian People's Credit Banks (BPR) from 1895 to 1999 and a Contemporary Analysis*, Berlin: VWF
- Streets, D. G., Bond, T. C., Carmichael, G. R., Fernandes, S. D., Fu, Q., He, D.,... & Woo, J. H. (2003). An Inventory of Gaseous and Primary Aerosol Emissions in Asia in The Year 2000. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 108 (D21).
- Suarsih, I (2010). Upaya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Pusat Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Islam. *Islamic Economics Journal*, 66-88
- Suhandi, D. (2015). Perbandingan Kinerja Keuangan BMT UMJ Sebelum dan Sesudah Program linkage *Islamic Economics Journal*, 67-78.
- Suhartatik, N. (2013). Determinan Financing To Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012). *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 1 (4).
- Sulaiman D. M, (2010). Microfinance Challenges and Opportunities in Pakistan, *European Journal of Social Sciences – Volume 14, Number 1* (2010)
- Sunarto, N. (2013). Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Return On Assets Sektor Perbankan Di Indonesia. 87 *Inovbiz*, 1, 87-97.
- Sutopo, W. (2005). Hubungan Antara Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Usaha Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan. *Manajemen Usahawan Indonesia*, (01), 3-12.
- Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tahun 2017. Diakses di Halaman: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Default.aspx>
- Surifah, (2002), Kinerja Keuangan Perbankan Swasta Nasional Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Desember, pp. 23-43
- Suyatno, T. (2003) *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Taswan, S. (2003). Analisis Pengaruh Insider Ownership, Kebijakan Hutang, dan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Bisnis Ekonomi*, 10 (2).

- Taswan, (2006), *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- The Asia Fondation, Microfinance Service in Indonesia (2003): *Survey of Institutions in 6 Provinces*, Jakarta: The Asia Foundation,
- Thomas Suyatno, (2003), *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tiong, P. N., & Anantharaman, R. N. (2011). Bank Sustainability Disclosures: A Case Study Of Maybank. *Malaysian Accounting Review*, 10 (2).
- Undang Undang No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Wahyuni, K. T. (2013). Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2 (2).
- Wardiwiyono, Sartini (2012) Internal Control System for Islamic Micro Financing: an Exploratory Study of Baitul Maal Wat Tamwil in The City of Yogyakarta Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5.4, 340-352.
- Weiss, J., & Montgomery, H. (2005). Great Expectations: Microfinance and Poverty Reduction in Asia and Latin America. *Oxford Development Studies*, 33 (3-4), 391-416.
- Widarjono. Agus . 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia. Yogyakarta
- Widarjono, 2009, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. Ekonisia. Yogyakarta
- Woldie, A., Isaac Mwita, J., & Saidimu, J. (2012). Challenges of Microfinance Accessibility by SMEs in Tanzania. *Thunderbird International Business Review*, 54 (4), 567-579.
- Woller, G. (2000). Reassessing The Financial Viability of Village Banking: Past Performance and Future Prospects. *MicroBanking Bulletin*, 5, 3-8.

- World Bank. (2011). *Global Financial Inclusion Database*.
<http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx>
- Wibowo, E. S., & Syaichu, M. (2013). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Diponegoro *Journal of Management*, 2 (2), 10-19.
- Yuliyanto, E. R. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Publik yang Melakukan Merger dan Akuisisi Selama dan Sesudah Krisis Moneter Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik Yang Tergabung Di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Zeller, M. and Johannsen, J. (2006). Is There a Difference in Poverty Outreach by Type of Microfinance Institution? The Case of Peru and Bangladesh, Paper, Presented at the Global Conference on Access to Finance: Building Inclusive Financial Systems, Organized as Part of *The Annual Conference Series of The World Bank and the Brookings Institution* in Washington, D.C., May 30 and 31, 2006
- Zeller M, Sharma M, Henry C, Lapenu C. 2006. An Operational Method for Assessing the Poverty Outreach Performance of Development Policies and Project: Result of Case Studies in Africa, Asia and Latin America. *World Development*. 34 (3):446-464.
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9 (2), 201-226.
- Zamir, I., (2013). Islamic Financing System, *Journal Finance and development*, 45 (2) 122-123

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Tabel 2.2 Pola evaluasi Program Linkage

Tabel 2.2 Pola evaluasi Program Linkage

Pola Linkage	Evaluasi Linkage
Executing	<ul style="list-style-type: none"> a. Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (normal business loss), maka risiko ditanggung oleh KJKS/UJKS-Koperasi; b. Distribusi pendapatan, sesuai dengan nisbah yang disepakati antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi; c. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi anggota koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai; d. Jaminan, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku; e. Jaminan anggota Koperasi, sesuai yang dipersyaratkan KJKS/UJKS-Koperasi; f. Akad Pembiayaan kepada anggota koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi; g. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka Program Linkage , maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan dipenuhi secara lengkap. (Arifin, 2013)
Channeling	<ul style="list-style-type: none"> e. Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (normal business loss), maka risiko ditanggung oleh BUS/UUS; f. Distribusi pendapatan: BUS/UUS memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati dengan UMK; g. KJKS/UJKS-Koperasi mendapatkan fee yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi; h. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai; i. Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku; j. Akad pembiayaan kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;

Pola Linkage	Evaluasi Linkage
	k. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka Program Linkage , maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi
Joint Financing	<p>a. Risiko pembiayaan kepada anggota Koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kegagalan bisnis secara normal (normal business loss), maka risiko ditanggung bersama antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsinya;</p> <p>b. Distribusi pendapatan: BUS/UUS memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati dengan UMK; Pembagian pendapatan antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsi yang disepakati;</p> <p>c. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;</p> <p>d. Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;</p> <p>e. Akad kredit kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;</p> <p>f. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka Program Linkage , maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.</p>

LAMPIRAN 1 DATA VARIABEL DEPENDEN DAN VARIABEL INDEPENDEN

DATA LKMS	PERIODE	PROFIT	BOPO	LP	NPF	CAR	JP	ASSET	JC
LKMS1	2010	48.11	95.01	20.1	6.23	16.95	9.966034524	10.29809422	3
LKMS1	2011	53.95	93.40	23.3	6.45	12.1	10.09460978	10.3374963	3
LKMS1	2012	55.79	93.28	27.1	7.01	12.95	10.17854638	10.38367073	4
LKMS1	2013	55.31	92.73	44.7	7.34	18.83	10.21983933	10.43754025	7
LKMS1	2014	56.88	91.98	31	5.37	13.44	10.3437398	10.47893294	7
LKMS1	2015	58.37	85.34	21.6	6.89	14.39	10.34377737	10.5169919	9
LKMS1	2016	53.52	84.50	15	6.77	12.75	10.35996356	10.52768917	9
LKMS1	2017	58.85	83.75	13	6.75	10.7	10.45338525	10.64163252	9
LKMS1	2018	61.09	83.23	10	5.45	11.1	10.46622247	10.64250024	9
LKMS2	2010	22.19	95.84	0	6.46	6.74	10.00531275	10.03240054	0
LKMS2	2011	27.80	95.24	0	6.56	7.47	10.11581188	10.15668943	1
LKMS2	2012	34.06	93.86	0	5.26	7.49	10.22034389	10.25348086	1
LKMS2	2013	34.77	93.63	0	5.12	7.74	10.22515612	10.49313004	2
LKMS2	2014	47.58	92.44	0	5.85	8.19	10.43756279	10.53452273	2
LKMS2	2015	45.73	92.41	0	5.45	8.6	10.46589455	10.60919384	2
LKMS2	2016	52.79	91.72	0	6.25	9.77	10.51511257	10.6455122	3
LKMS2	2017	54.56	91.88	0	6.88	28.8	10.60853425	10.75945555	3
LKMS2	2018	55.77	95.75	0	7.08	33.57	10.62137148	10.76032328	3
LKMS3	2010	13.29	99.17	7	6.46	5.05	10.17486155	10.35065328	0
LKMS3	2011	31.57	90.53	10	6.56	7.02	10.22439379	10.37631069	0
LKMS3	2012	31.56	85.53	13	5.26	7.51	10.23024962	10.42135533	0
LKMS3	2013	48.66	85.05	20	5.12	8.34	10.2475133	10.4495692	1
LKMS3	2014	49.56	83.95	18	5.85	8.69	10.2687026	10.49096188	2
LKMS3	2015	58.88	81.15	8	5.45	9.32	10.35650819	10.53646284	2
LKMS3	2016	57.41	80.51	7	6.25	9.65	10.39942188	10.57687157	2
LKMS3	2017	58.64	80.09	9	6.88	10.36	10.49284357	10.69081492	2
LKMS3	2018	59.30	80.06	5	7.08	33.57	10.50568079	10.69168265	2
LKMS4	2010	27.70	90.89	7	6.31	10.95	10.05471899	10.27678362	2
LKMS4	2011	33.01	91.69	6	7.72	10.95	10.10923515	10.28829377	2
LKMS4	2012	39.01	90.89	36	6.11	11.38	10.13142576	10.34786073	3
LKMS4	2013	50.83	90.69	39	5.5	11.99	10.1550812	10.36722563	3
LKMS4	2014	52.17	89.79	19	6.41	13.32	10.16953066	10.40861832	4
LKMS4	2015	54.86	89.74	18	5.97	16.02	10.19428514	10.35640305	4
LKMS4	2016	57.05	89.56	17	7.58	17.44	10.27592296	10.34245994	5
LKMS4	2017	57.34	89.12	16	8.34	17.8	10.36934465	10.45640329	5
LKMS4	2018	57.15	85.44	20	8.59	19.38	10.38218187	10.45727101	5
LKMS5	2010	33.04	95.45	30	6.67	22.67	10.03286984	10.22727556	0
LKMS5	2011	35.67	94.89	26	7.29	19.2	10.16529051	10.29320716	0

LKMS5	2012	37.01	94.84	32	5.13	16.59	10.17526687	10.38258622	0
LKMS5	2013	38.01	94.70	31	5.56	13.53	10.20527731	10.41211205	0
LKMS5	2014	38.69	93.77	23	6.16	12.51	10.2654247	10.45350473	0
LKMS5	2015	37.10	93.49	28	6.82	11.25	10.32497087	10.49109113	1
LKMS5	2016	37.08	89.89	26	5.31	11.75	10.42055265	10.55408874	1
LKMS5	2017	41.73	89.27	28	5.84	13.9	10.51397434	10.66803209	1
LKMS5	2018	44.04	88.42	27	6.02	12.22	10.52681156	10.66889981	1
LKMS6	2010	15.91	99.73	12	5.17	13.05	11.03286984	11.56889951	23
LKMS6	2011	18.81	99.11	11	7.64	12.26	11.13454543	11.58571617	28
LKMS6	2012	21.53	98.85	12	5.85	11.8	11.17732564	11.58730415	30
LKMS6	2013	23.88	98.15	15	7.53	11.95	11.2654247	11.5899727	30
LKMS6	2014	26.24	98.13	16	6.54	6.28	11.30041185	11.63136538	39
LKMS6	2015	26.75	98.11	15	6.55	9.4	11.34504956	11.59298509	43
LKMS6	2016	30.66	98.08	17	6.61	12.52	11.42055265	11.59871516	43
LKMS6	2017	30.79	97.87	15	7.27	12.81	11.52681156	11.71265851	44
LKMS6	2018	30.77	89.31	19	7.49	10.51	11.52707351	11.71352624	44
LKMS7	2010	23.79	95.76	0	3.69	13.91	10.25196263	10.3333072	1
LKMS7	2011	27.76	95.24	0	3.82	14.32	10.30631586	10.40732755	1
LKMS7	2012	30.25	94.98	0	3.75	14.75	10.30994403	10.41603265	1
LKMS7	2013	32.08	93.69	0	4.75	15.34	10.32180731	10.54101263	2
LKMS7	2014	32.80	92.73	0	4	16.45	10.32239323	10.58240531	4
LKMS7	2015	32.83	92.69	0	3.75	8.4	10.35354419	10.560447	4
LKMS7	2016	33.71	91.13	0	3.79	6.54	10.35398626	10.5793119	4
LKMS7	2017	36.09	90.19	0	4.17	7.66	10.41581491	10.69325526	5
LKMS7	2018	46.17	89.12	0	4.29	9.39	10.42865214	10.69412298	5
LKMS8	2010	17.60	96.63	17	4.82	7.27	10.6306352	10.72405242	2
LKMS8	2011	20.46	87.85	16	4.98	8.51	10.64673637	10.73690068	2
LKMS8	2012	21.21	87.58	13	5.82	9.43	10.66001121	10.73091602	2
LKMS8	2013	24.20	87.01	13	6.67	10.43	10.67299829	10.74356573	3
LKMS8	2014	25.33	86.14	30	5.57	11.43	10.68742297	10.78495841	4
LKMS8	2015	26.00	86.11	20	4.56	11.84	10.68762796	10.7560325	4
LKMS8	2016	29.31	83.67	13	5.83	16.63	10.68811368	10.76855493	4
LKMS8	2017	32.70	83.49	12	6.41	13.72	10.78153537	10.88249828	5
LKMS8	2018	43.47	83.28	12	6.61	16.23	10.79437259	10.883366	5
LKMS9	2010	11.51	98.35	19	3.69	4.13	10.25013748	10.34233342	3
LKMS9	2011	16.09	97.98	17	3.82	5.9	10.30536796	10.40867021	3
LKMS9	2012	19.19	97.95	16	3.75	6.55	10.34200974	10.48977974	3
LKMS9	2013	21.62	97.95	12	4.85	6.92	10.36841143	10.59060041	4
LKMS9	2014	22.80	97.94	15	4.02	7.77	10.42439931	10.63199309	4
LKMS9	2015	25.13	97.85	12	4.75	8.84	10.51497368	10.67356904	5
LKMS9	2016	25.55	97.67	12	3.79	8.98	10.56572195	10.73938889	5
LKMS9	2017	28.01	97.67	12	4.17	9.01	10.65914364	10.85333224	6
LKMS9	2018	31.86	87.67	13	4.29	9.23	10.67198086	10.85419996	6

LKMS10	2010	13.71	99.00	0	8.41	4.39	10.34737843	10.44067318	0
LKMS10	2011	16.60	99.67	0	6.74	4.66	10.4169335	10.51356826	1
LKMS10	2012	19.64	99.38	0	7.76	5.8	10.44498659	10.5522733	2
LKMS10	2013	23.56	99.05	0	5.48	8.3	10.44564923	10.61564713	2
LKMS10	2014	24.65	98.95	0	7.09	8.4	10.54877163	10.65703982	2
LKMS10	2015	28.05	98.94	0	5.51	8.6	10.60571905	10.65876449	3
LKMS10	2016	31.19	98.15	0	6.48	8.76	10.61865364	10.72357529	3
LKMS10	2017	31.48	98.01	0	7.13	9.16	10.71207533	10.83751864	3
LKMS10	2018	35.65	87.98	0	7.34	9.73	10.72491255	10.83838636	3
LKMS11	2010	18.51	98.59	14	8.98	4.71	10.21729416	10.24402882	3
LKMS11	2011	23.67	98.45	15	6.14	4.72	10.31697612	10.35654581	4
LKMS11	2012	24.72	98.33	13	5.73	5.1	10.38238421	10.45945735	4
LKMS11	2013	26.52	96.73	15	7.22	5.32	10.43677378	10.52854525	5
LKMS11	2014	28.48	96.40	11	7.01	5.24	10.50382209	10.56993794	5
LKMS11	2015	33.22	96.15	15	6.61	5.72	10.59314738	10.60942764	6
LKMS11	2016	32.37	95.99	12	6.99	5.92	10.69050876	10.71111543	6
LKMS11	2017	33.90	95.51	12	7.69	6.11	10.78393045	10.82505879	7
LKMS11	2018	39.34	95.18	14	7.92	6.14	10.79676767	10.82592651	7
LKMS12	2010	22.15	96.55	37	7.32	4.71	10.14694645	10.1832503	2
LKMS12	2011	23.23	96.26	28	7.43	4.72	10.16397164	10.28016031	2
LKMS12	2012	24.80	96.19	25	7.79	5.15	10.21417515	10.32713173	3
LKMS12	2013	30.72	94.24	29	6.88	5.32	10.25485184	10.36829169	3
LKMS12	2014	33.73	93.86	31	7.355	5.24	10.27652844	10.40968438	3
LKMS12	2015	34.47	93.65	30	7.24	5.72	10.28586785	10.40055261	3
LKMS12	2016	39.90	93.12	24	5.37	5.92	10.34687408	10.40953673	4
LKMS12	2017	41.33	92.31	14	5.91	5.21	10.44029576	10.52348008	4
LKMS12	2018	42.22	86.72	17	6.08	4.84	10.45313299	10.5243478	4
LKMS13	2010	17.29	96.89	14	7.46	4.82	10.29893495	10.42355173	3
LKMS13	2011	20.01	89.99	13	6.45	4.91	10.32938147	10.48125941	3
LKMS13	2012	25.39	89.74	30	5.51	5.38	10.36671818	10.56236453	4
LKMS13	2013	29.01	89.73	37	7.55	5.34	10.41122001	10.5758567	4
LKMS13	2014	30.24	89.56	30	6.742	5.44	10.41554139	10.61724939	4
LKMS13	2015	30.16	88.53	32	7.94	6.44	10.52948474	10.72198474	5
LKMS13	2016	31.48	86.91	26	8.63	7.71	10.53380611	10.76337742	5
LKMS13	2017	32.25	86.81	19	9.49	8.82	10.6272278	10.87732078	6
LKMS13	2018	34.76	85.62	17	9.78	9.9	10.64006502	10.8781885	6
LKMS14	2010	15.57	92.93	0	6.66	9.89	9.877349831	10.12881308	0
LKMS14	2011	18.57	92.75	0	7.69	10.1	9.883661502	10.18443451	0
LKMS14	2012	22.17	92.48	0	6.22	10.44	9.913969577	10.22881595	0
LKMS14	2013	26.09	92.36	0	7.27	10.54	9.93080813	10.31178394	0
LKMS14	2014	30.52	89.83	0	6.96	10.65	9.944987181	10.35317663	0
LKMS14	2015	34.19	89.75	0	6.98	11.1	9.945069897	10.37699079	1
LKMS14	2016	40.04	89.73	0	4.46	11.71	9.961534485	10.46285262	1

LKMS14	2017	41.88	67.47	0	4.91	12.21	10.05495617	10.57679597	1
LKMS14	2018	44.30	58.24	0	5.05	13.45	10.06779339	10.57766369	1
LKMS15	2010	17.50	97.26	12	4.26	9.12	10.21008464	10.31527392	2
LKMS15	2011	18.20	96.53	11	4.78	9.8	10.25584213	10.36588391	2
LKMS15	2012	24.38	93.95	13	3.65	10.11	10.28446725	10.47378931	3
LKMS15	2013	26.51	92.06	13	4.11	10.23	10.28857939	10.49791431	3
LKMS15	2014	27.67	91.78	13	4.2	10.89	10.31135946	10.53930699	3
LKMS15	2015	28.41	91.26	13	3.63	11.23	10.35182929	10.52667698	4
LKMS15	2016	33.01	89.49	16	4.3	11.42	10.36196945	10.51110163	5
LKMS15	2017	40.01	82.67	18	4.73	12.3	10.44525097	10.62504498	5
LKMS15	2018	41.72	81.49	12	4.87	13.72	10.4580882	10.62591271	5
LKMS16	2010	13.78	99.15	50	3.41	5.17	9.602189869	9.675370223	0
LKMS16	2011	16.36	99.23	40	5.71	5.55	9.652799862	9.73585097	1
LKMS16	2012	20.35	93.60	49	3.56	5.74	9.669705537	9.783377864	1
LKMS16	2013	22.70	93.49	43	4.58	5.88	9.683850353	9.835767642	1
LKMS16	2014	27.39	93.29	16	4.31	6.17	9.730045286	9.877160327	1
LKMS16	2015	28.33	91.41	15	5.82	6.53	9.935830398	9.976763466	1
LKMS16	2016	30.10	89.95	12	3.12	8.11	9.981587888	10.01772207	1
LKMS16	2017	31.18	85.24	22	3.43	8.31	10.07500957	10.13166543	1
LKMS16	2018	33.38	81.48	15	3.53	8.77	10.0878468	10.13253315	1
LKMS17	2010	14.65	98.65	19	3.25	7.25	9.444136301	9.467870233	0
LKMS17	2011	16.25	91.86	62	3.24	7.45	9.489893792	9.523445489	0
LKMS17	2012	17.16	91.65	53	3.33	7.61	9.529087513	9.625818398	0
LKMS17	2013	19.04	91.03	55	6.44	7.83	9.535651283	9.73976175	0
LKMS17	2014	24.82	90.77	49	4.06	7.98	9.625556394	9.781154436	0
LKMS17	2015	25.29	90.22	25	3.36	8.06	9.715461505	9.853705103	0
LKMS17	2016	43.30	89.68	48	5.54	8.22	9.805366617	9.967648455	0
LKMS17	2017	50.21	89.42	26	6.09	8.44	9.898788302	10.08159181	0
LKMS17	2018	66.28	88.56	30	6.28	8.69	9.911625527	10.08245953	0
LKMS18	2010	19.11	92.14	98	6.64	19.91	9.264613863	9.457709003	0
LKMS18	2011	21.87	91.88	99	6.66	10.17	9.32509461	9.571218277	0
LKMS18	2012	25.77	91.68	94	6.12	10.3	9.385575358	9.663465944	1
LKMS18	2013	28.13	90.75	78	5.82	10.48	9.446056105	9.7138457	1
LKMS18	2014	32.54	90.75	77	6.31	11.3	9.506536852	9.755238385	1
LKMS18	2015	37.16	89.27	27	5.86	11.3	9.571126685	9.764225456	1
LKMS18	2016	38.77	83.76	14	7.41	11.53	9.624205129	9.814605213	1
LKMS18	2017	44.32	83.70	14	8.15	11.64	9.677283572	9.928548565	1
LKMS18	2018	46.15	83.51	16	8.4	12.81	9.730362016	9.929416286	1
LKMS19	2010	22.10	98.35	10	6.87	2.19	9.186311475	9.522070532	0
LKMS19	2011	24.55	97.42	13	7.66	3.47	9.234995352	9.415313187	0
LKMS19	2012	25.85	95.74	43	6.47	9.75	8.844762884	9.366191552	0
LKMS19	2013	29.29	94.33	31	4.88	2.43	9.205981101	9.366275923	0
LKMS19	2014	32.69	92.68	12	6.47	3.85	9.143010061	9.407668608	0

LKMS19	2015	33.52	89.97	12	7.19	10.83	9.288766471	9.456181034	0
LKMS19	2016	36.66	88.72	12	5.85	12.58	9.371551842	9.509259478	0
LKMS19	2017	38.62	88.56	18	6.44	12.3	9.464973527	9.62320283	0
LKMS19	2018	42.82	88.30	21	6.63	11.23	9.477810752	9.624070552	0
LKMS20	2010	16.80	101.94	56	7.19	3.34	9.486086288	9.587802981	1
LKMS20	2011	19.84	101.52	44	4.68	3.39	9.621383305	9.750504818	1
LKMS20	2012	27.15	99.33	45	4.95	7.13	9.59947176	9.729184753	1
LKMS20	2013	28.14	98.76	44	5.66	8.89	9.609344885	9.75336761	1
LKMS20	2014	30.29	95.14	55	5.62	8.77	9.582303737	9.794760295	2
LKMS20	2015	34.42	93.63	22	4.54	15.7	9.708680163	9.880472408	2
LKMS20	2016	36.62	90.64	52	7.93	15.55	9.84126001	10.00757721	2
LKMS20	2017	37.49	85.12	27	8.72	13.5	9.934681696	10.12152056	2
LKMS20	2018	41.16	84.87	46	8.98	14.5	9.94751892	10.12238828	2
LKMS21	2010	26.26	94.33	15	3.55	10.08	9.630268401	9.968855591	2
LKMS21	2011	29.72	93.81	13	4.45	10.26	9.680878395	10.01746558	2
LKMS21	2012	30.54	92.25	15	3.41	11.2	9.693817182	10.06807558	2
LKMS21	2013	31.30	91.03	16	3.45	11.42	9.725170403	10.00606278	3
LKMS21	2014	33.15	85.89	16	3.71	12.26	9.731488388	10.04745547	3
LKMS21	2015	34.55	85.45	13	3.77	12.4	9.935488923	10.05644254	4
LKMS21	2016	37.92	83.72	13	5.12	13.64	9.985868679	10.10682229	4
LKMS21	2017	41.20	78.08	10	5.63	13.78	10.07929036	10.22076565	5
LKMS21	2018	42.00	77.85	14	5.8	15.15	10.09212759	10.22163337	5
LKMS22	2010	21.92	99.06	32	4.68	3.11	9.769330556	9.915364933	1
LKMS22	2011	23.01	90.06	31	3.45	3.45	9.775863594	9.95632354	1
LKMS22	2012	25.22	89.79	31	3.89	3.47	9.810289164	10.04564204	1
LKMS22	2013	30.41	78.91	32	3.45	3.67	9.830552504	10.16583658	1
LKMS22	2014	32.54	78.91	20	3.86	3.86	9.942952926	10.20722927	1
LKMS22	2015	37.04	78.66	18	5.95	3.99	10.03285804	10.25574169	2
LKMS22	2016	38.63	77.23	14	7.99	4.12	10.12276315	10.34564681	2
LKMS22	2017	50.45	76.98	12	8.79	4.37	10.21618483	10.45959016	2
LKMS22	2018	52.40	71.43	12	9.05	5.67	10.22902206	10.46045788	2
LKMS23	2010	23.05	93.23	32	4.93	6.45	9.799819955	9.907725352	0
LKMS23	2011	24.41	91.31	24	4.33	7.21	9.912861439	10.03049523	0
LKMS23	2012	30.53	93.77	24	3.84	7.74	9.914205668	10.08169676	1
LKMS23	2013	31.01	92.76	26	3.76	8.01	9.922589836	10.10118295	1
LKMS23	2014	31.62	92.77	33	4.21	8.6	9.993277555	10.14257564	1
LKMS23	2015	34.87	93.20	19	3.68	8.84	10.0060883	10.11399369	2
LKMS23	2016	37.86	94.69	11	4.4	9.64	10.12331402	10.23121941	2
LKMS23	2017	40.74	94.97	14	4.84	10.29	10.2167357	10.34516277	2
LKMS23	2018	44.22	94.47	13	4.99	10.6	10.22957293	10.34603049	2
LKMS24	2010	17.91	90.23	14	4.21	5.05	10.64165523	10.81558043	3
LKMS24	2011	22.44	84.78	13	3.19	5.28	10.72290898	10.89683417	3
LKMS24	2012	24.55	83.64	13	4.76	5.62	10.72551704	10.90866461	4

LKMS24	2013	25.58	83.50	11	3.45	5.87	10.73473941	10.96394685	4
LKMS24	2014	28.24	83.11	11	3.9	6.39	10.79002166	11.00533954	6
LKMS24	2015	30.19	82.47	12	6.84	6.86	10.79581898	10.96974418	6
LKMS24	2016	31.30	82.03	11	5.44	7.1	10.83919121	11.01311641	8
LKMS24	2017	33.49	81.78	11	5.98	7.41	10.9326129	11.12705976	8
LKMS24	2018	38.60	81.24	11	6.16	7.6	10.94545012	11.12792748	8
LKMS25	2010	18.35	99.10	0	7.27	5.72	9.433575101	9.571011836	0
LKMS25	2011	18.69	99.04	0	7.19	6.35	9.649672537	9.711263841	0
LKMS25	2012	22.17	97.38	0	7.68	6.36	9.69756083	9.864318747	0
LKMS25	2013	24.11	94.77	0	6.72	6.45	9.787465942	9.914698503	1
LKMS25	2014	25.12	92.23	0	7.12	6.78	9.660180588	9.956091188	1
LKMS25	2015	25.78	92.03	0	6.12	7.25	9.991585925	10.0679034	1
LKMS25	2016	26.48	90.03	0	7.65	7.78	10.19570591	10.25060331	1
LKMS25	2017	27.55	89.76	0	8.42	7.89	10.28912759	10.36454666	1
LKMS25	2018	31.93	76.85	0	8.67	12.2	10.30196482	10.36541438	2
LKMS26	2010	24.54	97.63	25	6.25	10.12	9.05944301	9.286686791	0
LKMS26	2011	29.87	88.75	15	4.19	10.42	9.27303191	9.378201772	0
LKMS26	2012	31.78	88.56	24	6.79	10.8	9.302481058	9.41916038	0
LKMS26	2013	32.57	88.49	24	7.86	11.2	9.311254983	9.469540136	0
LKMS26	2014	34.01	87.51	20	6.27	12.4	9.361634739	9.510932822	0
LKMS26	2015	36.56	83.24	21	7.99	12.5	9.412014495	9.519919893	0
LKMS26	2016	39.37	83.20	18	4.21	12.78	9.462394252	9.570299649	1
LKMS26	2017	40.94	78.62	14	4.63	13.23	9.555815937	9.684243001	2
LKMS26	2018	42.56	78.24	15	4.77	14.2	9.568653161	9.685110723	2
LKMS27	2010	18.50	93.70	12	5.37	6.14	10.15124364	10.57343579	6
LKMS27	2011	20.17	93.67	12	4.68	6.83	10.24738703	10.62895312	7
LKMS27	2012	20.29	92.95	13	7.32	7.59	10.29660506	10.69876938	7
LKMS27	2013	25.46	92.62	12	5.54	7.83	10.39002674	10.74649438	7
LKMS27	2014	28.68	91.78	17	5.727	7.88	10.40286397	10.78788706	2
LKMS27	2015	30.81	91.73	14	4.730	8.630	10.42053116	10.78006172	8
LKMS27	2016	32.95	91.30	12	7.25	8.76	10.42245981	10.82927975	8
LKMS27	2017	32.73	83.39	14	7.98	9.380	10.47114116	10.9432231	9
LKMS27	2018	36.36	83.14	15	8.21	9.779	10.55288498	10.94409082	9
LKMS28	2010	17.75	99.55	19	7.62	12.85	10.25266344	10.29853124	2
LKMS28	2011	20.44	93.40	19	5.91	12.98	10.31322417	10.3374963	2
LKMS28	2012	22.82	93.40	18	4.99	13.24	10.32752544	10.38295205	2
LKMS28	2013	24.42	93.08	11	6.98	14.42	10.329837	10.4376988	2
LKMS28	2014	27.06	92.97	10	6.375	14.71	10.33758201	10.47909148	3
LKMS28	2015	30.08	92.53	17	6.99	15.48	10.49262864	10.51301199	3
LKMS28	2016	33.79	92.45	13	4.76	17.2	10.5179345	10.52884717	3
LKMS28	2017	34.85	90.50	17	5.24	19.7	10.61135619	10.64279052	3
LKMS28	2018	35.56	90.23	24	5.39	20.36	10.62419341	10.64365825	3
LKMS29	2010	23.72	96.81	53	4.46	9.09	9.314245402	9.364855395	0

LKMS29	2011	27.40	95.99	49	6.65	9.1	9.418223855	9.470389497	0
LKMS29	2012	30.24	95.81	42	7.94	10.31	9.419779504	9.468833848	0
LKMS29	2013	32.43	95.70	32	7.88	12.3	9.424298123	9.571152919	0
LKMS29	2014	35.16	95.59	37	6732	12.45	9.520542926	9.612545604	0
LKMS29	2015	36.36	95.03	23	4.99	12.89	9.580668093	9.634677385	0
LKMS29	2016	38.73	92.91	34	5.33	12.98	9.584067392	9.631278086	0
LKMS29	2017	41.66	92.23	19	5.86	13.01	9.674089778	9.745221438	0
LKMS29	2018	42.24	83.35	17	6.04	13.02	9.686927003	9.74608916	0
LKMS30	2010	13.10	86.26	27	4.56	6.71	9.181659387	9.292703569	0
LKMS30	2011	15.08	88.24	34	5190	6.73	9.232269381	9.343313562	0
LKMS30	2012	21.53	90.63	49	7.32	7.2	9.25826413	9.41910495	0
LKMS30	2013	24.97	92.01	35	5.15	7.45	9.271121684	9.546209748	0
LKMS30	2014	20.98	89.28	21	5555	7.45	9.328108819	9.587602433	1
LKMS30	2015	21.90	89.95	37	5.78	7.46	9.353035011	9.673314546	1
LKMS30	2016	23.63	87.80	30	7.68	7.78	9.499814064	9.800419345	1
LKMS30	2017	31.52	88.06	45	8.45	8.75	9.644196839	9.914362697	1
LKMS30	2018	33.74	96.87	25	8.7	9.15	9.768621249	9.915230418	1
LKMS31	2010	19.27	106.55	29	4.54	12.28	9.364311917	9.532974909	0
LKMS31	2011	22.17	96.86	16	6.88	13.64	9.410069407	9.578732399	0
LKMS31	2012	33.42	96.84	30	4.87	15.6	9.457169914	9.596905007	0
LKMS31	2013	34.03	96.67	16	7.78	17.9	9.460342512	9.71506294	0
LKMS31	2014	38.11	96.61	44	6.01	18.45	9.567068218	9.756455625	0
LKMS31	2015	39.23	96.38	26	6.19	31.27	9.612825709	9.760820431	4
LKMS31	2016	47.25	96.38	11	6.89	31.63	9.657074991	9.791658413	2
LKMS31	2017	47.67	96.34	19	7.58	35.02	9.750496676	9.905601765	1
LKMS31	2018	64.71	95.67	21	7.81	39.8	9.763333901	9.906469487	1
LKMS32	2010	13.55	95.67	41	5.49	6.62	9.62616933	9.809929213	0
LKMS32	2011	14.82	92.51	39	7.66	6.91	9.676779323	9.814294019	0
LKMS32	2012	16.72	92.23	36	4.55	7.36	9.6962881	9.864904012	0
LKMS32	2013	22.48	91.76	33	4.46	7.68	9.727389317	9.93650338	0
LKMS32	2014	22.98	90.52	38	5.54	7.81	9.745033407	9.977896065	1
LKMS32	2015	25.11	88.83	14	6.37	8.18	9.906401409	10.05707731	1
LKMS32	2016	28.57	88.83	39	6.92	8.56	9.967099249	10.17765124	1
LKMS32	2017	29.66	88.83	20	7.61	8.68	10.06052093	10.29159459	2
LKMS32	2018	36.76	85.65	34	7.84	9.17	10.07335816	10.29246232	2

LAMPIRAN 2 ESTIMASI REGRESI COMMON EFFECT PERSAMAAN PERTAMA

Dependent Variable: PROFIT?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 08:49

Sample: 2010 2018

Included observations: 9

Cross-sections included: 32

Total pool (balanced) observations: 288

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LP?	-0.065301	0.028522	-2.289491	0.0228
NPF?	1.022416	0.234543	4.359190	0.0000
CAR?	0.996526	0.090888	10.96429	0.0000
JP?	-2.275264	2.645870	-0.859930	0.3906
ASSET?	3.944706	2.506260	1.573942	0.1166
KC?	-0.157037	0.034230	-4.587703	0.0000
R-squared	0.292561	Mean dependent var		31.93045
Adjusted R-squared	0.280017	S.D. dependent var		11.08472
S.E. of regression	9.405582	Akaike info criterion		7.341097
Sum squared resid	24947.12	Schwarz criterion		7.417409
Log likelihood	-1051.118	Hannan-Quinn criter.		7.371678
Durbin-Watson stat	0.273022			

LAMPIRAN 3 ESTIMASI REGRESI FIXED EFFECT PERSAMAAN PERTAMA

Dependent Variable: PROFIT?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 08:47

Sample: 2010 2018

Included observations: 9

Cross-sections included: 32

Total pool (balanced) observations: 288

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-353.1923	26.05127	-13.55758	0.0000
LP?	-0.051858	0.023979	-2.162626	0.0315
NPF?	-0.111867	0.304400	-0.367498	0.7136
CAR?	0.500261	0.117799	4.246719	0.0000
JP?	2.479254	4.258258	0.582223	0.5609
ASSET?	34.52471	4.225381	8.170792	0.0000
KC?	0.570490	0.139057	4.102579	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
LKMS1--C	13.13454			
LKMS2--C	0.703140			
LKMS3--C	5.206630			
LKMS4--C	10.18733			
LKMS5--C	-1.010936			
LKMS6--C	-75.59260			
LKMS7--C	-10.50111			
LKMS8--C	-25.11823			
LKMS9--C	-21.99873			
LKMS10--C	-19.83751			
LKMS11--C	-13.06446			
LKMS12--C	-0.462762			
LKMS13--C	-16.47016			
LKMS14--C	-3.764647			
LKMS15--C	-12.60024			
LKMS16--C	9.744839			
LKMS17--C	20.62103			
LKMS18--C	23.45516			
LKMS19--C	32.77744			
LKMS20--C	15.94557			
LKMS21--C	8.068286			
LKMS22--C	9.888038			
LKMS23--C	7.891600			
LKMS24--C	-29.83183			
LKMS25--C	4.309820			
LKMS26--C	31.94819			
LKMS27--C	-23.67630			

LKMS28--C	-14.60332
LKMS29--C	29.58908
LKMS30--C	19.38722
LKMS31--C	21.54636
LKMS32--C	4.128560

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.853994	Mean dependent var	31.93045
Adjusted R-squared	0.832385	S.D. dependent var	11.08472
S.E. of regression	4.538178	Akaike info criterion	5.985318
Sum squared resid	5148.764	Schwarz criterion	6.468625
Log likelihood	-823.8857	Hannan-Quinn criter.	6.178998
F-statistic	39.52039	Durbin-Watson stat	0.868276
Prob (F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 4 ESTIMASI REGRESI RANDOM EFFECT PERSAMAAN PERTAMA

Dependent Variable: PROFIT?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/01/20 Time: 08:50

Sample: 2010 2018

Included observations: 9

Cross-sections included: 32

Total pool (balanced) observations: 288

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-223.0303	20.72141	-10.76328	0.0000
LP?	-0.065587	0.029252	-2.242131	0.0257
NPF?	0.443054	0.262551	1.687499	0.0926
CAR?	0.746813	0.079540	9.389143	0.0000
JP?	2.997877	4.822849	0.621599	0.5347
ASSET?	20.97711	4.555078	4.605214	0.0000
KC?	0.055224	0.151463	0.364602	0.7157
Random Effects				
(Cross)				
LKMS1--C	15.59703			
LKMS2--C	1.319002			
LKMS3--C	6.436059			
LKMS4--C	9.502708			
LKMS5--C	-1.160078			

LKMS6--C	-40.07602
LKMS7--C	-6.606139
LKMS8--C	-18.01468
LKMS9--C	-14.72437
LKMS10--C	-15.09127
LKMS11--C	-7.565721
LKMS12--C	1.498905
LKMS13--C	-10.48745
LKMS14--C	-4.560126
LKMS15--C	-8.566926
LKMS16--C	5.357504
LKMS17--C	13.50868
LKMS18--C	13.98376
LKMS19--C	20.05372
LKMS20--C	9.232145
LKMS21--C	5.583253
LKMS22--C	9.252284
LKMS23--C	6.092173
LKMS24--C	-17.27334
LKMS25--C	-0.913415
LKMS26--C	19.11966
LKMS27--C	-14.34702
LKMS28--C	-13.32163
LKMS29--C	17.63902
LKMS30--C	9.381494
LKMS31--C	9.051593
LKMS32--C	0.099204

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	7.022231	0.7054
Idiosyncratic random	4.538178	0.2946

Weighted Statistics

R-squared	0.552269	Mean dependent var	6.724193
Adjusted R-squared	0.542709	S.D. dependent var	8.347628
S.E. of regression	5.644939	Sum squared resid	8954.158
F-statistic	57.76828	Durbin-Watson stat	0.548014
Prob (F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.759534	Mean dependent var	31.93045
Sum squared resid	62048.17	Durbin-Watson stat	0.079084

LAMPIRAN 5 UJI CHOW PERSAMAAN PERTAMA

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: LKMS

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	30.602815	(31,250)	0.0000
Cross-section Chi-square	451.446155	31	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PROFIT?

Method: Panel Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 08:52

Sample: 2010 2018

Included observations: 9

Cross-sections included: 32

Total pool (balanced) observations: 288

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-30.61410	6.811621	-4.494393	0.0000
LP?	-0.030674	0.027930	-1.098260	0.2730
NPF?	1.098763	0.206143	5.330108	0.0000
CAR?	1.008707	0.084759	11.90094	0.0000
JP?	-2.212410	2.525623	-0.875986	0.3818
ASSET?	6.780560	2.921949	2.320561	0.0210
KC?	-0.293282	0.030437	-9.635673	0.0000
R-squared	0.299936	Mean dependent var		31.93045
Adjusted R-squared	0.284988	S.D. dependent var		11.08472
S.E. of regression	9.373058	Akaike info criterion		7.337561
Sum squared resid	24687.03	Schwarz criterion		7.426591
Log likelihood	-1049.609	Hannan-Quinn criter.		7.373239
F-statistic	20.06534	Durbin-Watson stat		0.271572
Prob (F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 6 UJI HAUSMAN PERSAMAAN PERTAMA

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: LKMS

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	159.772187	6	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var (Diff.)	Prob.
LP?	-0.051858	-0.065587	0.000069	0.0986
NPF?	-0.111867	0.443054	0.005356	0.0000
CAR?	0.500261	0.746813	0.000829	0.0000
JP?	2.479254	2.997877	4.733316	0.8116
ASSET?	34.524713	20.977109	3.324615	0.0000
KC?	0.570490	0.055224	0.011928	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PROFIT?

Method: Panel Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 08:52

Sample: 2010 2018

Included observations: 9

Cross-sections included: 32

Total pool (balanced) observations: 288

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-353.1923	24.78666	-14.24929	0.0000
LP?	-0.051858	0.030410	-1.705291	0.0894
NPF?	-0.111867	0.272559	-0.410430	0.6818
CAR?	0.500261	0.084589	5.914054	0.0000
JP?	2.479254	5.290859	0.468592	0.6398
ASSET?	34.52471	4.906460	7.036583	0.0000
KC?	0.570490	0.186733	3.055115	0.0025

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.853994	Mean dependent var	31.93045
Adjusted R-squared	0.832385	S.D. dependent var	11.08472

S.E. of regression	4.538178	Akaike info criterion	5.985318
Sum squared resid	5148.764	Schwarz criterion	6.468625
Log likelihood	-823.8857	Hannan-Quinn criter.	6.178998
F-statistic	39.52039	Durbin-Watson stat	0.868276
Prob (F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 7 ESTIMASI REGRESI COMMON EFFECT PERSAMAAN KEDUA

Dependent Variable: BOPO

Method: Panel Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 08:55

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 288

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.53074	7.337423	11.65678	0.0000
LP	0.043427	0.022014	1.972703	0.0495
NPF	-0.086365	0.247406	-0.349082	0.7273
CAR	-0.091251	0.070099	-1.301745	0.1941
JP	7.824381	3.388259	2.309263	0.0217
ASSET	-7.108275	3.291315	-2.159707	0.0316
JC	0.069036	0.059390	1.162420	0.2461
R-squared	0.045358	Mean dependent var	91.15069	
Adjusted R-squared	0.024975	S.D. dependent var	6.103655	
S.E. of regression	6.026955	Akaike info criterion	6.454366	
Sum squared resid	10207.10	Schwarz criterion	6.543396	
Log likelihood	-922.4287	Hannan-Quinn criter.	6.490044	
F-statistic	2.225217	Durbin-Watson stat	0.309871	
Prob (F-statistic)	0.040925			

LAMPIRAN 8 ESTIMASI REGRESI FIXED EFFECT PERSAMAAN KEDUA

Dependent Variable: BOPO

Method: Panel Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 08:56

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 288

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	292.9254	24.60322	11.90598	0.0000
LP	0.017854	0.009016	1.980300	0.0488
NPF	0.132836	0.214669	0.618797	0.5366
CAR	-0.028838	0.054183	-0.532237	0.5950
JP	-6.858656	3.082876	-2.224759	0.0270
ASSET	-13.08590	2.751057	-4.756680	0.0000
JC	-0.150346	0.056264	-2.672165	0.0080
Fixed Effects				
(Cross)				
LKMS1--C	3.826765			
LKMS2--C	8.801722			
LKMS3--C	-2.788395			
LKMS4--C	3.915827			
LKMS5--C	28.49011			
LKMS6--C	23.44689			
LKMS7--C	10.76758			
LKMS8--C	4.130100			
LKMS9--C	10.21661			
LKMS10--C	15.52126			
LKMS11--C	11.83543			
LKMS12--C	-3.020361			
LKMS13--C	-9.864382			
LKMS14--C	-15.79082			
LKMS15--C	-14.76885			
LKMS16--C	-6.247267			
LKMS17--C	-3.370277			
LKMS18--C	-3.975602			
LKMS19--C	0.157167			
LKMS20--C	18.35846			
LKMS21--C	-17.38779			
LKMS22--C	-0.027213			
LKMS23--C	8.516299			
LKMS24--C	-18.26399			
LKMS25--C	-11.08164			
LKMS26--C	-14.76623			

LKMS27--C	-3.670226
LKMS28--C	8.486039
LKMS29--C	-9.656780
LKMS30--C	-14.00240
LKMS31--C	-2.937100
LKMS32--C	-4.850921
Effects Specification	

R-squared	0.689554	Mean dependent var	91.15069
Adjusted R-squared	0.643608	S.D. dependent var	6.103655
S.E. of regression	3.643793	Akaike info criterion	5.546317
Sum squared resid	3319.307	Schwarz criterion	6.029624
Log likelihood	-760.6696	Hannan-Quinn criter.	5.739997
F-statistic	15.00795	Durbin-Watson stat	0.787651
Prob (F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 9 ESTIMASI REGRESI RANDOM EFFECT PERSAMAAN KEDUA

Dependent Variable: BOPO
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/01/20 Time: 09:16
Sample: 2010 2018
Periods included: 9
Cross-sections included: 32
Total panel (balanced) observations: 288
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	160.8057	11.79918	13.62855	0.0000
LP	0.060937	0.021198	2.874663	0.0044
NPF	-0.165611	0.206230	-0.803040	0.4226
CAR	-0.181480	0.062373	-2.909616	0.0039
JP	-2.674698	3.033368	-0.881758	0.3787
ASSET	-4.015334	3.070937	-1.307527	0.1921
JC	-0.090999	0.090321	-1.007509	0.3146

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	3.828663	0.5247
Idiosyncratic random	3.643793	0.4753

Weighted Statistics

R-squared	0.195787	Mean dependent var	27.56275
Adjusted R-squared	0.178615	S.D. dependent var	4.720327
S.E. of regression	4.278045	Sum squared resid	5142.770
F-statistic	11.40166	Durbin-Watson stat	0.543523
Prob (F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.464866	Mean dependent var	91.15069
Sum squared resid	15662.45	Durbin-Watson stat	0.178466

LAMPIRAN 10 UJI CHOW PERSAMAAN KEDUA

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ01

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.734426	(31,250)	0.0000
Cross-section Chi-square	323.518257	31	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: BOPO

Method: Panel Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 09:17

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 288

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.53074	3.643532	23.47468	0.0000
LP	0.043427	0.023345	1.860216	0.0639
NPF	-0.086365	0.241899	-0.357030	0.7213
CAR	-0.091251	0.052418	-1.740823	0.0828
JP	7.824381	2.986020	2.620338	0.0093
ASSET	-7.108275	2.781417	-2.555631	0.0111
JC	0.069036	0.023507	2.936826	0.0036

R-squared	0.045358	Mean dependent var	91.15069
Adjusted R-squared	0.024975	S.D. dependent var	6.103655
S.E. of regression	6.026955	Akaike info criterion	6.454366
Sum squared resid	10207.10	Schwarz criterion	6.543396
Log likelihood	-922.4287	Hannan-Quinn criter.	6.490044
F-statistic	2.225217	Durbin-Watson stat	0.309871
Prob (F-statistic)	0.040925		

LAMPIRAN 11 UJI HAUSMAN PERSAMAAN KEDUA

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	112.337664	6	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var (Diff.)	Prob.
LP	0.017854	0.060937	0.000124	0.0001
NPF	0.132836	-0.165611	0.005372	0.0000
CAR	-0.028838	-0.181480	0.000889	0.0000
JP	-6.858656	-2.674698	1.291337	0.0002
ASSET	13.085899	-4.015334	3.236629	0.0000
JC	-0.150346	-0.090999	0.011859	0.5858

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: BOPO

Method: Panel Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 09:17

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 32

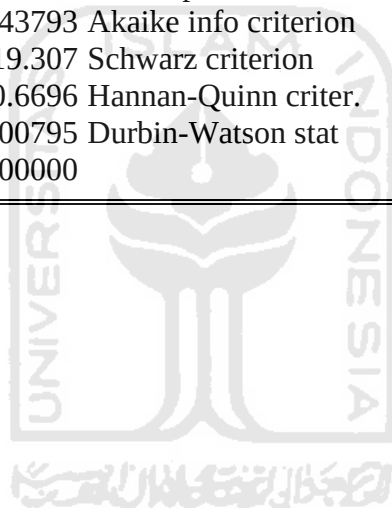
Total panel (balanced) observations: 288

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	292.9254	20.03001	14.62432	0.0000
LP	0.017854	0.023954	0.745330	0.4568
NPF	0.132836	0.218867	0.606927	0.5445
CAR	-0.028838	0.069131	-0.417155	0.6769
JP	-6.858656	3.239237	-2.117368	0.0352
ASSET	-13.08590	3.559113	-3.676731	0.0003
JC	-0.150346	0.141482	-1.062651	0.2890

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.689554	Mean dependent var	91.15069
Adjusted R-squared	0.643608	S.D. dependent var	6.103655
S.E. of regression	3.643793	Akaike info criterion	5.546317
Sum squared resid	3319.307	Schwarz criterion	6.029624
Log likelihood	-760.6696	Hannan-Quinn criter.	5.739997
F-statistic	15.00795	Durbin-Watson stat	0.787651
Prob (F-statistic)	0.000000		



Lampiran Estimasi Intersep sebagai pembeda *cross effect* dan *period effect*

Dependent Variable: PROFIT?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 08:50

Sample: 2010 2018

Included observations: 9

Cross-sections included: 32

Total pool (balanced) observations: 288

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-223.0303	20.72141	-10.76328	0.0000
LP?	-0.065587	0.029252	-2.242131	0.0257
NPF?	0.443054	0.262551	1.687499	0.0926
CAR?	0.746813	0.079540	9.389143	0.0000
JP?	2.997877	4.822849	0.621599	0.5347
ASSET?	20.97711	4.555078	4.605214	0.0000
KC?	0.055224	0.151463	0.364602	0.7157
Fixed Effects Cross)				
LKMS1--C	13.09703			
LKMS2--C	0.419002			
LKMS3--C	5.336059			
LKMS4--C	7.422601			
LKMS5--C	-1.170073			
LKMS6--C	-38.13412			
LKMS7--C	-4.312539			
LKMS8--C	-16.10458			
LKMS9--C	-12.54437			
LKMS10--C	-13.19228			
LKMS11--C	-5.523433			
LKMS12--C	0.948405			
LKMS13--C	-9.043745			
LKMS14--C	-3.340133			
LKMS15--C	-7.677924			
LKMS16--C	5.357504			
LKMS17--C	13.50868			
LKMS18--C	13.98376			
LKMS19--C	20.05372			
LKMS20--C	9.232145			
LKMS21--C	5.583253			
LKMS22--C	9.252284			
LKMS23--C	6.092173			
LKMS24--C	-17.27334			
LKMS25--C	-0.913415			
LKMS26--C	19.11966			
LKMS27--C	-14.34702			
LKMS28--C	-13.32163			

LKMS29--C	17.63902		
LKMS30--C	9.381494		
LKMS31--C	9.051593		
LKMS32--C	0.099204		
Fixed Effects (Period)			
2010--C	-0.196422		
2011--C	0.218056		
2012--C	-0.993491		
2013--C	-0.879765		
2014--C	-0.712838		
2015--C	-0.040566		
2016--C	0.609655		
2017--C	-0.999522		
2018--C	0.091124		
Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		7.022231	0.7054
Idiosyncratic random		4.538178	0.2946
Weighted Statistics			
R-squared	0.552269	Mean dependent var	6.724193
Adjusted R-squared	0.542709	S.D. dependent var	8.347628
S.E. of regression	5.644939	Sum squared resid	8954.158
F-statistic	57.76828	Durbin-Watson stat	0.548014
Prob (F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.759534	Mean dependent var	31.93045
Sum squared resid	62048.17	Durbin-Watson stat	0.079084

Dependent Variable: BOPO

Method: Panel Least Squares

Date: 06/01/20 Time: 08:56

Sample: 2010 2018

Periods included: 9

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 288

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	292.9254	24.60322	11.90598	0.0000

LP	0.017854	0.009016	1.980300	0.0488
NPF	0.132836	0.214669	0.618797	0.5366
CAR	-0.028838	0.054183	-0.532237	0.5950
JP	-6.858656	3.082876	-2.224759	0.0270
ASSET	-13.08590	2.751057	-4.756680	0.0000
JKC	-0.150346	0.056264	-2.672165	0.0080

Fixed Effects
(Cross)

LKMS1--C	4.843472
LKMS2--C	7.131673
LKMS3--C	-1.118507
LKMS4--C	38.74957
LKMS5--C	22.24672
LKMS6--C	25.82839
LKMS7--C	15.44247
LKMS8--C	4.876845
LKMS9--C	10.54625
LKMS10--C	12.46505
LKMS11--C	11.21336
LKMS12--C	-2.519783
LKMS13--C	-9.805060
LKMS14--C	-15.40919
LKMS15--C	-14.07024
LKMS16--C	-6.879993
LKMS17--C	-3.611640
LKMS18--C	-3.928224
LKMS19--C	0.201674
LKMS20--C	16.72210
LKMS21--C	-13.90670
LKMS22--C	0.473768
LKMS23--C	7.589502
LKMS24--C	-19.64991
LKMS25--C	-12.02548
LKMS26--C	-10.01240
LKMS27--C	-2.314231
LKMS28--C	7.123670
LKMS29--C	-8.931854
LKMS30--C	-12.15500
LKMS31--C	-2.832867
LKMS32--C	-3.131055

Fixed Effects (Period)

2010--C	-0.696422
2011--C	0.818056
2012--C	-0.898481
2013--C	-0.779765
2014--C	-0.812838
2015--C	-0.150586
2016--C	0.709695

2017--C -0.699532
 2018--C 0.797134
 Effects Specification

R-squared	0.689554	Mean dependent var	91.15069
Adjusted R-squared	0.643608	S.D. dependent var	6.103655
S.E. of regression	3.643793	Akaike info criterion	5.546317
Sum squared resid	3319.307	Schwarz criterion	6.029624
Log likelihood	-760.6696	Hannan-Quinn criter.	5.739997
F-statistic	15.00795	Durbin-Watson stat	0.787651
Prob (F-statistic)	0.000000		

